

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKJIP
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Sidoarjo
Pesona Delta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel serta pencapaian Good Governance dan Clean Government.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap



pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun berikutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR, S.IP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Dafatar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik	ix
Ikhtisar Eksekutif	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo.....	2
1. Kondisi Geografis	2
2. Kondisi Demografis	8
3. Kondisi Pemerintahan	9
4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	22
5. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	29
RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.....	29
1. Visi dan Misi	29
a. Visi	29
b. Misi.....	30
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	35
a. Tujuan dan Sasaran	35
b. Keselarasan Kinerja	41
c. Strategi Pembangunan Daerah	44
d. Arah Kebijakan	53
e. Inidkator Kinerja Utama (IKU).....	54
3. Cascading Kinerja	55
4. Peta Proses Bisnis	58
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	59
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	



A. Capaian dan Pengukuran Kinerja	64
B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja per Misi, Tujuan dan Sasaran	68
Misi 1	68
Misi 2	99
Misi 3	126
Misi 4	163
Misi 5	178
C. Akuntabilitas Keuangan	182
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	215
A. Kesimpulan	215
B. Saran	219
BAB V Prestasi dan Penghargaan	221
Lampiran 1	225
Lampiran 2	226
Lampiran 3	230
Lampiran 4	244
Lampiran 5	247
Lampiran 6	250
Lampiran 7	252
Lampiran 8	256
Lampiran 9	268
Lampiran 10	274

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	3
Tabel I.2	5
Tabel I.3	6
Tabel I.4	6
Tabel I.5	7
Tabel I.6	8
Tabel I.7	10
Tabel I.8	11
Tabel I.9	12
Tabel I.10	14
Tabel I.11	15
Tabel I.12	22
Tabel I.13	23
Tabel II.1	30
Tabel II.2	39
Tabel II.3	47
Tabel II.4	53
Tabel II.5	55
Tabel II.6	60
Tabel III.1	66
Tabel III.2	67
Tabel III.3	70
Tabel III.4	70
Tabel III.5	70
Tabel III.6	71
Tabel III.7	71
Tabel III.8	73
Tabel III.9	74
Tabel III.10	75

Tabel III.11	75
Tabel III.12	76
Tabel III.13	76
Tabel III.14	79
Tabel III.15	83
Tabel III.16	84
Tabel III.17	87
Tabel III.18	88
Tabel III.19	93
Tabel III.20	93
Tabel III.21	95
Tabel III.22	95
Tabel III.23	96
Tabel III.24	97
Tabel III.25	98
Tabel III.26	100
Tabel III.27	102
Tabel III.28	102
Tabel III.29	103
Tabel III.30	103
Tabel III.31	104
Tabel III.32	105
Tabel III.33	106
Tabel III.34	106
Tabel III.35	107
Tabel III.36	108
Tabel III.37	109
Tabel III.38	109
Tabel III.39	110
Tabel III.40	111
Tabel III.41	111

Tabel III.42	112
Tabel III.43	113
Tabel III.44	113
Tabel III.45	117
Tabel III.46	117
Tabel III.47	118
Tabel III.48	118
Tabel III.49	121
Tabel III.50	121
Tabel III.51	122
Tabel III.52	122
Tabel III.53	122
Tabel III.54	124
Tabel III.55	124
Tabel III.56	124
Tabel III.57	124
Tabel III.58	126
Tabel III.59	128
Tabel III.60	128
Tabel III.61	130
Tabel III.62	130
Tabel III.62	131
Tabel III.63	132
Tabel III.64	133
Tabel III.65	135
Tabel III.66	135
Tabel III.67	137
Tabel III.68	138
Tabel III.69	138
Tabel III.70	140
Tabel III.71	140

Tabel III.72	141
Tabel III.73	142
Tabel III.74	143
Tabel III.75	144
Tabel III.76	145
Tabel III.77	145
Tabel III.78	146
Tabel III.79	147
Tabel III.80	148
Tabel III.81	148
Tabel III.82	149
Tabel III.83	150
Tabel III.84	151
Tabel III.85	152
Tabel III.86	153
Tabel III.87	154
Tabel III.88	155
Tabel III.89	156
Tabel III.90	157
Tabel III.91	158
Tabel III.92	159
Tabel III.93	160
Tabel III.94	162
Tabel III.95	162
Tabel III.96	163
Tabel III.97	165
Tabel III.98	168
Tabel III.99	169
Tabel III.100	170
Tabel III.101	171
Tabel III.102	173

Tabel III.103	174
Tabel III.104	176
Tabel III.105	177
Tabel III.106	178
Tabel III.107	178
Tabel III.108	182
Tabel III.109	202
Tabel III.110	204
Tabel III.111	209
Tabel IV.1	216

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1.....	4
Grafik I.2.....	9
Grafik I.3.....	12
Grafik I.4.....	13
Grafik II.1.....	34
Grafik II.2.....	56
Grafik II.3.....	58
Grafik III.1.....	72
Grafik III.2.....	73
Grafik III.3.....	77
Grafik III.4.....	84
Grafik III.5.....	89
Grafik III.6.....	129
Grafik III.7.....	132
Grafik III.8.....	137
Grafik III.9.....	139
Grafik III.10.....	142
Grafik III.11.....	144
Grafik III.12.....	147
Grafik III.13.....	149
Grafik III.14.....	152
Grafik III.15.....	154
Grafik III.16.....	158
Grafik III.17.....	161
Grafik III.18.....	166
Grafik III.19.....	167
Grafik III.20.....	169
Grafik III.21.....	172
Grafik III.22.....	174

Grafik III.23.....	175
Grafik III.24.....	177

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama (ke-1) dari periode perencanaan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026. Secara umum tujuan dan sasaran melalui indikator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 dapat tercapai dengan baik, dari 6 tujuan yang mencakup 9 indikator dan 13 sasaran yang mencakup 31 indikator rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **100,36%** atau bermakna **SANGAT BERHASIL**.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan, telah ditetapkan 5 Misi, 6 Tujuan, 9 Indikator Kinerja Tujuan, 13 Sasaran dan 31 Indikator Kinerja Sasaran. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran untuk tahun pertama (2021) periode perencanaan RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

➤ Misi I terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 8 indikator kinerja sasaran :

Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum ada rilis dari Kemenpan RB

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 8 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Belum ada rilis dari Kementerian PANRB
2.	Opini Atas Audit BPK	Berhasil
3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Belum ada rilis dari Kementerian PANRB
4.	Status Kinerja LPPD	Belum ada rilis dari Kemendagri
5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Cukup
6.	Indeks Inovasi Daerah	Cukup
7.	Tingkat Maturitas SPIP	Berhasil
8.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Sangat Berhasil

- Misi II terdapat 2 tujuan, 4 indikator kinerja tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran :
- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 4 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Sangat Berhasil
2.	Indeks GINI	Sangat Berhasil
3.	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	Sangat Berhasil
4.	Persentase Penduduk Miskin	Sangat Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 9 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
-----	---------------------------	------------------

1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Sangat Berhasil
2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	Sangat Berhasil
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	Kurang
4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Berhasil
5.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	Berhasil
6.	Persentase Koperasi Berkualitas	Berhasil
7.	Persentase Desa Mandiri	Berhasil
8.	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	Berhasil
9.	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	Berhasil

- Misi III terdapat 1 tujuan, 2 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja sasaran :
- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Infrastruktur	Sangat Berhasil
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sangat Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 7 indikator sasaran , dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Sangat Berhasil
2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Sangat Berhasil
3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Berhasil
4.	Indeks Kualitas Air	Sangat Berhasil
5.	Indeks Kualitas Udara	Berhasil
6.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Cukup
7.	Indeks Resiko Bencana	Berhasil

- Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran :

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Sangat Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 3 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Berhasil
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Sangat Berhasil
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Sangat Berhasil
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Berhasil

- Misi V terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran :

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Belum ada rilis

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran, dengan ringkasan capaian sebagai berikut

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Indeks Toleransi	Sangat Berhasil
2.	Indeks Pelestarian Budaya	Belum ada rilis
3.	Indeks Rasa Aman	Sangat Berhasil

Berkenaan dengan ketercapaian indikator tujuan dan sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Hasil analisis pencapaian terhadap 6 (enam) tujuan dengan 9 (delapan) indikator kinerja tujuan, diketahui 2 indikator belum dapat diukur karena belum ada rilis dari kementerian lembaga terkait, sehingga hanya 7 (tujuh) indikator yang diukur. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang diukur, 7 (tujuh) indikator atau 100% dinilai Sangat Berhasil.
- Hasil analisis pencapaian terhadap 13 (tiga belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 10 (sepuluh) indikator atau 32% dinilai Sangat Berhasil, 13 (tiga belas) atau 41,94% dinilai Berhasil, 3 (tiga) indikator atau 9,68 % dinilai Cukup, satu indikator dinilai Kurang dan 3 (tiga) indikator atau 9,68% belum ada rilis dari kementerian lembaga terkait.
- Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 masuk kategori SANGAT BERHASIL, dan kalau dibandingkan dengan capaian tahun 2020 secara keseluruhan rata-rata meningkat.



BAB I



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Sidoarjo
Pesona Delta

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa azas - azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban.



Juga sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Tiga pilar *Good Governance* antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, tiga pilar ini merupakan *spirit* yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong (47 Km) dan sungai Surabaya (32,5 Km), sehingga terkenal dengan sebutan kota Delta. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 112°5' – 112°9' Bujur Timur dan 7°3' – 7°5' Lintang Selatan, dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*).

Tabel I.1
Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	13	6
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	19	-
8.	Jabon	15	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	322	31

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Grafik I.1**Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo**

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar antara 20 s.d 35 derajat Celsius.

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,30 Hektar dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

- 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin / payau berada di belahan timur meliputi 29,99% dari luas wilayah;
- 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar meliputi 40,81% dari luas wilayah; dan
- 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat meliputi 29,20% dari luas wilayah.

Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin dan air tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan jenis air asin dan 10 kecamatan murni air tawar. Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di

Kabupaten Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer.

Tabel I.2

Letak, Tinggi, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Tinggi Rata – Rata (m dpl)	Luas Wilayah (Km2)
1	Sidoarjo	4	62.56
2	Buduran	4	41.03
3	Candi	4	40.67
4	Porong	4	29.82
5	Krembung	5	29.55
6	Tulangan	7	31.21
7	Tanggulangin	4	32.29
8	Jabon	2	81.00
9	Krian	12	32.50
10	Balongsendo	20	31.40
11	Wonoayu	4	33.92
12	Tarik	16	36.06
13	Prambon	10	34.23
14	Taman	9	31.54
15	Waru	5	30.32
16	Gedangan	4	24.06
17	Sedati	4	79.43
18	Sukodono	7	32.68
Jumlah			714.24

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Wilayah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kandungan gas bumi yang dibentuk oleh batuan *alluvium* seluas 686,89 Ha tersebar disemua kecamatan, batuan *pliosen fasien sedimen* terdapat di 6 kecamatan, tanah *alluvial* kelabu merata di 18 kecamatan, *assosiasi alluvial* kelabu dan coklat kekuningan terdapat di 4 kecamatan, yaitu : Krembung, Balongsendo, Tarik, dan Prambon.

Tabel I.3

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Plistosen Fasien Sedimen (Ha)	Alluvium (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	42,00	6.214,00	6.256,00
2	Buduran	1.469,00	2.633,50	4.102,50
3	Candi	-	40,67	4.066,75
4	Porong	-	29,82	2.982,25
5	Krembung	-	29,55	2.955,00
6	Tulangan	-	31,21	3.120,50
7	Tanggulangin	-	32,29	3.229,00
8	Jabon	-	81,00	8.099,75
9	Krian	-	32,50	3.250,00
10	Balongsendo	-	31,40	3.140,00
11	Wonoayu	-	33,92	3.392,00
12	Tarik	-	36,06	3.606,00
13	Prambon	-	34,23	3.422,50
14	Taman	448,00	2.705,50	3.153,50
15	Waru	384,00	2.648,00	3.032,00
16	Gedangan	38,00	2.367,75	2.405,75
17	Sedati	355,00	7.588,00	7.943,00
18	Sukodono	-	32,68	3.267,75
Jumlah		2.736,00	24.602,07	71.424,25

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2021

Tabel I.4

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	2.966,11	-	3.289,89	-	6.256,00
2	Buduran	1.480,02	-	1.853,22	769,26	4.102,50
3	Candi	1.552,88	-	2.513,87	-	4.066,75
4	Porong	2.083,07	-	899,18	-	2.982,25
5	Krembung	2.500,95	454,05	-	-	2.955,00
6	Tulangan	3.120,50	-	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	1.564,77	-	1.664,23	-	3.229,00

No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
8	Jabon	2.580,20	-	5.519,55	-	8.099,75
9	Krian	3.250,20	-	-	-	3.250,00
10	Balongsendo	3.250,00	2.795,55	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	3.392,00	-	-	-	3.392,00
12	Tarik	2.618,93	987,07	-	-	3.606,00
13	Prambon	2.688,94	733,56	-	-	3.422,50
14	Taman	3.153,50	-	-	-	3.153,50
15	Waru	2.020,67	-	1.011,33	-	3.032,00
16	Gedangan	2.304,31	-	-	101,44	2.405,75
17	Sedati	3.333,04	-	4.609,96	-	7.943,00
18	Sukodono	3.267,75	-	-	-	3.267,75
Jumlah		47.017,64	4.970,23	21.361,23	870,70	71.424,25

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2021

Kondisi air tanah di Kabupaten Sidoarjo antara 0 – 5 meter di bawah permukaan tanah. Daerah banjir terbagi menjadi tiga, banjir karena hujan tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan, banjir periodik di sebagian 5 (lima) kecamatan, dan banjir karena air pasang berada di sebagian 4 (empat) kecamatan.

Tabel I.5

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Kondisi Air Tahun 2021

No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 – 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
1	Sidoarjo	4.063,62	308,14	-	-	6.256,00
2	Buduran	1.822,50	17,50	-	701,75	4.102,50
3	Candi	667,25	491,30	-	-	4.066,75
4	Porong	-	14,26	75,50	-	2.982,25
5	Kremlung	-	17,00	12,00	-	2.955,00
6	Tulangan	-	48,00	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	640,75	21,25	-	-	3.229,00
8	Jabon	4.080,75	216,05	27,00	456,00	8.099,75
9	Krian	-	265,75	-	-	3.250,00
10	Balongsendo	-	30,00	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	-	71,50	-	-	3.392,00
12	Tarik	-	8,75	-	-	3.606,00

No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 – 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
13	Prambon	-	64,25	-	-	3.422,50
14	Taman	-	-	108,00	-	3.153,50
15	Waru	740,50	-	-	740,50	3.032,00
16	Gedangan	195,75	-	-	-	2.405,75
17	Sedati	4.101,57	-	387,90	120,30	7.943,00
18	Sukodono	-	-	-	-	3.267,75
Total		16.312,67	1.573,75	610,40	2.018,55	71.424,25

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2020

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan terendah di bulan Agustus.

Tabel I.6
Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

No	Lokasi Penakar Hujan	B U L A N											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Kemlaten	226.0	442.0	152.0	229.0	-	16.0	-	-	-	-	91.8	374.0
2	Ponokawan	196.0	909.0	313.0	189.0	-	23.0	-	-	-	-	231.0	222.0
3	Bakalan	261.0	470.0	268.0	109.0	-	18.0	-	-	-	-	182.0	197.0
4	Krian	173.0	377.0	325.0	175.0	-	20.0	-	-	-	-	216.0	198.0
5	Ketawang	280.0	450.0	318.0	135.0	-	27.0	-	-	-	-	242.5	223.5
6	Ketintang	250.0	483.0	252.0	234.0	-	24.0	-	-	-	-	130.2	234.0
7	Watutulis	238.0	398.0	228.0	178.0	-	20.0	-	-	-	-	290.0	243.0
8	Pertapan Maduretno	242.0	436.0	361.0	111.8	-	27.0	-	-	-	-	236.0	279.0
9	Cepiples	159.0	361.0	191.0	136.0	-	18.0	-	-	-	-	25.0	220.0
10	Luwung	176.0	438.0	228.0	183.0	-	20.0	-	-	-	-	42.0	241.0
11	Gedangrowo	111.1	322.0	144.0	166.0	-	15.0	-	-	-	-	98.0	121.0
12	Prambon	136.0	438.0	169.0	138.0	-	19.0	-	-	-	-	143.0	181.0
13	Botokan	292.0	529.0	410.0	174.0	-	32.0	-	-	-	-	191.0	214.0
14	Durungbedug	253.0	583.0	196.0	217.0	-	31.0	-	-	-	-	174.0	157.0
15	Bono	301.0	432.0	497.0	124.0	-	53.0	-	-	-	-	126.0	187.0
16	Sruni	359.0	578.0	523.0	147.0	-	35.0	-	-	-	-	240.0	278.0
17	Sedati	346.0	336.0	457.0	257.0	-	49.0	-	-	-	-	76.0	207.0
18	Bankar Kemantren	227.0	548.0	453.0	191.0	-	27.0	-	-	-	-	203.0	337.0
19	Keteggan	406.0	473.0	539.0	292.0	-	60.0	-	-	-	-	74.0	379.0
20	Sumpat	66.0	295.0	91.0	47.0	-	4.0	-	-	-	-	62.0	135.0
21	Klagen	256.0	269.0	76.0	88.0	-	5.0	-	-	-	-	287.0	229.0
22	Karangnongko	267.0	543.0	248.0	111.0	-	22.0	-	-	-	-	145.0	163.0
23	Sidoarjo	-	490.0	247.0	235.0	-	36.0	-	-	-	-	119.0	209.0
24	Kludan	201.0	441.0	344.0	167.0	-	15.0	-	-	-	-	67.0	254.0

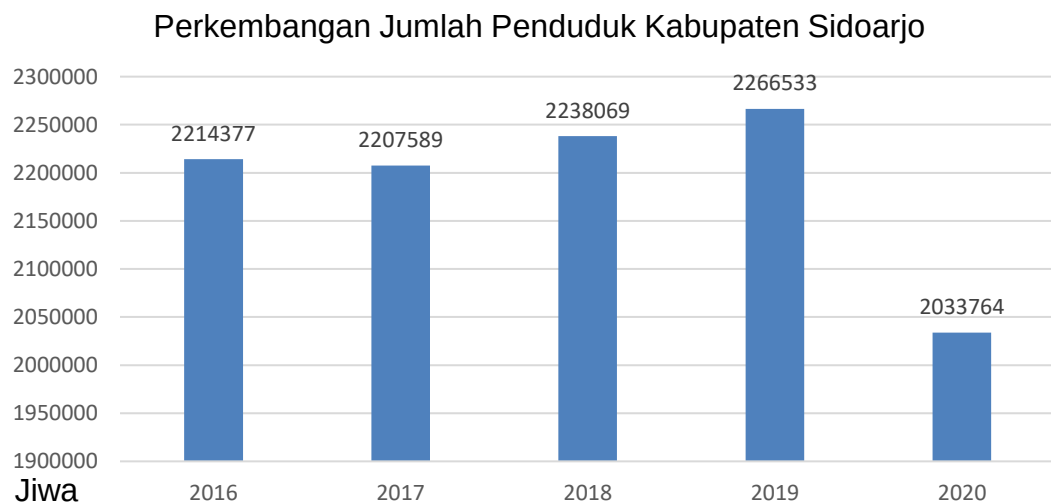
No	Lokasi Penakar Hujan	B U L A N											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
25	Putat	284.0	518.0	334.0	138.0	-	-	-	-	-	-	44.0	211.0
26	Kedung Cangkring	152.0	371.0	248.0	37.0	-	-	-	-	-	-	48.0	80.0
27	Porong	189.0	423.0	259.0	65.0	-	14.0	-	-	-	-	68.0	125.0
28	Krembung / Biting	129.0	391.0	80.0	122.0	-	4.0	-	-	-	-	49.0	98.0
29	Bedugbulus	140.0	399.0	113.0	168.0	-	5.0	-	-	-	-	136.0	154.0
30	Lengkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata		217.8	453.2	278.1	155.6	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.4	210.6

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2021

2. Kondisi Demografis

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2020, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.266.533 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Grafik I.2



Sumber data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 240.674 jiwa, sedangkan kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 61.092 jiwa. Jumlah penduduk per Kecamatan dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.7

Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1	TARIK	69.189	22.614
2	PRAMBON	79.952	26.231
3	KREMBUNG	69.887	22.530
4	PORONG	73.446	23.892
5	JABON	56.266	18.167
6	TANGGULANGIN	89.804	27.919
7	CANDI	153.423	47.630
8	SIDOARJO	201.115	63.231
9	TULANGAN	102.339	33.586
10	WONOAYU	85.586	27.367
11	KRIAN	130.930	41.659
12	BALONGBENDO	76.050	24.744
13	TAMAN	207.815	66.235
14	SUKODONO	121.859	37.716
15	BUDURAN	98.710	30.780
16	GEDANGAN	120.003	37.218
17	SEDATI	96.636	30.587
18	WARU	200.754	64.919
	TOTAL	2.033.764	647.025

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk per Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel I.8
Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

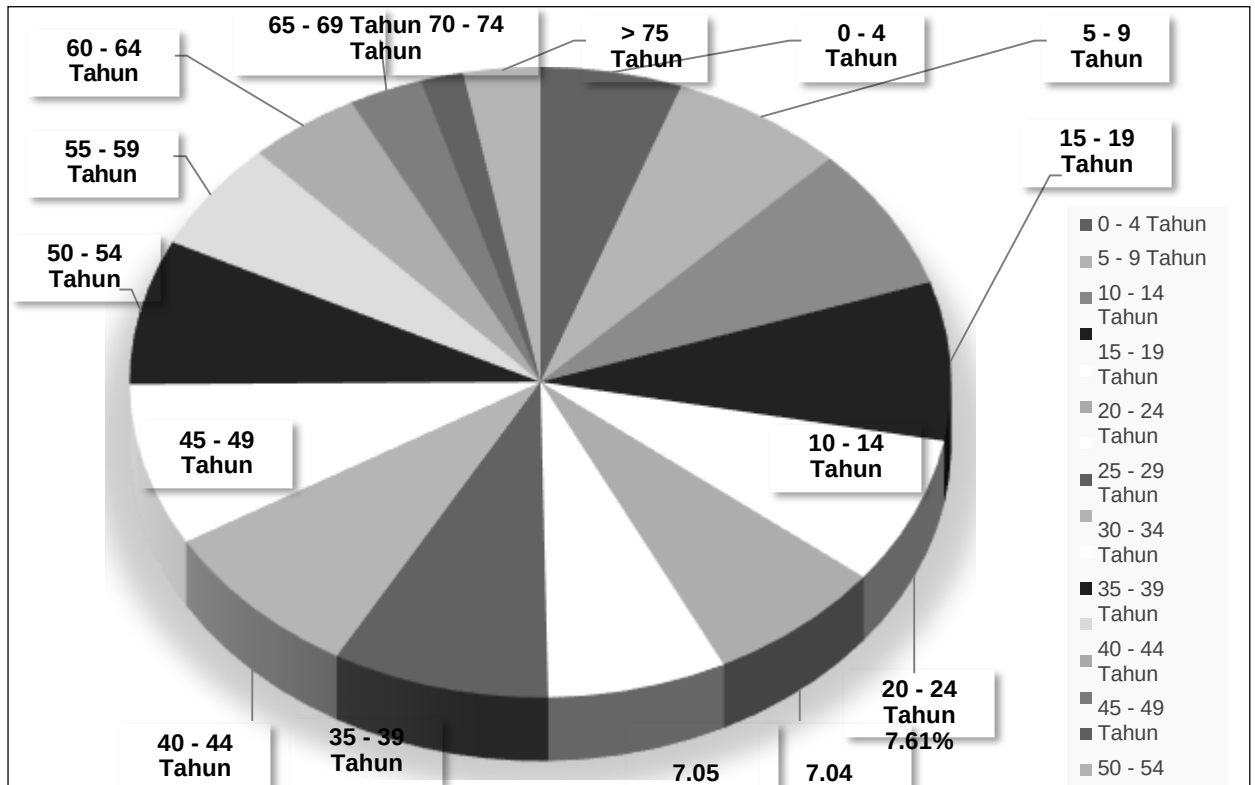
NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TARIK	34.830	34.359	69.189
2	PRAMBON	40.397	39.555	79.952
3	KREMBUNG	35.024	34.863	69.887
4	PORONG	37.102	36.344	73.446
5	JABON	28.274	27.992	56.266
6	TANGGULANGIN	45.097	44.707	89.804
7	CANDI	76.872	76.551	153.423
8	SIDOARJO	100.000	101.115	201.115
9	TULANGAN	51.423	50.916	102.339
10	WONOAYU	43.169	42.417	85.586
11	KRIAN	66.413	64.517	130.930
12	BALONGBENDO	38.449	37.601	76.050
13	TAMAN	104.753	103.062	207.815
14	SUKODONO	61.855	60.004	121.859
15	BUDURAN	49.710	49.000	98.710
16	GEDANGAN	60.286	59.717	120.003
17	SEDATI	48.821	47.815	96.636
18	WARU	99.933	100.821	200.754
	TOTAL	1.022.408	1.011.356	2.033.764

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Sidoarjo membentuk Piramida jenis piramida muda (expansive), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi daerah karena tingkat produktifitas suatu wilayah akan jauh lebih tinggi karena banyaknya usia muda dan sedikitnya

usia tua. Penduduk di Kabupaten Sidoarjo terbanyak berada di golongan usia produktif, yaitu antara 35 tahun sampai dengan 39 tahun.

Grafik I.3
Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2021



Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel I.9
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	0 - 4	99.298	93.853	193.150
2.	5 - 9	100.171	94.436	194.607
3.	10 - 14	92.589	87.173	179.762
4.	15 - 19	91.699	88.758	180.457
5.	20 - 24	98.330	95.234	193.564
6.	25 - 29	100.009	100.797	200.806
7.	30 - 34	102.942	108.303	211.245
8.	35 - 39	104.330	106.585	210.915

9.	40 - 44	99.148	96.188	195.336
10.	45 - 49	79.966	79.595	159.561
11.	50 - 54	64.165	61.845	126.010
12.	55 - 59	46.313	42.295	88.608
13.	60 - 64	26.104	26.109	52.213
14.	65 - 69	18.946	21.370	40.316
15.	70 - 74	12.150	15.647	27.824
16.	>75	10.656	17.185	27.841
TOTAL		1,146.816	1.135.399	2.282.215

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terbanyak adalah penduduk laki-laki yaitu 1.146.816 jiwa atau 50,25%, sedangkan penduduk perempuan yaitu 1.135.399 jiwa atau 49,74%. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dan grafik berikut :

Grafik I.4

Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin



Sumber : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagian besar penduduk Kabupaten Sidoarjo memiliki kualifikasi pendidikan Lulusan SMA Sederajat, yaitu 42,04% dari jumlah penduduk. Meski demikian, masih ada 25,20% penduduk Kabupaten Sidoarjo yang masih berpendidikan rendah atau Lulusan SD Sederajat.

Komposisi penduduk menurut pendidikan tersajikan dalam tabel berikut :

Tabel I.10
Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2021

NO	NAMA KECAMATAN	TDK/BL M SEKOL AH	BLM TAMAT SD/SE DE RAJAT	TAMAT SD/ SEDER AJ AT	SLTP/S ED ERAJA T	SLTA/S E DERAJ AT	D-I/II	AKADE MI/D- III/ SARJA N A MUDA	D-IV/S-I	S-II	S-III	TOTAL
1.	TARIK	14.000	4.984	16.359	13.390	17.673	145	496	2.067	72	3	69.189
2.	PRAMBON	14.197	6.588	18.477	14.201	22.597	180	690	2.930	88	4	79.952
3.	KREMBUNG	13.414	6.562	13.825	12.630	20.042	174	677	2.473	87	3	69.887
4.	PORONG	20.476	1.794	15.643	12.682	19.207	121	623	2.775	120	5	73.446
5.	JABON	12.605	2.980	13.945	10.911	13.584	108	449	1.630	49	5	56.266
6.	TANGGULANGIN	19.958	5.489	17.070	15.417	25.717	187	1.024	4.737	201	4	89.804
7.	CANDI	31.829	14.202	25.530	21.222	44.841	469	2.632	12.031	627	40	153.423
8.	SIDOARJO	44.243	13.853	27.411	24.501	58.968	825	4.811	24.910	1.523	70	201.115
9.	TULANGAN	19.302	9.500	18.719	17.054	31.518	217	1.119	4.747	161	2	102.339
10.	WONOAYU	21.176	4.322	20.446	13.367	21.721	184	760	3.474	131	5	85.586
11.	KRIAN	27.335	11.420	25.297	20.737	37.012	349	1.645	6.879	248	8	130.930
12.	BALONGBENDO	18.086	4.660	16.246	13.794	19.762	174	600	2.643	84	1	76.050
13.	TAMAN	36.331	20.240	30.543	28.769	68.332	1.219	4.200	17.018	1.076	87	207.815
14.	SUKODONO	25.096	9.503	19.120	17.342	38.261	515	2.041	9.519	437	25	121.859
15.	BUDURAN	19.340	8.982	12.972	14.106	31.061	365	1.884	9.401	578	21	98.710
16.	GEDANGAN	29.664	6.875	16.815	16.547	36.505	428	2.205	10.373	563	28	120.003
17.	SEDATI	19.950	7.264	15.429	13.056	30.326	358	1.840	7.734	652	27	96.636
18.	WARU	42.105	15.550	23.441	25.481	62.121	674	4.438	24.993	1.856	95	200.754
TOTAL		429.107	154.768	347.288	305.207	599.248	6.692	32.134	150.334	8.553	433	2.033.764

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Sedangkan untuk komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.11

Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2021

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	615.678	45.	USTADZ/MUBALIGH	126
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	118.096	46.	JURU MASAK	35
3	PELAJAR/MAHASISWA	325.217	47.	PROMOTOR ACARA	0
4	PENSIUNAN	15.685	48.	ANGGOTA DPR RI	5
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	27.382	49.	ANGGOTA DPD RI	2
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	13.915	50.	ANGGOTA BPK	2
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	4.655	51.	PRESIDEN	0
8	PERDAGANGAN	17.764	52.	WAKIL PRESIDEN	0
9	PETANI/PEKEBUN	41.640	53.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	2
10	PETERNAK	48	54.	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0
11	NELAYAN/PERIKANAN	787	55.	DUTA BESAR	1
12	INDUSTRI	166	56.	GUBERNUR	0
13	KONSTRUKSI	192	57.	WAKIL GUBERNUR	0
14	TRANSPORTASI	189	58.	BUPATI	1
15	KARYAWAN SWASTA	718.225	59.	WAKIL BUPATI	1
16	KARYAWAN BUMN	5.685	60.	WALIKOTA	0
17	KARYAWAN BUMD	562	61.	WAKIL WALIKOTA	0
18	KARYAWAN HONORER	689	62.	ANGGOTA DPRD PROP.	1
19	BURUH HARIAN LEPAS	2.759	63.	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	20
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1.966	64.	DOSEN	3,145
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	64	65.	GURU	22,064
22	BURUH PETERNAKAN	17	66.	PILOT	38
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	326	67.	PENGACARA	131
24	TUKANG CUKUR	20	68.	NOTARIS	93
25	TUKANG LISTRIK	65	69.	ARSITEK	42
26	TUKANG BATU	1.046	70.	AKUNTAN	21
27	TUKANG KAYU	212	71.	KONSULTAN	76
28	TUKANG SOL SEPATU	26	72.	DOKTER	1,647
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	102	73.	BIDAN	1,317
30	TUKANG JAHIT	429	74.	PERAWAT	2,345
31	TUKANG GIGI	4	75.	APOTEKER	183
32	PENATA RIAS	48	76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	16



33	PENATA BUSANA	6	77.	PENYIAR TELEVISI	1
34	PENATA RAMBUT	36	78.	PENYIAR RADIO	4
35	MEKANIK	240	79.	PELAUT	245
36	SENIMAN	72	80.	PENELITI	7
37	TABIB	18	81.	SOPIR	3.445
38	PARAJI	3	82.	PIALANG	6
39	PERANCANG BUSANA	9	83.	PARANORMAL	10
40	PENTERJEMAH	6	84.	PEDAGANG	13.434
41	IMAM MASJID	5	85.	PERANGKAT DESA	2.442
42	PENDETA	131	86.	KEPALA DESA	219
43	PASTOR	4	87.	BIARAWAN/BIARAWATI	8
44	WARTAWAN	155	88.	WIRASWASTA	70.280
			89.	PEKERJAAN LAINNYA	248
				JUMLAH	2.033.764

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mata pencaharian terbesar adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta, sebesar 35,12%. Posisi kedua adalah penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebesar 3,05%, sedangkan posisi ketiga petani/pekebun sebesar 2,15%, yang berkulat pada bisnis perdagangan sebesar 1,11%, dan pedagang sebesar 0,66%. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian ini tidak lepas dari struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

3. Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah melaksanakan unsur penunjang sekretariat daerah.

Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. Bagian Pemerintahan
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 3. Bagian Hukum
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 2. Bagian Pembangunan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Asisten Administrasi Umum
 1. Bagian Organisasi
 2. Bagian Umum
 3. Bagian Protokol dan Rumah Tangga
- Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan unsur penunjang sekretariat DPRD;
 - Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan unsur penunjang pengawasan.
 - Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

- 3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air, dan sub urusan drainase;
- 4) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan, pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi, serta sub urusan penataan ruang;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 6) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



- 10) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
- 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 13) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 15) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 17) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
- 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- 19) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;



- 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- Badan Daerah terdiri dari :
 - 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan;
 - 3) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - Kecamatan, yang terdiri dari 18 kecamatan dan melaksanakan unsur penunjang kewilayahan, antara lain :
 - 1) Kecamatan Sidoarjo dengan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Candi dengan Tipe A;
 - 3) Kecamatan Buduran dengan Tipe A;
 - 4) Kecamatan Gedangan dengan Tipe A;
 - 5) Kecamatan Sedati dengan Tipe A;
 - 6) Kecamatan Waru dengan Tipe A;
 - 7) Kecamatan Taman dengan Tipe A;
 - 8) Kecamatan Krian dengan Tipe A;
 - 9) Kecamatan Wonoayu dengan Tipe A;
 - 10) Kecamatan Sukodono dengan Tipe A;
 - 11) Kecamatan Balongbendo dengan Tipe A;
 - 12) Kecamatan Tarik dengan Tipe A;
 - 13) Kecamatan Tulangan dengan Tipe A;
 - 14) Kecamatan Prambon dengan Tipe A;

- 15) Kecamatan Krembung dengan Tipe A;
- 16) Kecamatan Tanggulangin dengan Tipe A;
- 17) Kecamatan Jabon dengan Tipe A;
- 18) Kecamatan Porong dengan Tipe A.

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah kabupaten dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola Minis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai bencana dengan Peraturan Daerah tersendiri, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli. Staf Ahli tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf ahli dimaksud antara lain :

- 1) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
- 2) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan
- 3) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM

4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2021 sebanyak 10.312 orang berdasarkan golongan dan jenis kelamin yang terdiri dari, sebagai berikut

Tabel I.12

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	2021		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(5)	(6)	(7)
1. I/A (Juru Muda)			
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	2	1	3
3. I/C (Juru)	15		15
4. I/D (Juru Tingkat I)	206	4	210
Golongan I/Range I	223	5	228
5. II/A (Pengatur Muda)	39	9	48
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	357	50	407
7. II/C (Pengatur)	281	352	633
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	686	399	1085
Golongan II/Range II	1 363	810	2 173
9. III/A (Penata Muda)	377	1 018	1395
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	614	1 374	1988
11. III/C (Penata)	350	774	1124
12. III/D (Penata Tingkat I)	419	760	1179
Golongan III/Range III	1 760	3 926	5 686
13. IV/A (Pembina)	405	670	1075
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	327	694	1021
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	51	61	112
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	7	6	13
17. IV/E (Pembina Utama)	2	2	4
Golongan IV/Range IV	792	1 433	2 225
Jumlah/Total	4 138	6 174	10 312

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatus Sipil Negara tersebut sudah cukup untuk mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Peningkat kualitas SDM terus dilakukan peningkatan baik dari segi softskill maupun hardskill dari aparatur dengan harapan kedepan akan adanya peningkatan secara bertahap dari segi kualitas/kompetensi SDM.

5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain itu instrumen penunjang lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana untuk setiap perangkat daerah adalah sebagai berikut :

NO	OPD	BARANG (UNIT)			NILAI(Rp)		
		BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH	BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	3.987	1.348	5.335	125.909.035.909,00	8.644.774.627,85	134.553.810.536,85
2	SEKRETARIAT DPRD	4.093	442	4.535	55.415.111.667,00	2.745.397.067,00	58.160.508.734,00
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	243.422	69.370	312.792	2.271.436.906.619,47	194.182.823.303,60	2.465.619.729.923,07
4	DINAS KESEHATAN	28.084	17.130	45.214	544.390.031.504,60	58.682.860.797,90	603.072.892.302,50
5	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	3.747	822	4.569	11.440.677.551.909,70	274.990.494.670,23	11.715.668.046.579,90
6	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	2.511	216	2.727	5.352.355.823.990,74	5.244.194.620,00	5.357.600.018.610,74
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	934	173	1.107	28.990.287.972,81	795.759.250,00	29.786.047.222,81
8	DINAS SOSIAL	1.206	218	1.424	42.559.629.228,91	952.274.845,00	43.511.904.073,91
9	DINAS TENAGA KERJA	602	49	651	8.056.182.197,00	695.561.530,00	8.751.743.727,00
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1.217	464	1.681	19.217.691.172,16	2.878.614.658,80	22.096.305.830,96
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	2.447	16	2.463	104.317.146.538,22	976.630.875,00	105.293.777.413,22
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	6.480	1.197	7.677	756.728.060.835,10	19.790.009.863,34	776.518.070.698,44
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	751	242	993	18.944.566.002,28	3.494.000.980,44	22.438.566.982,72
14	DINAS PERHUBUNGAN	4.855	80	4.935	117.635.000.142,86	7.567.248.275,00	125.202.248.417,86
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.227	96	1.323	49.091.524.219,34	1.057.633.399,00	50.149.157.618,34
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	521	106	627	14.857.653.113,16	404.313.293,00	15.261.966.406,16
17	DINAS PENANAMAN MODAL PTSP	1.469	316	1.785	204.268.499.837,98	1.163.785.863,00	205.432.285.700,98
18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	1.012	296	1.308	255.552.159.677,03	25.668.375.769,00	281.220.535.446,03
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	32.896	289	33.185	27.645.847.840,29	544.856.464,94	28.190.704.305,23
20	DINAS PERIKANAN	1.579	365	1.944	259.323.436.761,22	3.397.761.113,10	262.721.197.874,32

21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.936	680	3.616	747.412.303.147,84	7.969.400.095,89	755.381.703.243,73
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.212	148	1.360	10.778.240.308,00	1.337.291.780,00	12.115.532.088,00
23	BPKAD (SELAKU PENGELOLA)	259	22	281	681.306.549.122,05	28.133.094.245,00	709.439.643.367,05
24	BPKAD (SELAKU PENGGUNA BARANG)	1.587	194	1.781	80.306.827.136,88	24.977.638.817,00	105.284.465.953,88
25	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	1.702	512	2.214	31.342.764.077,82	3.884.676.942,40	35.227.441.020,22
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.821	136	1.957	36.097.750.190,00	526.273.357,00	36.624.023.547,00
27	BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK	647	649	1.296	12.108.623.076,27	1.658.626.224,00	13.767.249.300,27
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	597	591	1.188	47.152.042.038,65	8.683.597.789,72	55.835.639.828,37
29	RSUD KAB SIDOARJO	31.342	8	31.350	1.225.672.237.717,77	16.993.266.479,57	1.242.665.504.197,34
30	KECAMATAN SIDOARJO	3.502	243	3.745	147.918.306.780,84	273.371.800,00	148.191.678.580,84
31	KECAMATAN CANDI	621	343	964	9.518.135.168,71	1.118.716.850,84	10.636.852.019,55
32	KECAMATAN BUDURAN	406	250	656	6.191.108.650,00	364.730.467,00	6.555.839.117,00
33	KECAMATAN GEDANGAN	384	163	547	7.372.820.396,00	478.261.771,84	7.851.082.167,84
34	KECAMATAN SEDATI	489	373	862	5.972.049.833,00	700.788.254,84	6.672.838.087,84
35	KECAMATAN WARU	587	222	809	12.182.342.282,75	437.487.445,84	12.619.829.728,59
36	KECAMATAN TAMAN	2.442	562	3.004	121.924.299.178,00	2.897.638.091,84	124.821.937.269,84
37	KECAMATAN KRIAN	1.553	159	1.712	59.524.594.170,00	1.125.929.010,84	60.650.523.180,84
38	KECAMATAN WONOAYU	458	199	657	6.167.900.836,00	482.736.867,00	6.650.637.703,00
39	KECAMATAN SUKODONO	667	173	840	21.491.618.557,95	553.460.101,84	22.045.078.659,79
40	KECAMATAN BALONGBENDO	493	105	598	9.121.653.849,00	527.613.336,00	9.649.267.185,00
41	KECAMATAN TARIK	721	333	1.054	8.637.609.391,84	228.767.048,00	8.866.376.439,84
42	KECAMATAN TULANGAN	326	201	527	7.761.515.922,00	324.974.350,00	8.086.490.272,00
43	KECAMATAN PRAMBON	960	66	1.026	8.687.445.260,70	297.074.786,68	8.984.520.047,38
44	KECAMATAN KREMBUNG	574	127	701	7.775.387.908,84	337.709.850,00	8.113.097.758,84
45	KECAMATAN TANGGULANGIN	797	186	983	8.646.573.602,48	502.511.179,14	9.149.084.781,62
46	KECAMATAN JABON	245	120	365	8.116.806.424,00	540.055.386,84	8.656.861.810,84
47	KECAMATAN PORONG	963	53	1.016	33.043.292.175,37	2.258.821.575,00	35.302.113.750,37
48	INSPEKTORAT	717	94	811	18.718.494.477,26	1.188.849.172,00	19.907.343.649,26
49	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.232	94	1.326	9.706.106.837,00	490.568.000,00	10.196.674.837,00
	TOTAL	403.280	100.241	503.521	25.088.027.545.655,90	723.171.302.342,32	25.811.198.847.998,20

Sumber Data : BPKAD Kab. Sidoarjo tahun 2021

Dari data sarana dan prasarana yang ada pada Kabupaten Sidoarjo di atas dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja cukup mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

6. Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan kelima kondisi Kabupaten Sidoarjo tersebut maka sudah terakomodir kedalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 yang merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik di tingkat internal maupun eksternal, maka RPJMD Kabupaten Sidoarjo berawal dari isu strategis sebagai berikut :

1. Mewujudkan good governance melalui pengelolaan pemerintahan yang Tangkas, Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
2. Penguatan komitmen ASN, penyederhanaan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis Information and Communication Technology (ICT).
3. Pengembangan kualitas ASN secara merit system serta berkelanjutan.
4. Pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan investasi.
6. Meningkatkan kualitas tatakelola dan kemandirian Desa.
7. Menciptakan kebijakan perekonomian yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, utama sektor informal dan usaha mikro,
8. Memperluas Lapangan Kerja melalui kemitraan dengan swasta dan penciptaan wirausaha.
9. Penguatan Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi

- kemiskinan dan pengangguran.
10. Mengembangkan nilai tambah (value added) komoditas unggulan lokal yang halal dan mampu berdaya saing serta berkelanjutan.
 11. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal lokal berbasis on line yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
 12. Mendorong kemudahan investasi baru, berkembangnya ekonomi digital melalui start up bisnis dan industry kreatif.
 13. Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
 14. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuhkembangnya ekonomi lokal dan Usaha Mikro.
 15. Pengembangan pertanian berbasis teknologi dan penguatan sistim ketahanan pangan daerah.
 16. Mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan Pendidikan yang memiliki daya saing regional dan memiliki kharakter budi pekerti yang baik.
 17. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting.
 18. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik di seluruh wilayah.
 19. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata.
 20. Pengelolaan potensi dan peningkatan peran pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan.
 21. Cakupan layanan jaminan Pendidikan dan Kesehatan, kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.
 22. Prioritas implementasi pencapaian target SDGs pada indicator 1 sampai dengan nomor 9 dan dan nomor 11, yaitu menyangkut, kemiskinan, sanitasi lingkungan dan tatakota.
 23. Meningkatkan kestaraan dan kehidupan yang inklusif bagi disabilitas dan seluruh elemen masyarakat.
 24. Penyediaan sarana prasarana umum antara lain; RTH, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, dan ruang publik lainnya.



25. Pengembangan transportasi massal bagi orang dan barang yang dapat mengatasi kemacetan.
26. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
27. Pengembangan sistem sanitasi perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan 100% sanitasi sehat,
28. Sistem pengelolaan persampahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang efektif dan efisien serta berkelanjutan.
29. Pengembangan eco-energi untuk sarana prasarana publik.
30. Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa,
31. Optimalisasi kebijakan penataan ruang wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Sidoarjo guna menguatkan konektivitas pembangunan antar wilayah,
32. Integrasi pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung pemantapan Sektor Utama yaitu Perdagangan dan Industri,
33. Integrasi pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung percepatan Sektor Strategis, yaitu pariwisata, pertanian modern, perikanan dan jasa.
34. Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
35. Percepatan pengembangan jaringan irigasi teknis pendukung sector pertanian dan perikanan.
36. Peningkatan kapasitas dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
37. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain command center, jaringan pemadam kebakaran, pos tanggap darurat dll.
38. Penanganan terhadap dampak bencana geologi lumpur Sidoarjo, antara lain penurunan tanah, banjir dan dampak lain yang ditimbulkan.
39. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, perlindungan terhadap kaum disabilitas, antidiskriminasi SARA, gotong-royong, kebebasan politik dan



mengembangkan budaya dan kearifan lokal.

40. Mengarusutamakan kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
41. Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.



BAB II



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Sidoarjo
Pesona Delta

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026

1. VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026.

a. Visi

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada periode sebelumnya yakni tahun 2016 - 2021, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2021 – 2026. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 – 2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2021 – 2026, yakni :

**”TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG
SEJAHTERA, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN”**

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok - pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana berikut:

- **Sidoarjo Sejahtera** ; Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun

juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.

- **Sidoarjo Maju** ; Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- **Sidoarjo Berkarakter** ; Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
- **Pembangunan Berkelanjutan** ; Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

b. Misi

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah

diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi dijabarkan ke dalam tiap misi, sebagai berikut :

Tabel II.1

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”	Sidoarjo Sejahtera	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait 5 misi utama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan sosial yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib

Menindaklanjuti terhadap 5 Misi Kabupaten Sidoarjo yang mendukung tercapainya Visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026, maka disusunlah konsep kerangka yang merupakan kerangka arsitektur kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026. Kerangka kinerja yang juga sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar misi dalam pencapaian visi, yang dapat digambarkan sebagai berikut

Grafik II.1

Kerangka Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021



Pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, juga dipaparkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Bupati yang antara lain, sebagai berikut :

1. 100.000 Lapangan kerja baru
2. BPJS kesehatan gratis seluruh warga
3. Gratis makanan tiap hari warga miskin
4. 10.000 beasiswa kuliah
5. Insentif plus guru ngaji dan guru agama
6. Rp. 5juta - 50juta modal usaha mikro perempuan
7. Rp. 6juta operasional bagi RT
8. 20.000 UMKM naik kelas
9. Penataan Kota dan transportasi terpadu urau kemacetan
10. Tingkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader posyandu
11. Tingkatkan kesejahteraan GTT, guru swasta, dan tenaga honorer
12. Youth center, bangunan pusat kreativitas anak muda
13. 2.000 warung rakyat direnovasi
14. Tingkatkan ADD untuk Desa sejahtera
15. 24 jam pengaduan rakyat respon cepat
16. Reformasi perijinan untuk bisnis yang kondusif
17. Perluasan RTH, revitalisasi sungai, revolusi manajemen sampah.

2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan 5 misi yang telah diuraikan di depan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

a) Tujuan

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha

Indikator kinerja :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi



2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan. Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan
Indikator kinerja :
 - a. Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Indeks Gini
 - c. Tingkat pengangguran terbuka
 - d. Prosentase penduduk miskin
3. Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan
Indikator kinerja :
 - a. Indeks infrastruktur
 - b. Indeks kualitas lingkungan hidup
4. Terwujudnya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya
Indikator kinerja :
 - a. Indeks pembangunan manusia (IPM)
5. Menguatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat
Indikator kinerja :
 - a. Indeks kesalehan sosial

b) Sasaran

1. Terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital.
Indikator kinerja :
 - a. Nilai SAKIP Kabupaten
 - b. Opini Atas Audit BPK
 - c. Survey eksternal persepsi korupsi

- d. Status Kinerja LPPD
- e. Nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- f. Indeks inovasi daerah
- g. Tingkat Maturitas SPIP
2. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung kemudahan berusaha.
Indikator kinerja :
 - a. Indeks pelayanan publik
3. Berkembangnya perdagangan, industri, investasi, pertanian dan perikanan
Indikator kinerja :
 - a. Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan
 - b. Persentase kontribusi PDRB sektor industri
 - c. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas
 - d. Persentase pertumbuhan nilai investasi
4. Berkembangnya koperasi, usaha mikro dan kemandirian desa.
Indikator kinerja :
 - a. Persentase usaha mikro mandiri
 - b. Persentase koperasi berkualitas
 - c. Persentase desa mandiri
5. Terserapnya tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran
Indikator kinerja :
 - a. Persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor
6. Menurunnya penduduk miskin
Indikator kinerja :
 - a. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (GK)
7. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata
Indikator kinerja :
 - a. Indeks infrastruktur pekerjaan umum
 - b. Indeks infrastruktur pendidikan
 - c. Indeks infrastruktur kesehatan

8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana
Indikator kinerja :
 - a. Indeks kualitas air
 - b. Indeks kualitas udara
 - c. Indeks kualitas tutupan lahan
 - d. Indeks resiko bencana
9. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Indikator kinerja :
 - a. Harapan lama sekolah (HLS)
 - b. Rata-rata lama sekolah (RLS)
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Indikator kinerja :
 - a. Usia harapan hidup (UHH)
11. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat
Indikator kinerja :
 - a. Indeks pembangunan gender (IPG)
12. Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam masyarakat
Indikator kinerja :
 - a. Indeks toleransi
 - b. Indeks pelestarian budaya
13. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram
Indikator kinerja :
 - a. Indeks Rasa Aman

Berikut keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator keberhasilannya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tabel :

Tabel II.2
Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

MISI	TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI – 1:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggara nya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Nilai SAKIP Kabupaten
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN TANGKAS MELALUI DIGITALISASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN KEMUDAHAN BERUSAHA;				Opini Atas Laporan BPK
				Survey Eksternal Persepsi Korupsi
				Status Kinerja LPPD
				Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
				Indeks Inovasi Daerah
				Tingkat Maturitas SPIP
				Terselenggara nya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.

MISI	TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI – 2:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta	Pertumbuh an Ekonomi	Berkembangny a Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
MEMBANGKITKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN FOKUS PADA KEMANDIRIAN LOKAL BERBASIS USAHA MIKRO, KOPERASI, PERTANIAN.				Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.

PERIKANAN, SEKTOR JASA DAN INDUSTRI UNTUK MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN DAN MENGURANGI KEMISKINAN;	mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.			Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi
		Indeks Gini	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.	Persentase Usaha Mikro Mandiri
				Persentase Koperasi Berkualitas
				Persentase Desa Mandiri
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggungan Kemiskinan.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor
		Prosentase Penduduk Miskin	Menurunnya Penduduk miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)

MISI	TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI – 3:	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatika n Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL YANG MODERN DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN;				Indeks Infrastruktur Pendidikan
				Indeks Infrastruktur Kesehatan
		Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
Indeks Kualitas Tutupan Lahan				
Indeks Resiko Bencana				
MISI – 4:	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.	Indeks Pembangu nan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.	Harapan Lama Sekolah (HLS)
MEMBANGUN SDM UNGGUL DAN BERKARAKTER MELALUI PENINGKATAN AKSES PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN SERTA KEBUTUHAN DASAR LAINNYA;			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)

MISI	TUJUAN	INDIKAT OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI – 5: MEWUJUDKAN MASYARAKAT RELIGIUS YANG BERPEGANG TEGUH PADA NILAI-NILAI KEAGAMAAN SERTA MAMPU MENJAGA KERUKUNAN SOSIAL ANTAR WARGA	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat.	Indeks Kesalehan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.	Indeks Toleransi Indeks Pelestarian Budaya Indeks Rasa Aman

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

b. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2021 – 2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan Kinerja MISI – 1

Misi 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
Tujuan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.
Sasaran 1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.
Sasaran 2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

- Keselarasan Kinerja MISI – 2

Misi 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.		
Tujuan 1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.		
	Sasaran 1	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	
	Sasaran 2	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.	
Tujuan 2	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.		
	Sasaran 3	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran.	
	Sasaran 4	Menurunnya Penduduk Miskin.	

- Keselarasan Kinerja MISI – 3

Misi 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.		
Tujuan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.		
	Sasaran 1	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.	
	Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	

- Keselarasan Kinerja MISI – 4

Misi 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.		
	Tujuan	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.	
		Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.
		Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.
		Sasaran 3	Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam masyarakat

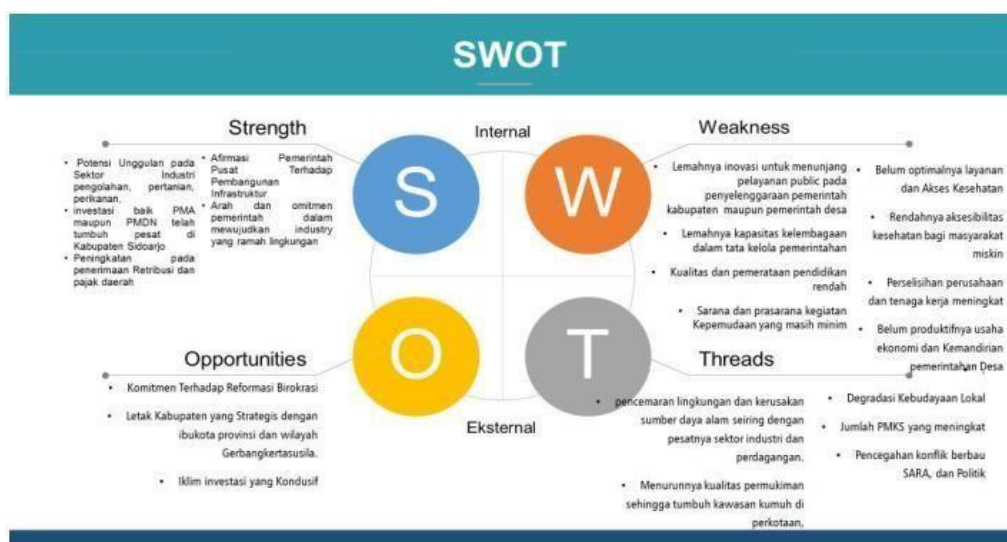
- Keselarasan Kinerja MISI – 5

Misi 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.		
	Tujuan	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat.	
		Sasaran 1	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat.
		Sasaran 2	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.

c. Strategi Pembangunan Daerah

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

Berikut analisa SWOT dari isu – isu strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana gambar berikut :



Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut :



Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dirumuskan dalam strategi, sebagai berikut :

- Strategi S-O ; yang ditetapkan adalah Penguatan Ekonomi yang berdayasaing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis eco Industri. Dimaksudkan pada strategi ini yaitu Industri olahan, UMKM, Pertanian dan Perikanan kelautan merupakan sektor sektor potensial Kabupaten Sidoarjo yang perlu didorong oleh pemerintah. Sebab, sektor-sektor potensial tersebut menjadi kekuatan dari pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo. agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor, industri olahan, UMKM, pertanian, Perikanan dan kelautan. Pajak daerah dan redistribusi merupakan salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan asli daerah, hal ini tentunya perhatian dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Kabupaten Sidoarjo. investasi baik PMA maupun PMDN telah tumbuh positif.
- Strategi S-T ; yang ditetapkan adalah Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas antar wilayah dan infrastruktur strategis penunjang perekonomian, serta pembangunan yang patuh akan rencana tata ruang. Sesuai dengan Konsep *Sustainable Development*, maka pembangunan lingkungan hidup menjadi salah satu unsur yang perlu perhatian guna untuk generasi mendatang dan menjaga dari dampak perubahan iklim
- Strategi W-O ; yang ditetapkan adalah Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government. Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam

setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkan hasil-hasil (outcome) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan. Smart governance prinsip dasar yaitu mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh masyarakat, mengembangkan operasional, meningkatkan manajemen organisasi, membuat system database yang dapat diakses secara umum, mengolah informasi yang up to date, menggunakan teknologi yang mutakhir, adanya koordinasi stakeholder.

- Strategi W-T (1) ; yang ditetapkan adalah Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Membangun generasi yang profesional menjadi prioritas utama dalam Kabupaten Sidoarjo mengingat daya saing dan kompetensi semakin meningkat. Kualitas pendidikan yang baik selaras dengan akses seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau serta pemerataan pendidikan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya yang bertujuan untuk mencegah, merawat dan mengobati, pemulihan kesehatan terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, upaya tersebut didorong dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keterjangkauan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan

pelayanan kesehatan di Kabupaten Masyarakat secara merata.

- Strategi W-T (2) ; yang ditetapkan adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan.

pada strategi ini menciptakan adanya social sustainability, prinsip utamanya yaitu equity, individu mempunyai akses berpartisipasi secara penuh. kedua, *social inclusion and interaction*, adanya hak untuk kesempatan berpartisipasi baik meliputi partisipasi dalam pembangunan maupun dalam berpolitik. Ketiga, security jaminan untuk lingkungan yang aman dan mendukung. Terakhir yaitu adaptability ketahanan terhadap komunitas. Strategi ini juga menciptakan adanya penguatan pada demokrasi Pancasila.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tatakelola Pemerintahan dan Inovasi pelayanan publik.
2. Penguatan ekonomi sektor strategis simultan dengan percepatan ekonomi kerakyatan.
3. Pemenuhan infrastruktur tata kota terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan sistem transportasi terpadu.
4. Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development).
5. Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai spirit pembangunan.

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai :

Tabel II.3

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2021 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN		
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.		
Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.	Sasaran 1.1 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Strategi 1.1.1. Penguatan kapasitas dan kapabilitas ASN secara bertahap.
		Strategi 1.1.2. Penyusunan dan implementasi SOP secara konsekuen dan berkelanjutan.
		Strategi 1.1.3. Penguatan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT)
	Sasaran 1.2 : Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.	Strategi 1.2.1. Peningkatan jangkauan pelayanan publik terpadu (Mall Pelayanan Publik)
		Strategi 1.2.2. Inovasi pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi digital.
		Strategi 1.2.3. Percepatan Pelayanan melalui Pemangkasan birokrasi dan tahapan ijin usaha untuk kemudahan investasi.

Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.		
Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan pertanian dan perikanan.	Sasaran 1.1 : Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Strategi 1.1.1. Penyusunan Regulasi Daerah yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, industri dan jasa. Strategi 1.1.2. Intensifikasi Pertanian dan Perikanan berbasis teknologi tepat guna.
	Sasaran 1.2: Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.	Strategi 1.2.1. Kebijakan Stimulus untuk mendorong berkembangnya Usaha Mikro dan koperasi. Strategi 1.2.2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Aparatur Desa dan Kapasitas Kelembagaan secara berkelanjutan untuk mendorong pengelolaan potensi desa secara optimal.
	Sasaran 2.1 : Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran.	Strategi 2.1.1. Kemitraan dengan perusahaan bidang Ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan Kerja lokal. Strategi 2.1.2. Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas.

--	--

		Strategi 1.2.3. Edukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk penanganan bencana, penciptaan dan pemeliharaan Kawasan vegetasi untuk meningkatkan rasio keterpenuhan RTH.
		Strategi 1.2.4. Sistim Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan pelibatan peran serta masyarakat.
Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.		
Tujuan 1 : Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.	Strategi 1.1.1. Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas tenaga kependidikan secara bertahap,
		Strategi 1.1.2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan secara merata,
		Strategi 1.1.3. Inovasi penyelenggaraan Pendidikan berbasis teknologi.
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.	Strategi 1.2.1. Peningkatan kesejahteraan dan kapasitas tenaga kesehatan secara bertahap,
		Strategi 1.2.2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan secara merata,
		Strategi 1.2.3. Inovasi penyelenggaraan layanan Kesehatan berbasis teknologi.

	Sasaran 1.3 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	Strategi 1.3.1. Penguatan komitmen secara afirmatif berupa pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat daerah.
		Strategi 1.3.2. Penguatan pemahaman dan kesadaran mengenai kesetaraan gender kepada masyarakat melalui KIE KG berbasis Masyarakat.
Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.		
Tujuan 1 : Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat.	Sasaran 1.1 : Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat.	Strategi 1.1.1. Promosi nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi melalui berbagai media strategis.
		Strategi 1.1.2. Penyelenggaraan event seni dan budaya secara berkala.
		Strategi 1.1.3. Sosialisasi nilai-nilai budaya, agama dan toleransi sejak dini melalui integrasi dengan kurikulum sekolah.
	Sasaran 1.2 : Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.	Strategi 1.2.1. Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat.
		Strategi 1.2.2. Peningkatan kerjasama dan pola hubungan lintas agama , lintas etnis secara berkelanjutan

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan serta prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan dituangkan dalam tema pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

Tahun	Tema dan Prioritas Pembangunan
Tahun 2022	Pemulihan ekonomi, reformasi sosial, percepatan pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata
Tahun 2023	Peningkatan pelayanan publik, pembangunan kota dan sistem transportasi yang mendukung berkembangnya perindustrian dan perdagangan
Tahun 2024	Penguatan konektivitas kawasan strategis sebagai pendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak pada pengentasan kemiskinan
Tahun 2025	Pembangunan kerjasama lintas daerah yang memposisikan Sidoarjo sebagai penyedia logistic regional dan nasional bertumpu pada kesiapan SDM yang unggul serta berdaya saing
Tahun 2026	Perwujudan visi Sidoarjo maju, sejahtera dan berkarakter berbasis pada kemandirian ekonomi, keunggulan SDM dan berkelanjutan



Arah Kebijakan Umum di atas yang merupakan manifestasi dari Strategi Umum, dapat dijadikan sebagai Milestone pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2022-2026. Milestone yang berangkat dari Arah Kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tahapan besar pembangunan bagi perencanaan tahunan di tingkat daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah. Pada tahap implementasinya, arah kebijakan di atas diselaraskan dengan tema pembangunan tahunan nasional dan provinsi Jawa Timur.

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

e. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) Nomor 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam table berikut :

Tabel II.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja Utama
1.	Indeks Reformasi Birokrasi
2.	Petumbuhan Ekonomi
3.	Indeks Gini
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5.	Persentase Penduduk Miskin
6.	Indeks Infrastruktur
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
8.	Indeks Pembangunan Manusia
9.	Indeks Kesalehan Sosial

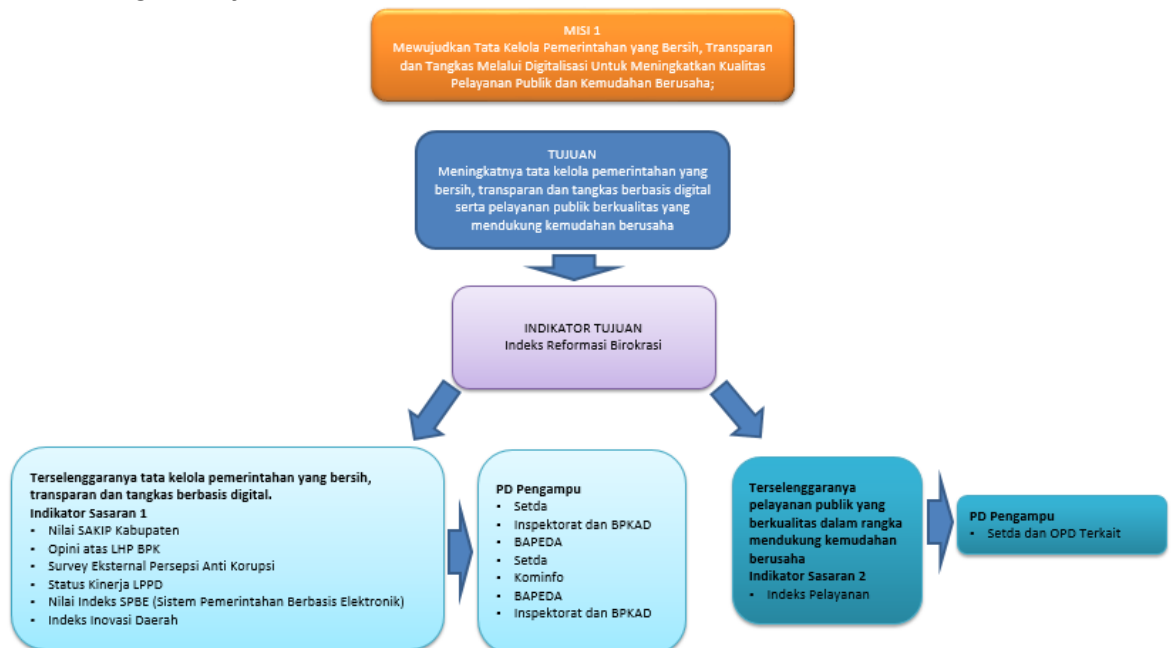
Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

3. CASCADING KINERJA

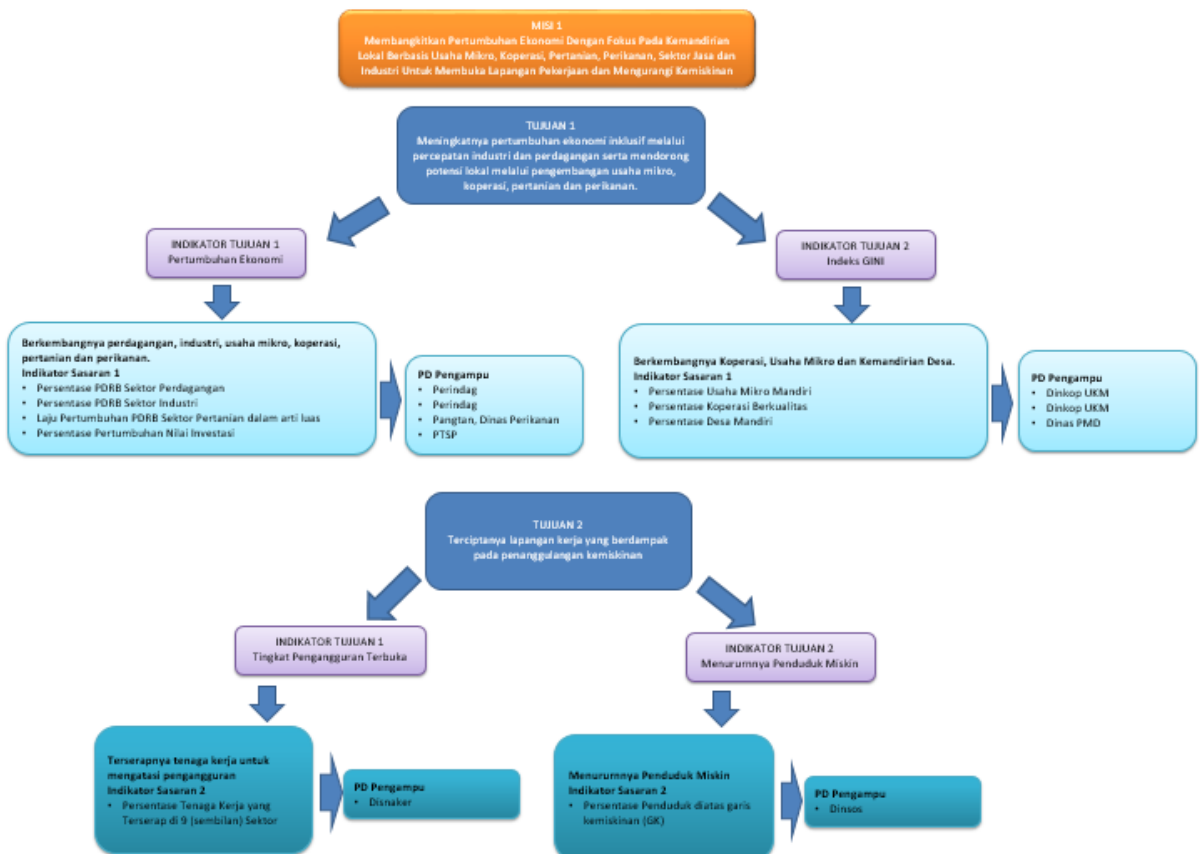
Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Sidoarjo menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek *kausalitas* / hubungan sebab akibat dan *alignment* / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

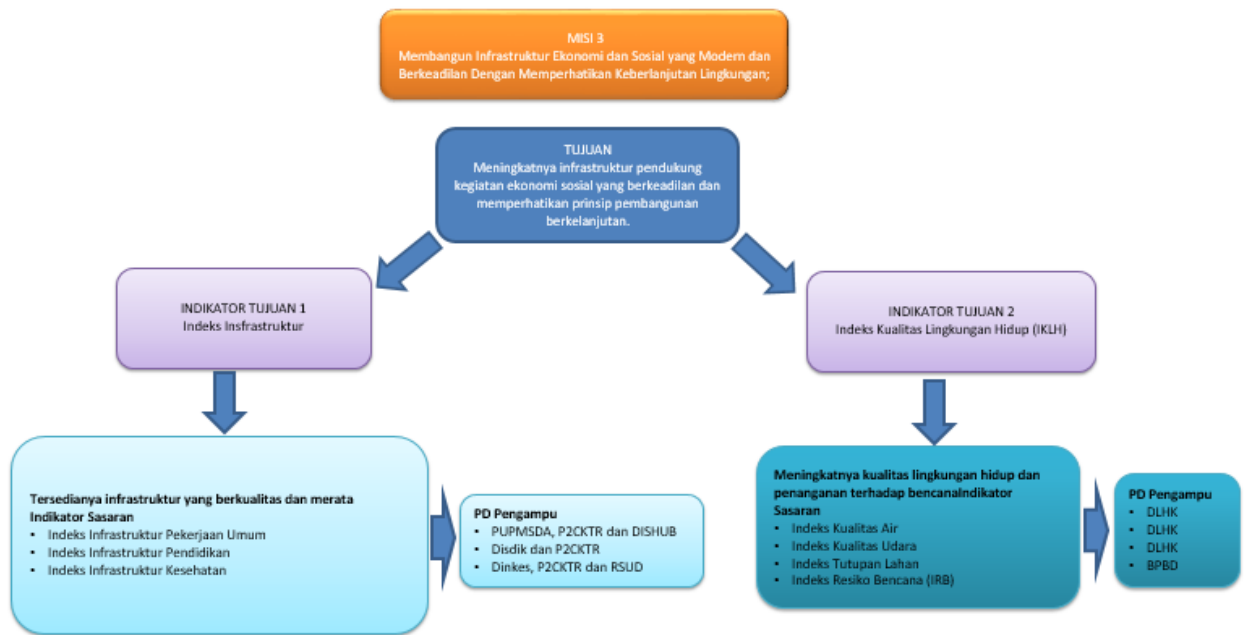
Cascading Kinerja Misi 1 :



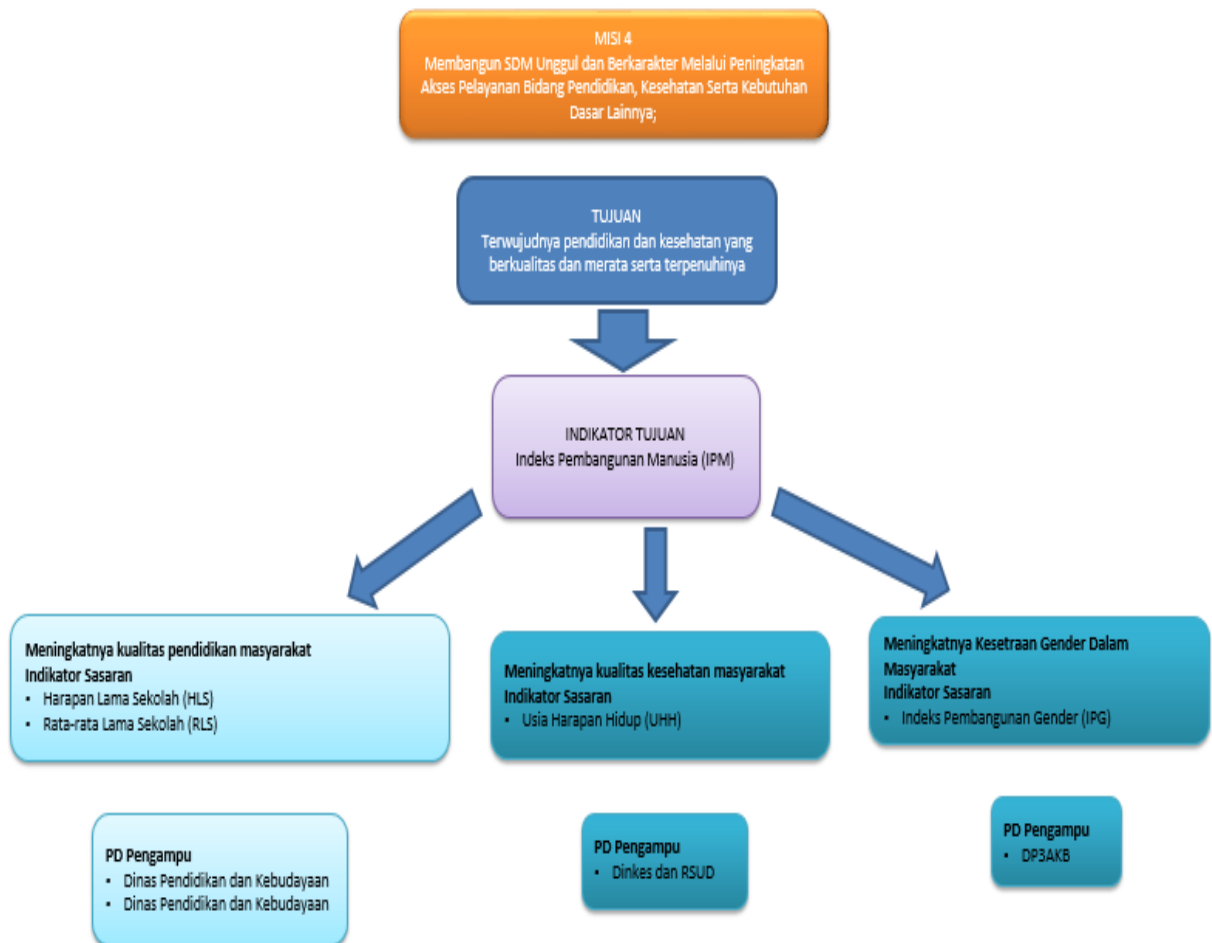
Cascading Kinerja Misi 2 :



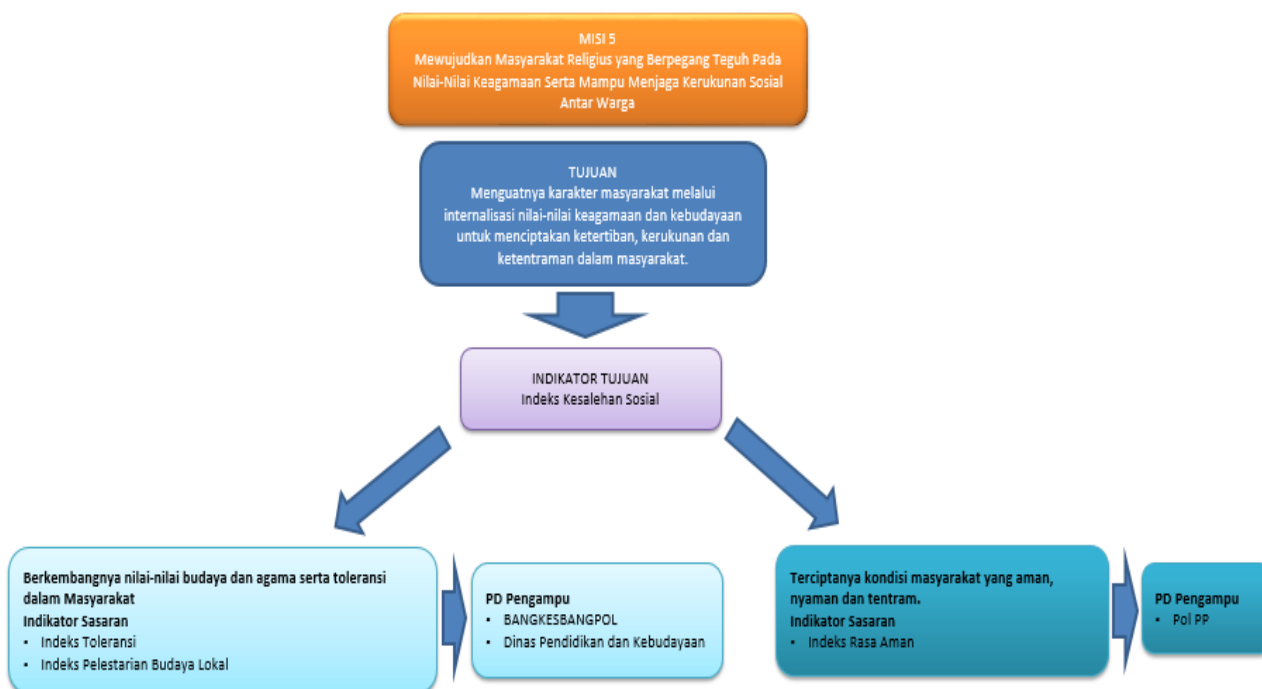
Cascading Kinerja Misi 3 :



Cascading Kinerja Misi 4 :



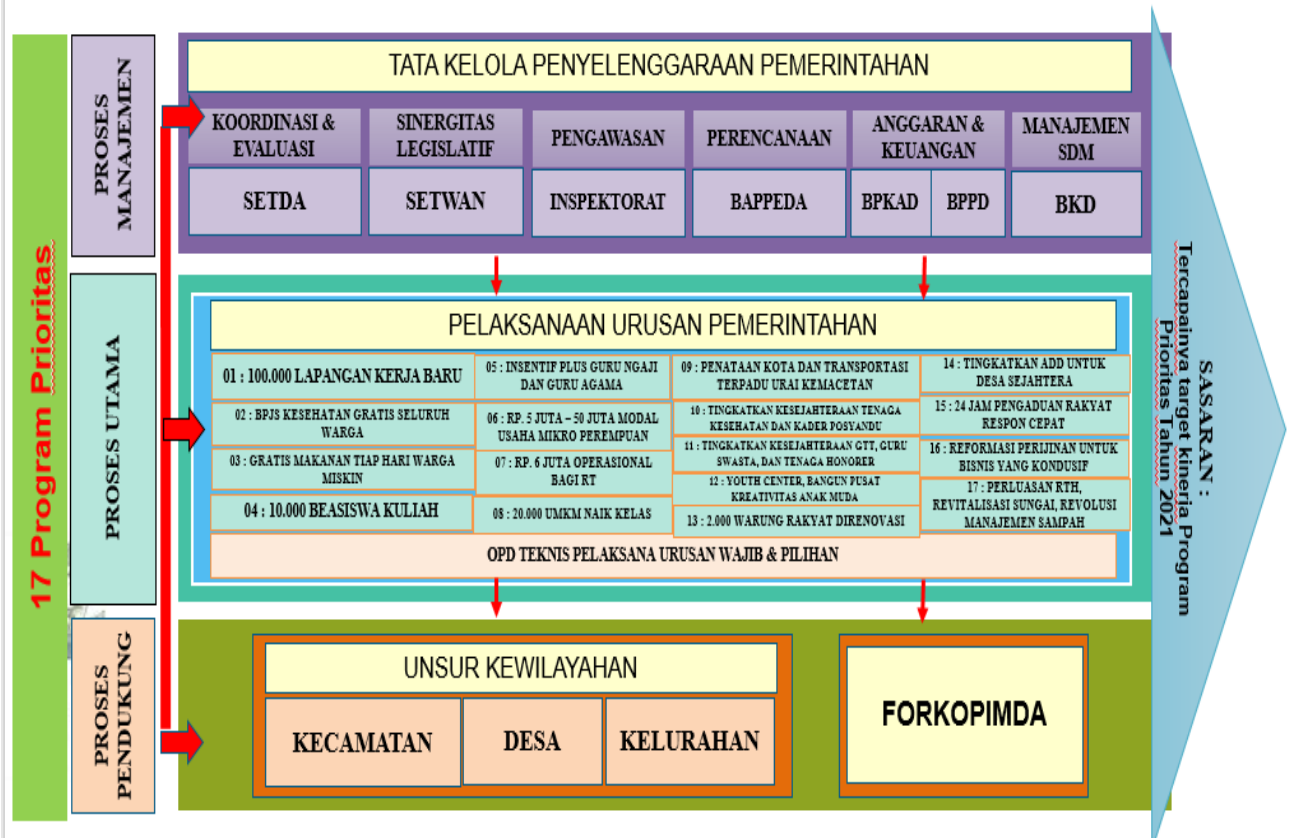
Cascading Kinerja Misi 5 :



4. PETA PROSES BISNIS

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dengan adanya peta proses bisnis maka akan mudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan memiliki standart pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut diagram alur dari peta proses bisnis Kabupaten Sidoarjo baik BPMN (Bisnis Proses Model dan Notasi) maupun diagram level / tingkatannya

Bisnis Proses Model dan Notasi :



5. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Sidoarjo di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan		

Publik dan Kemudahan Berusaha			
	Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	B
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	Nilai SAKIP Kabupaten	A
		Opini Atas Laporan BPK	WTP
		Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,73
		Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,25
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A- Sangat Baik
	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan		
	Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	1,00
		Indeks Gini	0,365
3	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,09
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	51,73
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,55

		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,85
4	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,87
		Persentase Koperasi Berkualitas	21,84
		Persentase Desa Mandiri	10,25
	Tujuan 3 : Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	10,54
		Persentase Penduduk Miskin	5,71
5	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	89,17
6	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	93,78
	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan		
	Tujuan 4: Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	0,755
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,79
7	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,748
		Indeks Infrastruktur Pendidikan	82,53
		Indeks Infrastruktur Kesehatan	71,13
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Air	51,52
		Indeks Kualitas Udara	85,14
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,10
		Indeks Resiko Bencana	99,12
	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya		

	Tujuan 5 : Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,41
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,01
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,33
10	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,69
11	Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,32
	Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.		
	Tujuan 6 : Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	82,01
12	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi	77,64
		Indeks Pelestarian Budaya	60,32
13	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Rasa Aman	76,48



BAB III



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Sidoarjo
Pesona Delta

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Sesuai Inpres no 7 tahun 1999 **Akuntabilitas kinerja** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak- pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

A. CAPAIAN DAN PENGUKURAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku pengemban amanah masyarakat Sidoarjo melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dibuat

sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:



Tabel III.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75 %	Kurang

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021, namun demikian karena pada tahun 2021 merupakan masa transisi/pergantian pemegang kekuasaan dari Bupati sebelumnya kepada Bupati terpilih untuk periode Tahun 2021 – 2026, sehingga pelaksanaan tugas tahun 2021 tetap memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021. Ukuran keberhasilan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah utamanya mengacu pada RPJMD periode Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Infografis Pemetaan Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital.	Nilai SAKIP
					Opini atas LHP BPK
					Survey Eksternal
					Persepsi Anti Korupsi
					Status Kinerja LPPD
					Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
					Indeks Inovasi Daerah
2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	2. Pertumbuhan Ekonomi	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha	Tingkat Maturitas SPIP
					Indeks Pelayanan Publik (IPP)
2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	3. Indeks Gini	Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Persentase PDRB
					Persentase PDRB Sektor Industri
					Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas
					Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi
2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	4. Tingkat Pengangguran Terbuka	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.	Persentase Usaha
					Persentase Koperasi Berkualitas
					Persentase Desa Mandiri
2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	5. Persentase Penduduk Miskin	Terserapnya tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di 9 (sembilan) Sektor
2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan;	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	5. Persentase Penduduk Miskin	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)

3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan;	Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.	6. Indeks Infrastruktur	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Infrastruktur
					Indeks Infrastruktur Pendidikan
					Indeks Infrastruktur Kesehatan
			7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Kualitas Air
					Indeks Kualitas Udara
					Indeks Tutupan Lahan
					Indeks Resiko Bencana (IRB)
4	Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar	Terwujudnya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya	8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah
				Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah
				Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat	Usia Harapan Hidup (U)
5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Menguatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam	9. Indeks Kesalehan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi
				Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.	Indeks Pelestarian Budaya Lokal
					Indeks Rasa Aman

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PER MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

MISI 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Dalam mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 indikator tujuan, 2 sasaran dan 8 indikator sasaran.

TUJUAN 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha

Tujuan 1 dengan Indikator sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan dan mengelola setiap 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada road map atau peta jalan reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo perlu dilakukan upaya-upaya strategis manajemen perubahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif oleh seluruh pimpinan unit kerja dan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat, khususnya perangkat daerah yang langsung memberikan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian(%)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;	Indeks Reformasi Birokrasi	B (66)	Belum Rilis	

Tabel III.4
Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Realisasi Nasional

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Ket.
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	NA	Belum Rilis

Sumber data :Kementerian PANRB

Tabel III.5
Perbandingan/Trend Realisasi Kinerja Tujuan 1

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun			
		2021	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;	Indeks Reformasi Birokrasi	B	65,58 (B)	65,77 (B)	65,62 (B)	*)

Sumber data :Kementerian PANRB

Tabel: III.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 dengan Realisasi Nasional

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Ket.
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum Rilis	Belum Rilis	*)

Sumber data :Kementerian PANRB

Tabel III.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi	Ket.
			tahun 2021	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha;	Indeks Reformasi Birokrasi	B	*)	*)

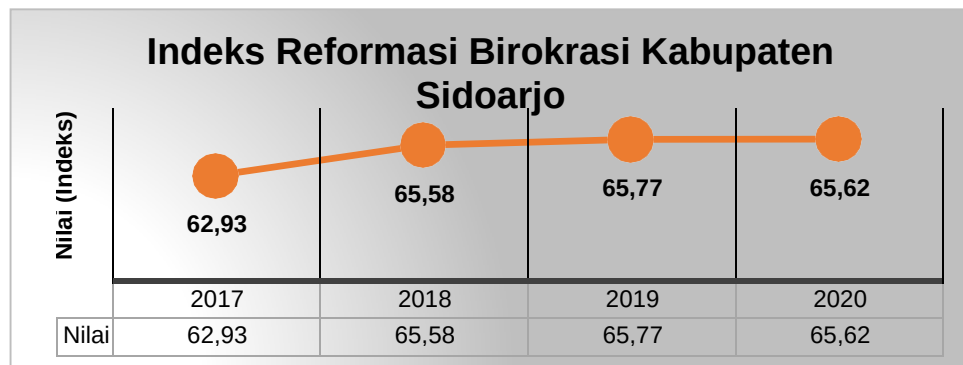
Sumber data :Kementerian PANRB

Sebagaimana tabel diatas, target indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai B, namun demikian realisasi capaian kinerja tahun 2021 belum bisa dilaporkan karena sampai laporan ini disusun belum ada release dari Kementerian PAN RB. Sedangkan pada tahun sebelumnya, nilai indeks reformasi birokrasi tahun 2020 adalah 65,62 atau katagori "B", demikian halnya pada tahun 2019 nilainya sudah berkatagori "B" yaitu dengan nilai 65,77. artinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai tersebut telah mengalami peningkatan 0,29%..

Berikut perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.1

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo



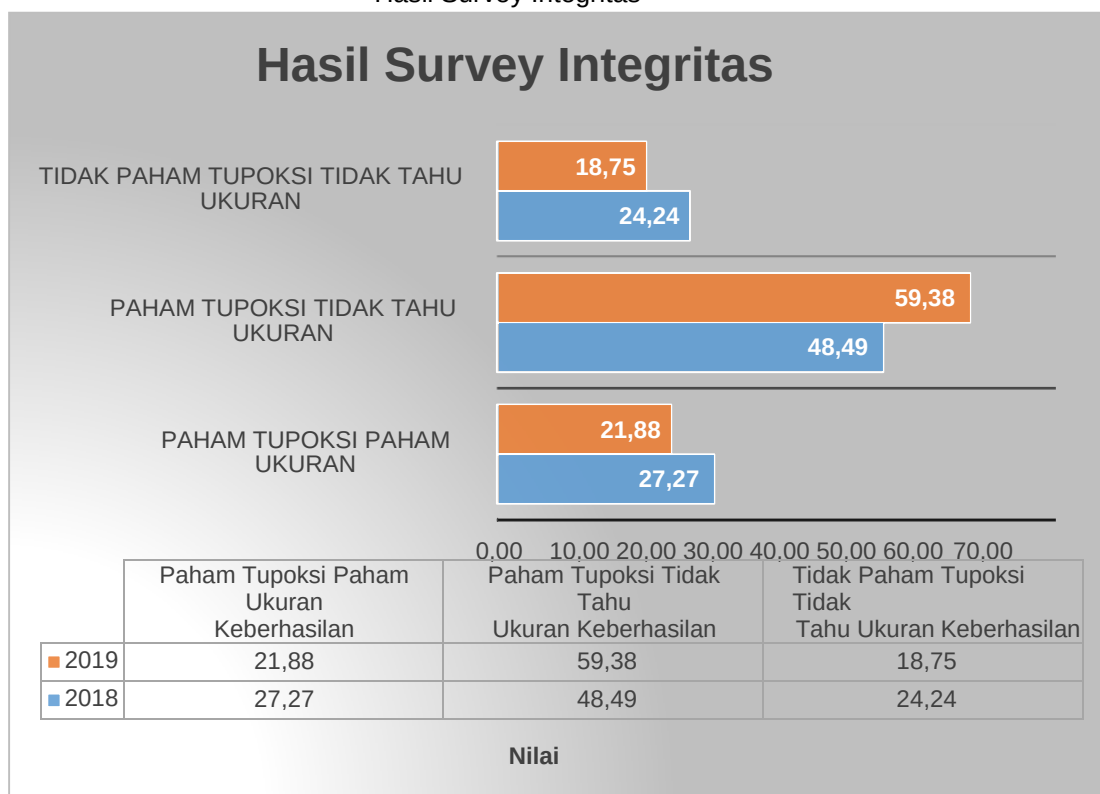
Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Berdasarkan hasil survey persepsi pelayanan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan indeks 3,81 dalam skala 4. Hasil Survei tahun 2019 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2018 yang sebesar 3,31. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas pelayanan secara bertahap memberikan dampak positif. Kesenjangan harapan pengguna layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima, berangsur-angsur mengecil.

Hasil survey persepsi anti korupsi menunjukkan indeks 3,95 dalam skala 4. Hasil Survei tahun 2020 menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2019 yang. Upaya pembangunan integritas telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan hasilnya mulai dirasakan penerima layanan. Upaya peningkatan ini tetap dilaksanakan secara konsisten dan transparan.

Sedangkan untuk hasil survei internal terhadap 1095 orang responden ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas integritas jabatan menunjukkan 21,88% tidak memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan kinerjanya. Sebanyak 59,38% telah memahami tugas fungsi namun tidak tahu ukuran keberhasilan kinerjanya, serta 18,75% yang telah memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Secara keseluruhan, hasil survei ini mengalami kenaikan positif dari tahun 2018, yang dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini.

Grafik III.2
Hasil Survey Integritas



Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi KEMENPAN & RB 2021

Sedangkan untuk survei integritas organisasi menunjukkan indeks 3.44 dalam skala 0 – 4. Hasil Survei tahun 2020 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan hasil survei tahun 2019 yang sebesar 3,37 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1.8
Hasil Survey Indeks Integritas Organisasi

No.	Komponen	Indeks
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3.27
2	Integritas terkait pengelolaan SDM	3.55
3	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3.53
4	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3.41
Indeks Integritas Organisasi		3.44

SASARAN 1: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan digunakan indikator kinerja :

- 1) Nilai SAKIP Kabupaten
- 2) Opini atas audit BPK
- 3) Survey Eksternal Persepsi Korupsi
- 4) Status Kinerja EKPPD/LPPD
- 5) Nilai Indeks SPBE
- 6) Indeks Inovasi Daerah
- 7) Tingkat Maturitas SPIP

yang dapat digambarkan/dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.9 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital	1	Nilai SAKIP Kabupaten	A	*)	-
	2	Opini atas LHP BPK	WTP	WTP	100%
	3	Survey Eksternal Persepsi Anti Korupsi	3,73	*)	-
	4	Status Kinerja LPPD	ST (Sangat Tinggi)	*)	-
	5	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,25	2,37	-
	6	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%
	7	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (Terdifinisi)	Level 3 (Terdifinisi)	100%

Sumber data :Bappeda

*) Belum ada Rilis Data/Hasil dari Instansi terkait

Tabel: III.10						
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun			
		2021	2018	2019	2020	2021
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital	Nilai SAKIP Kabupaten	A	A	BB	BB	*)
	Opini atas LHP BPK	WTP	WTP	100%	-	WTP
	Survey Eksternal Persepsi Anti Korupsi	3,37	-	3,95	3,71	*)
	Status Kinerja LPPD	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	*)	*)	ST (Sangat Tinggi)
	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,25	2,37	3,13	3,13	3,25
	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	-	Sangat Inovatif	Inofatif
	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (Terdifinisi)	Level 3 (Terdifinisi)	Level 3 (Terdifinisi)	Level 3 (Terdifinisi)	Level 3 (Terdifinisi)

Sumber data :Bappeda

Tabel III.11					
Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 dibandingkan dengan Capaian Nasional					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Kab Sidoarjo	Nasional/ Provinsi	% Capaian
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital	1	Nilai SAKIP Kabupaten	A		
	2	Opini atas LHP BPK	WTP	WTP	100%
	3	Survey Eksternal Persepsi Anti Korupsi	3,73		
	4	Status Kinerja LPPD	ST (Sangat Tinggi)		
	5	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,25	2,37	
	6	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif		
	7	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (Terdifinisi)		

Sumber data :Bappeda



Tabel III.12					
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1 s.d. Akhir Periode RPJMD					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2021	Ket.
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital	1	Nilai SAKIP Kabupaten	AA	A	
	2	Opini atas LHP BPK	WTP	WTP	
	3	Survey Eksternal Persepsi Anti Korupsi	3,95	3,73	
	4	Status Kinerja LPPD	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	
	5	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,25	3,25	
	6	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
	7	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (Terdifinisi)	Level 3 (Terdifinisi)	

Sumber data :Bappeda

Atas Capaian Kinerja Sasaran tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

2). Nilai SAKIP Kabupaten

- Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP.

Target Kinerja Sasaran dengan Indikator Nilai Sakip Kabupaten dengan realisasi capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel III.13
Tabel Trend RB Kabupaten Sidoarjo

Tahun dievaluasi	Indeks Reformasi Birokrasi	
	Target	Realisasi
Tahun 2018	BB	A
Tahun 2019	BB	BB
Tahun 2020	A	BB
Tahun 2021	A	*)

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

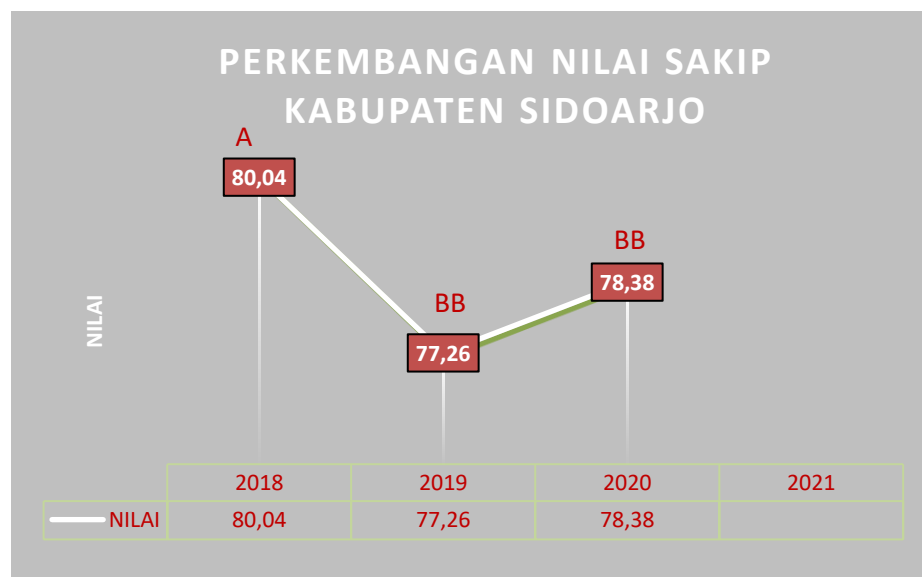


Reformasi Birokrasi tahun 2021, baru akan dilakukan penilaian pada pertengahan tahun 2022. Target Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 adalah A (Memuaskan), meskipun di tahun 2020 memperoleh BB (Sangat Baik), hal ini tidak menyurutkan motivasi dan semangat seluruh komponen pemerintahan untuk berkinerja secara akuntabel menuju nilai SAKIP A (Memuaskan) di tahun 2021.

- b. Perkembangan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, sebagaimana grafik sebagai berikut :

Grafik III.3

Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : LHE SAKIP Menpan RB

Nilai Sakip pada Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 belum diterima dari Menteri PAN RB, namun demikian diharapkan mendapatkan nilai A sesuai dengan target RPJMD

Beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di tahun 2020, sebagai berikut :

- Dalam penyusunan rancangan teknokratik tahunan yang dimulai dari RKPD dan KUA PPAS memperhatikan/berpijak pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan Jaring

Aspirasai Masyarakat baik melalui Musrenbang maupun Pokok Pikiran Anggota DPRD.

- Mereviu kembali penyusunan peta proses bisnis dengan mempertimbangkan langkah strategis pencapaian kinerja mulai level Kabupaten, OPD, hingga level individu dengan mengadakan asistensi yang didampingi evaluator nasional
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja, serta mereviu kembali aspek – aspek yang mempengaruhi tunjangan kinerja dengan mengacu pada kualitas manajemen kinerja OPD
- Menyusun Analisa Resiko dalam rangka pemetaan Risiko seluruh Program/Kegiatan PD bersamaan dengan penyusunan penyusunan Renja PD.
- Setiap Laporan Kinerja OPD, sebelum diupload pada aplikasi milik Kementerian PAN dan RB, terlebih dahulu direview oleh Tim APIP
- Pengembangan aplikasi e-monev yang tidak hanya mengevaluasi kinerja output, tetapi juga kinerja outcome
- Pelaksanaan Evaluasi SAKIP ke seluruh OPD apabila perlu dengan menghadirkan Tim evaluator Nasional sebagai pengarah

Selain itu, langkah strategis lainnya yang perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait adalah:

- Bappeda melalui Program yang telah dipilih dan ditetapkan melakukan optimalisa penerapan Perencanaan Daerah baik untuk jangka Menengah (RPJMD) dan Perencanaan Tahunan (RKPD) melalui mekanisme Renja secara tepat waktu dan terjadi sinkronisasi dengan KUA PPAS dan penganggarannya.
- Bagian Sekretariat Daerah yang mempunyai Kewajiban Penyusunan Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LKJIP) melakukan penyusunan secara tepat waktu, Format dan substansi telah sesuai dengan Kaidah Peraturan yang mendasarinya
- Inspektorat Kabupaten sebagai Instansi yang mempunyai kewajiban melakukan pembinaan/pendampingan optimalisasi nilai Sakip ke OPD

terkait, hendaknya melakukan pembinaan secara bertahap/periodik dan runtut kepada semua PD serta melakukan reuiu akhir atas Pelaporan kinerja yang telah disusun secara lebih cermat serta dapat memberikan saran secara konstruktif.

3. Opini Atas Audit BPK

- a. Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan melihat opini BPK atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Perkembangan Target Kinerja dan Realisasi Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.4
Tabel Trend Opini Atas Audit BPK Kab. Sidoarjo

Indikator Kinerja Sasaran	Opini Atas Audit BPK	
	Target	Realisasi
Tahun 2018	WTP	WTP
Tahun 2019	WTP	WTP
Tahun 2020	WTP	WTP
Tahun 2021	WTP	*)

Sumber : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur sedang melakukan proses audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, melakukan upaya yaitu:

- pemantapan terhadap penatausahaan keuangan dengan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas dibidang keuangan, penyempurnaan atas sistem aplikasi keuangan SIKSDA menjadi terintegrasi dengan RDS (*Regional Development Sistem*).
- penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo.

- penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :

- Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo), dalam rangka proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan pengurusan sertifikat tanah;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sewa barang milik daerah;
- Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja belanja sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat.
- Optimalisasi tatakelola barang persediaan atau barang pakai habis berbasis akrual.

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK. Terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan



juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan.

Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat terkelola dengan baik, transparan dan akuntabel, menghindari adanya tindak pidana korupsi sehingga opini WTP dari hasil audit BPK dapat dipertahankan

Upaya pencapaian target WTP tahun 2021 ini didukung oleh 2 (dua) program prioritas/program operasional dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program ini diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- 1) Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 48 PD telah tepat dalam menentukan kode rekening pada RKA PD.
- 2) Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 48 PD telah memenuhi ketepatan waktu dalam penyusunan penganggaran (RKA PD, RAPBD, APBD dan PAPBD).
- 3) Seluruh Perangkat Daerah telah tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan berbasis SAP (Akrual).
- 4) Diatas 95% Perangkat Daerah tepat waktu penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan, dan 90% Perangkat Daerah telah melakukan penyerapan anggaran diatas 90%.
- 5) Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 48 OPD telah memenuhi ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD).

2. Program Pengelolaan Barang.

Program ini diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- 1) Prosentase aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam laporan BMD berjumlah 31% dari target 30,94%.
- 2) Seluruh proses pemindahtanganan BMD telah dilaksanakan melalui

lelang umum.

- 3) Seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah 48 OPD telah tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD.

3. Program Penyelenggaran Pengawasan dan Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diampu oleh Inspektorat Daerah. Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- 1) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal 100% ditindaklanjuti Perangkat Daerah dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo 89% telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah.
- 2) Seluruh Perangkat Daerah (100%) Nilai SAKIP Minimal B, bahkan beberapa Perangkat Daerah dengan predikat A
- 3) Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo didapati predikat Terdefinisi. Hal ini juga didukung berbagai upaya 48 PD dalam meningkatkan kematangan SPIP di wilayah kerjanya
- 4) Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan jumlah Laporan yang Disusun dan telah diterbitkan sebanyak 49 Laporan.
- 5) Seluruh kasus/pengaduan yang datang baik dari individu maupun instansi telah ditindaklanjuti secara proporsional dan professional.

4) Survey Eksternal Persepsi Anti Korupsi

Persepsi anti Korupsi merupakan gambaran integritas ASN pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan rentang nilai maksimal 4.

Tujuan survei persepsi korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan Perangkat Daerah (PD) sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

Sasaran survey persepsi Korupsi:

- a) Terselenggaranya pelayanan PD yang bersih, akuntabel dan transparan.
- b) Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan PD

sesuai yang diharapkan pengguna layanan PD sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Sembilan (9) tindakan korupsi terdiri dari:

- 1) Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
- 2) Suap;
- 3) Illegal profit;
- 4) Secret transaction;
- 5) Hadiah;
- 6) Hibah;
- 7) Penggelapan;
- 8) Kolusi
- 9) Nepotisme

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan Hasil Survey Eksternal tentang Persepsi Korupsi 3,73 namun demikian sampai dengan bulan Maret 2022 rilis hasil dari Kementrian PAN dan RB belum didapatkan. Hasil survey persepsi Korupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sebesar 3,71 dari nilai maksimal 4, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,95. Kondisi ini walaupun tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 menunjukkan pembangunan integritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum mampu meningkatkan persepsi yang baik dari masyarakat pengguna layanan.



Tabel III.15
Tabel Trend Hasil Survey Eksternal tentang Persepsi Korupsi

Tahun	Hasil Survey Eksternal tentang Persepsi Korupsi		Keterangan
	Target	Realisasi	
2019	N/A	3,95	
2020	N/A	3,71	
2021	3,73	*)	

*) Rilis hasil sampai dengan Maret 2022 belum didapatkan

Mengingat optimalisasi layanan kepada masyarakat terus didengungkan/digalakkan dan dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan nilai survey persepsi korupsi tahun 2021 dan tahun selanjutnya dapat meningkat.

5) Nilai Kinerja EKPPD

- Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Target Kinerja Sasaran dengan Indikator Nilai Kinerja EKPPD Kabupaten Sidoarjo dengan realisasi capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel III.16
Tabel Trend Indikator Kinerja Sasaran

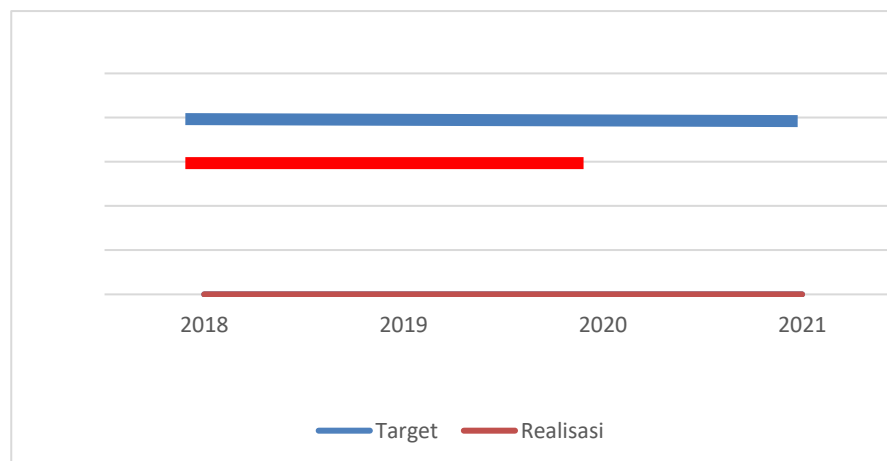
Indikator Kinerja Sasaran	Nilai Kinerja EKPPD	
	Target	Realisasi
Tahun 2018	ST	ST
Tahun 2019	ST	ST
Tahun 2020	ST	*)
Tahun 2021	ST	*)

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 belum dirilis oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

b. Tren Kinerja EKPPD

Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik:

Grafik III.4
Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo



Untuk menjaga tren positif atas Pencapaian Kinerja dari setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan beberapa program prioritas pendukung sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan serta Program Perekonomian dan Pembangunan Program ini diampu oleh Sekretariat Daerah. Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System) sebenarnya telah berjalan baik, namun dengan terbitnya Permengadri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permengadri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian didetailkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, seluruh Pemda wajib menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) milik Kemendagri. SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Kabupaten Sidoarjo telah 100% menerapkan SIPD dalam proses pembangunan daerah, namun demikian dalam implementasinya secara penuh

menunggu hasil penyempurnaan SIPD oleh Kementerian Dalam Negeri

- Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan target mencapai 90 % dari total. Nilai diupayakan akan dipertahankan dan pencapaian ini masih dapat ditingkatkan lagi melalui pendampingan dan pemahaman proses penganggaran dan perencanaan target kerja di masing- masing perangkat daerah.

2) Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Program ini diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- Usulan musrenbang kecamatan yang diakomodir menjadi RKPD dilakukan secara lebih optimal, sehingga perencanaan pembangunan benar-benar melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mendasarkan perencanaannya pada analisis kebutuhan atau urgensi. Dengan demikian hasil pembangunan diharapkan dapat secara langsung dirasakan masyarakat.
- Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah di masing masing perangkat daerah yang berjumlah 48, mengalami peningkatan, dan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan terus dilakukan serta dioptimalkan.

3) Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program ini diampu oleh Inspektorat Daerah. Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- Capaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti mencapai 100% untuk tahun 2021 ini.
- Capaian rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat yang ditindaklanjuti oleh OPD meningkat menjadi 88,76%.

Tingkat kepatuhan OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi menunjukkan bahwa pemahaman pelaksanaan administrasi keuangan berjalan baik dan menjadi budaya berkinerja secara lebih baik.

6) Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

a. Evaluasi SPBE

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE.

Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE. Tahun 2021 nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo terealisasi sebesar 2,37, nilai dibawah target sebesar 2,7 .

Tabel III.17
Tabel Indikator Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TAHUN 2021		
	2020	TARGET	REALISASI	%
Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo	3,13	2,7	2,37	88

Data Kemenpan RB tahun 2021

Dari tabel tersebut diatas Nampak bahwa pada tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 2,37 kategori Cukup atau 88 % dari target 2,7 dan apabila dibandingkan dengan capain tahun 2020 sebesar 3,13 terjadi penurunan nilai sebesar 0,76.

Namun demikian berdasarkan Penilaian Mandiri Indeks SPBE:

3,22 dengan Predikat Baik dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 dengan nilai 3.13 terjadi peningkatan.

Tidak tercapainya target tersebut karena Evaluasi SPBE pada tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan baru yang sebelumnya tidak ada (Pemen PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE).

Ketentuan baru tersebut antara lain:

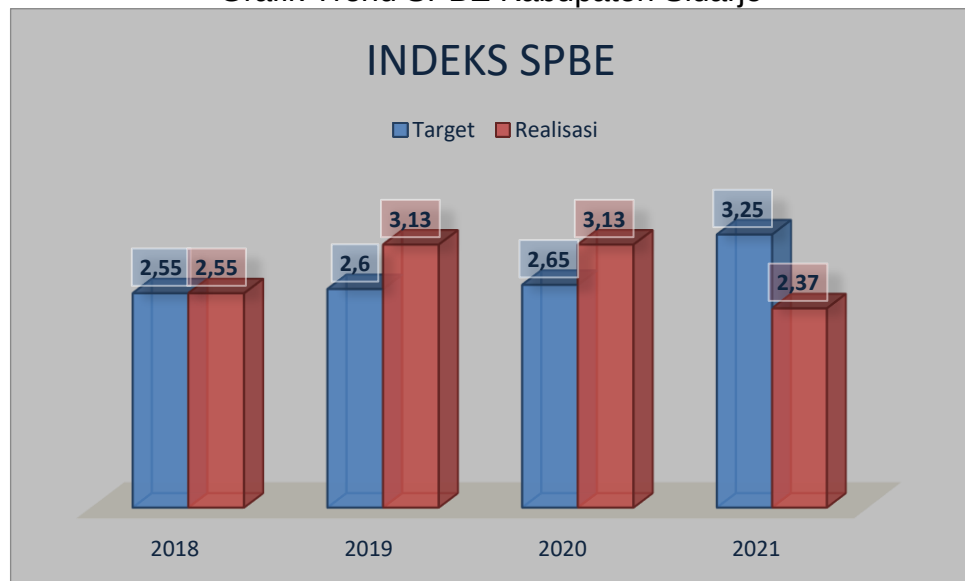
- a) Penambahan domain baru dimana sebelumnya terdapat 3 (tiga) domain menjadi 4 (empat) domain yaitu domain Manajemen SPBE.
- b) Penambahan dan pengurangan aspek dimana sebelumnya terdapat 7 (tujuh) aspek sekarang menjadi 8 (delapan) aspek dengan penambahan 2 (dua) aspek baru yaitu aspek Penerapan Manajemen dan Audit TIK serta pengurangan 1 (satu) aspek yaitu aspek Kebijakan Layanan SPBE.
- c) Penambahan jumlah indikator dimana sebelumnya terdapat 35 (tiga puluh lima) indikator sekarang menjadi 47 (empat puluh tujuh indikator). Adapun penambahan sejumlah indikator tersebut dikarenakan penambahan domain dan aspek.

b. Capaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2021 dan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel III.18
Tabel Indeks Trend SPBE tahun 2021

Tahun	Indikator Kinerja Sasaran:Indeks SPBE	
	Target	Realisasi
Tahun 2018	2,55	2,55
Tahun 2019	2,6	3,13
Tahun 2020	2,65	3,13
Tahun 2021	3,25	2,37

Grafik III.5
Grafik Trend SPBE Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Dari data tabel dan grafik tersebut diatas dapat terbaca bahwa Hasil Capaian Indeks Smart City (SPBE) pada tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019, hasilnya yaitu **3,13** dengan predikat **Baik**.

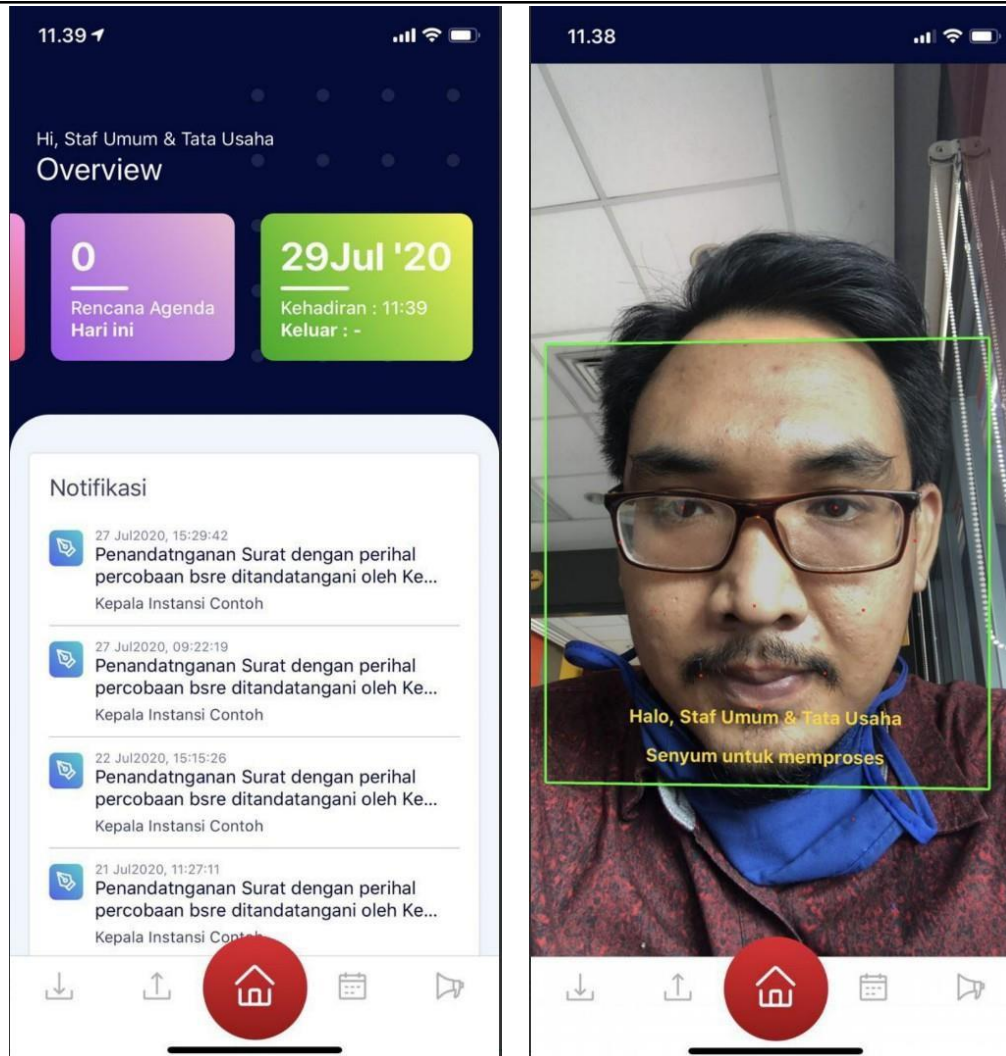
Hasil ini dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun demikian pada tahun 2021 terjadi penurunan karena ada tambahan parameter penialain yang belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta

Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

c. Perbandingan dengan tingkat capaian Nasional

Dengan Realisasi indeks SPBE Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar 2,82 (kategori baik), sedangkan Kabupaten Sidoarjo dengan realisasi 2,37 (kategori cukup) diartikan bahwa dalam penerapan SPBE di Kabupaten Sidoarjo perlu dioptimalkan dan penghitungannya mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan baru yang sebelumnya tidak ada (Pemen PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE). Dalam masa pandemi covid-19 di tahun 2020, Kabupaten Sidoarjo melaksanakan suatu terobosan baru terkait sistem aplikasi elektronik pendamping kerja pegawai. Sistem dimaksud disebut dengan E-buddy. E-buddy merupakan integrasi dari sistem aplikasi yaitu e-surat, e-disposisi, e-meeting, e-presensi dan e-kinerja. Sistem ebuddy dengan berbasis web dan android terbukti mampu menjaga produktifitas kinerja ASN dan Non ASN utamanya di era pandemi dan pemberlakuan sistem kerja Work From Home (WFH).



E-Buddy pada ponsel Android

Gambar diatas adalah salah satu penggunaa e-buddy untuk pengelolaan naskah dinas elektronik dan presensi pegawai. E-buddy telah menerapkan tanda tangan elektronik dengan bekerjasama Badan Siber dan Sandi Negara melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga validitas naskah dinas memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sama dengan surat manual.

Pengunaan ebuddy telah mencakup seluruh unit kerja pemerintah yang diataranya adalah 48 OPD, 29 Kelurahan, 26 Puskesmas, 322 Desa, 470 Sekolah Dasar Negeri dan 46 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Dengan demikian proses penyusunan konsep, pengesahan dan distribusi naskah dinas dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini juga dapat dilakukan tanpa terbatas tempat dan waktu bekerja. Efektifitas dan efisiensi cara

bekerja pegawai, menjadi nilai penting dari implementasi e-buddy di Kabupaten Sidoarjo. Dampaknya seluruh pekerjaan administrative dapat dilaksanakan tanpa perlu datang ke kantor atau WFH. Seluruh pejabat pimpinan instansi telah memiliki sertifikat elektronik untuk melakukan penandatanganan/pengesahan naskah dinas di e-buddy.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon : (031) 8921946, 8921960, 8921953 Faks : (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah
D a r i : Asisten Administrasi Umum
Tanggal : 10 Agustus 2020
Nomor : 065/5107/438.1.3.1/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sosialisasi Tata Naskah Dinas

Dalam rangka kegiatan **Sosialisasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**, bersama ini mohon berkenan Bapak Sekretaris Daerah untuk memberikan pengarahannya kebijakan tata naskah dinas dalam kegiatan dimaksud. Adapun kegiatan akan dilaksanakan secara online pada :

hari : Kamis
tanggal : 13 Agustus 2020
waktu : 12.00 – 14.00 WIB
tempat : zoom meeting.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Disandatangani secara elektronik oleh:

SRI WITARSIH, SH, MM
NIP. 196112011991032003
SRI WITARSIH, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 199103 2 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Contoh naskah dinas menggunakan Tanda Tangan Elektronik

7) Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi Daerah dapat berbentuk:

a. inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah.

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

b. inovasi Pelayanan Publik.

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik

c. Inovasi Daerah lainnya
Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Pemerintah Daerah

Target Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 ditetapkan sebagai **Sangat Inovatif**, dengan capaian Kinerja berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: 002 6-5846 Tahun 2021 adalah **Inovatif** dengan skore 48,55 untuk tingkat Kabupaten/Kota se Indonesia pada urutan ke 111, artinya Target tidak tercapai, sedangkan untuk Tingkat Provinsi Jawa Timur urutan ke tiga dengan skore 63,15

Untuk Tahun 2020 acuan Inovatif Daerah berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-4672 Tahun 2020 tetntang Indeks Inovasi Provinsi Kabupaten Kota, atas dasar Keputusan Mendagri tersebut Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dengan skore Indeks 5.043 predikat Sangat Inovatif dan Kabupaten Sidoarjo dengan score 3.983 predikat Sangat Inovatif.

Angka Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo masih jauh dibawah Provinsi Jawa Timur, sehingga masih perlu dioptimalkan inovasi dan Kreasi inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Layanan Publik dan Inovasi Lainnya.

Tabel: III.19
Capain Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Indikator	Target 2021	Realisasi	Capaian
Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Inovatif	Tidak Tercapai

Tabel: III.20
Capain Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2018	N/A	Sangat	Tercapai

		Inovatif	
2019	N/A	Sangat Inovatif	Tercapai
2020	N/A	Sangat Inovatif	Tercapai
2021	Sangat Inovatif	Inovatif	Tidak Tercapai

8) Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Kematangan (maturity level) SPIP menggambarkan tahapan proses yang lebih diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

- a. Target Kinerja Sasaran dengan Indikator **Tingkat Maturitas SPIP** Kabupaten Sidoarjo dengan realisasi capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut:

Sebagaimana dalam target RPJMN bahwa di tahun 2021 tingkat kematangan (maturity level) SPIP harus sudah menunjukkan level 3 (terdefinisi), berdasarkan laporan quality assurance (QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPKP bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 (terdefinisi) dengan skor 3,09, seperti yang telah ditargetkan tahun 2021 pada level 3 (terdefinisi) dengan realisasi level 3 (terdefinisi) sama dengan targetnya. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan dan sudah memenuhi target sebagaimana diamanatkan pada RPJMN.

b. Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Capaian Kinerja tahun 2020 dan tahun sebelumnya seluruhnya terealisasi

pada level 3 (terdefinisi).

Tabel III-21
Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo

No	Tahun	Maturitas SPIP : Level Kematangan	
		Target	Realisasi
1	2018	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)
2	2019	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)
3	2020	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)
4	2021	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Upaya untuk meningkatkan kematangan dalam pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan melalui program prioritas sebagai berikut :

(1) Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program ini diampu oleh Inspektorat Daerah. Capaian program ini pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

Tabel III.22

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	98%	100%	102,04%
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Yang Ditindaklanjuti	78%	88,76%	113,79%
Persentase Perangkat Daerah Yang Nilai SAKIP Minimal B	100%	100%	100%
Persentase Kasus/Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

(2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Tabel III.23

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	%
Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo Minimal Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	100%

(3) Program Pengembangan Sumber Daya Daerah

- Peningkatan profesionalitas pegawai, salah satu tujuannya akan menghasilkan ASN dengan kompetensi / *skill* yang sesuai kebutuhan dan bertindak sesuai prosedur tanpa melanggar/ mengenyampingkan peraturan yang berlaku (bertindak *on the track*).
- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai dilaksanakan melalui pengembangan karir dan evaluasi kinerja individu. Seluruh pegawai telah dilakukan evaluasi kinerja baik secara hirarki maupun model sampling oleh BKD kepada seluruh ASN.

SASARAN 2 : Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

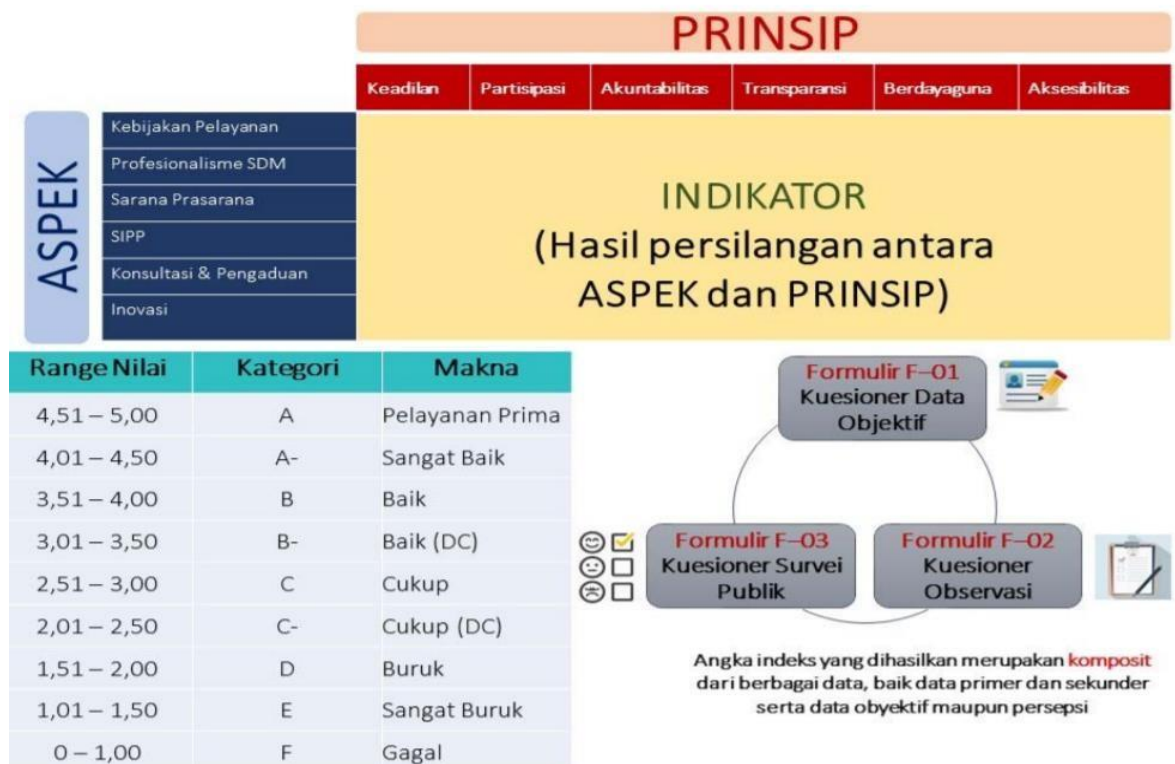
Indikator Kinerja Sasaran	Indeks Pelayanan Publik	
	Target	Realisasi
Tahun 2018	Baik	Baik
Tahun 2019	Baik	Baik
Tahun 2020	Baik	Baik
Tahun 2021	Baik	Baik

Tujuan dari dilaksanakannya Evaluasi Pelayanan Publik, adalah :

- Sebagai percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat

Metodologi evaluasi dan penilaian adalah sebagai berikut :

**Indikator dan Range Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
dengan menggunakan Indeks Pelayanan Publik**



Gambar Metodologi Evaluasi Penilaian Pelayanan Publik

Setiap tahunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diupayakan selalu meningkat, hal ini sesuai dengan kebijakan satu OPD satu Inovasi yang ditetapkan oleh Bapak Bupati Sidoarjo. Selain itu banyak pula inovasi di Kabupaten Sidoarjo yang pernah mendapatkan penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu SIPPADU Aplikasi Perijinan Terpadu (TOP 33), SIMANIES Aplikasi untuk mencegah kematian ibu melahirkan (TOP 99), dan SIPEKAT Aplikasi kenaikan pangkat paperless (TOP 99).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 111 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2020, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel III.25

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo

No	Unit Pelayanan Yang di Sampling	Nilai (Indeks)			Konversi untuk Tahun 2021
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4,55	4,57	Pelayanan Prima (A)
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3,98	4,03	Sangat Baik (A-)
		4,16	4,27	4,30	Sangat Baik (A-)

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Tahun 2021

Pembangunan Mal Pelayanan Publik, Pencanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan Kelompok Budaya Kerja (KBK) mendorong tercapainya kualitas pelayanan publik yang Sangat Baik. Diharapkan di tahun 2020- 2021 dan kedepannya akan semakin banyak unit pelayanan yang mendapatkan sampling dan memiliki inovasi yang efektif, sehingga nilai Indeks Pelayanan Publik juga semakin meningkat.

Apabila dibandingkan dengan Indeks Pelayanan Publik di Tahun 2020 dengan

nilai 4,27 maka terdapat peningkatan nilai sebesar 0,03. Hal ini membuktikan bahwa seluruh rekomendasi tahun 2019 dan tahun 2020 sudah ditindaklanjuti secara bertahap di tahun 2020 dan tahun 2021. Dan setiap tahunnya juga dilaksanakan evaluasi mandiri untuk penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah.

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan evaluasi mandiri pada 46 Perangkat Daerah dari 48 Perangkat Daerah yang ada dan secara rata rata hasilnya adalah 3,62 (Baik)

Pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya kepala daerah melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Berkaitan dengan hal itu, untuk mendorong tingkat daya saing dan optimalisasi otonomi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri mengukur tingkat inovasi di suatu daerah, melalui indeks inovasi daerah. Meningkatnya IPP menunjukkan komitmen Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat serius dilaksanakan. Secara berkelanjutan, seluruh perangkat daerah diintruksikan untuk memperbaiki kualitas layanan, melakukan penyederhanaan prosedur dan persyaratan serta memberikan jiwa hospitality yang ramah dan baik.

MISI 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Untuk mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 2 tujuan dengan 4 indikator tujuan, tujuan pertama didukung dengan 2 sasaran dan 4 indikator sasaran, tujuan kedua didukung dengan 2 sasaran dengan 2 indikator

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel III.26
Tingkat Keberhasilan Misi 2

No	Tujuan - Sasaran	Indikator	Tingkat keberhasilan
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	1 Pertumbuhan Ekonomi	
1.1	Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	2 Persentase PDRB Sektor Perdagangan	
		3 Persentase PDRB Sektor Industri	
		4 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas	
		5 Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	
		6 Indeks Gini	
1.2	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.	7 Persentase Usaha Mikro Mandiri	
		8 Persentase Koperasi Berkualitas	
		9 Persentase Desa Mandiri	-
2	Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	10 Tingkat Pengangguran Terbuka	
2.1	Terserapnya tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran	11 Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di 9 (sembilan) Sektor	
		12 Persentase Penduduk Miskin	
2.2	Menurunnya Penduduk Miskin	13 Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2021

Pandemi *Virus Corona Disease* (COVID-19) yang muncul pada bulan Maret tahun 2020 dan sampai dengan saat ini Maret 2022 memberikan dampak terhadap sektor perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. khususnya pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran karena menurunnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Sehubungan dengan hal tersebut target dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 memperhatikan dan atau penyesuaian terhadap Indikator RPJMD periode sebelumnya sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Berikut uraian hasil dan analisis pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan, dengan Indikator:

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah, Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK 2010 mengalami fase peningkatan, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan yang merupakan sektor utama penggerak perekonomian Kabupaten Sidoarjo,

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.27
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian(%)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	1	4,21	421%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2021 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 adalah 4,21% dari target yang diharapkan adalah 1%, realisasi tahun 2021 capaiannya mengalami peningkatan yang luar biasa yaitu sebesar 421% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel III.28
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 – 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN KINERJA(%)			
		2021	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	1	6,02	5,99	-3,68	4,21

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar -3.68% maka pertumbuhan ekonomi 2021 mengalami **peningkatan yang luar biasa** yaitu sebesar 7,89 %, masa pandemi covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai saat ini (Maret 2022) belum tuntas menjadi endemi covid, sehingga upaya keras dengan inovasi daerah diharapkan dapat memberikan dukungan

pada capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

Tabel III.29
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 dengan Pertumbuhan
Ekonomi secara Nasional

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (%)		Ket
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
<i>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.</i>	Pertumbuhan Ekonomi	4,21	3,69	114,09%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
Infografis Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia rilis 5
Feb 2021 dan Data BPS

Data pertumbuhan ekonomi secara nasional pada triwulan IV (bulan September) Tahun 2021 pada angka 3,69. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional dengan selisih 0,52 atau sebesar 114,09% dari capaian nasional, angka pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Sidoarjo cukup baik dan akan diupayakan untuk ditingkatkan sebagai bentuk upaya mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel III.30
Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 dengan
Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021 - 2026

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	RPJMD 2021-2026 (Target 2026)	Realisasi 2021 (%)	% Capaian
<i>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.</i>	Pertumbuhan Ekonomi	5,53	4,21	76,13%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021 dan Data BPS

Dengan target pertumbuhan ekonomi pada masa akhir RPJMD tahun 2026

sebesar 5,53%, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 baru pada angka 76,13% atas target akhir RPJMD tersebut, dengan optimalisasi pada aktivitas industri, perdagangan dan sektor pertanian dalam arti luas target masa akhir RPJMD tersebut dapat tercapai bahkan mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

2) Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan/disparitas pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dan apabila tinggi pada arah angka 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan. Tinggi jika koefisien gini bernilai 0.50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0.36-0.49 dan rendah jika kurang dari 0.36.

Realisasi dan perbandingan Indeks GINI Kabupaten Sidoarjo pada Tahun terhadap target tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.31
Indeks GINI Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<i>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.</i>	Indeks GINI	0,365	0,347	105,19

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

**) Data belum dirilis

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam kisaran rendah ($>0,36$), dimana telah dilakukan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk Sidoarjo wilayah barat dan wilayah timur, salah satunya adalah infrastruktur kesehatan yaitu Rumah Sakit di wilayah barat. Selain itu juga pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan penghubung, sehingga usaha ekonomi masyarakat di semua wilayah di Kabupaten Sidoarjo dapat terhubung dengan baik, demikian pula penyebaran sentra perdagangan terus dilakukan dalam rangka mengurangi angka kesenjangan/disparitas.

Tabel III.32
Realisasi Indeks GINI Tahun 2016-2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun			
		2021	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Indeks GINI	0,365	0,35	0,31	0.34	0,347

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

**) Data belum dirilis

Untuk capaian tahun 2021 berdasarkan angka sementara mencapai kisaran 0,347 sehingga apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 0,34 maka capaian di tahun 2021 stagnasi, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan infrastruktur di daerah tertinggal dan terluar dan pemerataan aktivitas ekonomi perindustrian dan perdagangan serta sektor lainnya sebagai upaya pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan.

Tabel III.33

Perbandingan Indeks GINI Tahun 2021 dibandingkan dengan tingkat Nasional

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Ket.
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
<i>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan</i>	Indeks GINI	0,347	0.3811	Nasional Angka Capaian September 2021

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

**) Data belum dirilis

¹ BPS, 2020, *Berita Resmi Statistik-Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2020*, No.57/07/Th.XXIII 15 Juli 2020, Jakarta, dilihat 24 Februari 2021, <https://ppukab.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/98/-nasional--gini-ratio-maret-2020-tercatat-sebesar-0-381.html>.

Indeks GINI Nasional bulan September 2021 adalah sebesar 0.381 termasuk kategori sedang ($>0,36$). Jika dibandingkan dengan Capaian Kinerja Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo maka capaian tahun 2021 terbilang masih dalam proporsi yang lebih baik.

Tabel III.34

Perbandingan Realisasi Indeks GINI Tahun 2021 dengan Target 2021 - 2026 (Masa akhir RPJMD)

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	RPJMD 2021-2026 (Target 2026)	Realisasi 2021 (%)	% Capaian
<i>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.</i>	Indeks Gini	0,340	0,347	97,98%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

**) Data belum dirilis

Realisasi Kinerja Indeks Gini Tahun 2021 sudah pada angka 0,347, sedangkan target masa akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,34 artinya sudah hampir tercapai dan diharapkan Undeks Gini akhir RPJMD Tahun 2026 dapat tercapai,

bahkan diharapkan jauh lebih kecil dari angka target yang telah ditetapkan.

TUJUAN 2:

Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan, dengan indikator:

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Adapun program prioritas pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mendukung pelaksanaannya meliputi :

1) Dinas Tenaga Kerja

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja

2) Instansi Tekait Lainnya

- Program – program pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa dan Instansi Lainnya

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.35
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Real 2021	Capaian (%)
		Persentase (%)		
Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,54	10,87	96,97

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

adalah 10,87 sedikit lebih tinggi dari target RPJMD yaitu 10,54%, dengan demikian capaian TPT adalah sebesar 96,97%.Tingginya persentase pengangguran terutama didominasi oleh sektor industri sebagai dampak efisiensi di masa pandemi, turunnya pergerakan industri dan perdagangan, namun demikian diharapkan mulai tahun depan secara perlahan tapi pasti tingkat pengangguran akan berkurang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.

Tabel III.36
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun			
		2021	2018	2019	2020	2021
Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,54	4,73	4,72	10,97	10.87

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan Proyeksi Pasca Covid-19 sesuai Dokumen RKPD Perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, presentase TPT tahun ini (tahun 2021) masih cukup tinggi, namun demikian sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2020. Mengingat tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 dan 2019 (sebelum masa Pandemi covid 19) dapat dicapai pada angka dibawah 5%, oleh karena itu berbagai program kegiatan dalam rangka menekan angka pengangguran terbuka di tahun 2021 ini telah dan akan terus dilakukan dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga keluaran hasil pelatihan tersertifikasi dan mampu bersaing pada dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.
3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka perselisihan hubungan industrial yang berdampak pada PHK.

Tabel III.37
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (%)		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,97	6,49	169%

² BPS, 2020, *Berita Resmi Statistik-Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021*,

Data Tingkat Pengangguran Nasional (TPT) pada bulan September 2021 berada pada presentase 6,49. Dibandingkan dengan TPT Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 mencapai 10,97%, maka berada pada posisinya jauh **dibawah** TPT Nasional artinya TPT Kabupaten Sidoarjo lebih tinggi dari tingkat Nasional dengan capaian sebesar 169%.

Tabel III.38
Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2021 dengan Target RPJMD Tahun 2021 -2026

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Masa Akhir RPJMD 2021-2026 (AKHIR 2026)	Realisasi 2021	Ket.
		Persentase (%)		
Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,14%	10,97%	83,32%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020
tpt--sebesar-7-07-persen.html

Untuk mencapai target TPT di tahun 2026 sebagai akhir masa RPJMD Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan beberapa program prioritas dan upaya inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

2) Persentase Penduduk Miskin

Konsep yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan

didasarkan pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo di dukung oleh program prioritas yang terdapat pada Dinas Sosial meliputi:

- Program Pemberdayaan Sosial.
- Program Rehabilitasi Sosial.
- Program Penanganan Bencana
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III.39
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase (%)		
Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,71	5,93	96,29%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

*) Perubahan proyeksi pasca COVID-19 sesuai dokumen RKPD perubahan 2020 - BAPPEDA Kab.

Sidoarjo 2020

Realisasi tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo di tahun 2021 adalah sebesar 5,93% berada di bawah target RPJMD pada kisaran 5,71% dengan presentase capaian sebesar 96,29%. Dengan capaian penduduk miskin sebesar 5,93% maka jumlah penduduk miskin di Sidoarjo tahun 2021 mencapai sekitar 120.602 jiwa, dari total jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebanyak 2.033.764 jiwa

Tabel III.40
Tingkat Kemiskinan Tahun 2018-2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi (%)			
			2018	2019	2020	2021
Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,71	5,69	5,32	5,59	5,93

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

*) Perubahan proyeksi pasca COVID-19 sesuai dokumen RKPD perubahan 2020 - BAPPEDA Kab. Sidoarjo 2020

Persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend menurun, dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 karena pandemi covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai saat ini Maret 2022 masih belum selesai tuntas.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih berupaya keras pandemi covid 19 menjadi endemi covid 19.

Tabel III.41
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 dengan Tingkat Kemiskinan secara Nasional

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (%)		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	5,93	9,71	Persentase Penduduk Miskin Nasional per September 2021

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Data BPS September 2021

Pada September 2021 presentase penduduk miskin secara nasional berada pada 9,71%, jika dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo maka Kabupaten Sidoarjo berada pada posisi lebih baik dari pada presentase nasional. BPS menghimpun bahwa secara nasional presentase penduduk miskin di wilayah perkotaan mengalami kenaikan dibandingkan dengan

wilayah pedesaan.

Tabel III.42
Perbandingan Realisasi Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 dengan
Target Tahun 2022

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021-2026 (Akhir 2026)	Realisasi 2021	Ket.
		Persentase (%)		
Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskina	Persentase Penduduk Miskin	5	5,93	-

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

³ BPS, 2020, *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2020*, Katalog 3205022, p.9, Jakarta, dilihat 24 Februari 2021,
<https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/84ae76716e5c727c36884cae/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-tahun-2020.html>

Target tingkat kemiskinan tahun 2021 adalah sebesar 6% dengan realisasi tahun ini sebesar 5,93% maka Kabupaten Sidoarjo optimis realisasi tahun 2026 masa akhir RPJMD di bawah target yang ditetapkan yaitu 5%, bahkan diupayakan lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor potensial daerah, dan mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

Sasaran atas Tujuan 1:

Sasaran atas Tujuan 1 yaitu: Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel: III.43				
Sasaran : Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan, dengan indikator:				
	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	% Capaian
1)	Persentase PDRB Sektor Perdagangan	16,32	16,37	100,7
2)	Persentase PDRB Sektor Industri	51,73	53,97	100,46
3)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas	2,55	-0,08	-313%
4)	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,85	0,85	100

Tabel: III.44

Sasaran : Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.

Tren Capaian Kinerja 2018 - 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun			
		2021	2018	2019	2020	2021
Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Persentase PDRB Sektor Perdagangan	16,09		16,3	16,02	16,83
	Persentase PDRB Sektor Industri	51,73		46,62	51,17	53,97
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas	2,55			2,75	-0,08
	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,85			0,81	0,85

Sasaran : Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan, dengan indikator:				
	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Nasional 2021	Keterangan
1)	Persentase PDRB Sektor Perdagangan	16,31	16,11	100,31
2)	Persentase PDRB Sektor Industri	53,97	66,7	www.ekonomi.bosnis.com

3)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas	-0,08	2,59	www.pertanian.go.id
4)	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,85	N/A	

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 - 2026				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target RPJMD	Realisasi	% CAPAIAN
		2021-2026 (AKHIR 2026)	Tahun 2021	
Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Persentase PDRB Sektor Perdagangan	16,32	16,37	100,31
	Persentase PDRB Sektor Industri	54,21	53,97	98,87
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas	3,25	-0,08	-246%
	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	1,52	0,85	55,92

1) Persentase PDRB Sektor Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Agenda pembangunan Bidang Ekonomi sesuai dengan sasaran yang ada di RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah “Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan” dengan salah satu indikator adalah: Persentase PDRB Sektor Perdagangan, dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Kinerja Tahun 2021 sebesar 16,37%, apabila dibandingkan dengan target tujuan tahun 2021, maka target kinerja tujuan Persentase PDRB sektor Perdagangan **telah** tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

- b. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja tahun 2021 mengalami **peningkatan**, hal ini dikarenakan seluruh Kegiatan/Sub Kegiatan telah terlaksana dengan cukup baik. .
- c. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Nasional untuk sektor Perdagangan sebesar 16,11%, diartikan dengan capain 16,37% Kabupaten Sidoarjo cukup mampu mendukung Sektor Perdagangan di tingkat Provinsi dan Nasional.
- d. Apabila dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD yaitu tahun 2026 sebesar 16.75%, maka capain kinerja tahun 2021 sebesar 16,37%, dengan perbedaan persentase yang relative kecil dinamika perdagangan perlu ditingkatkan utamanya sektor UMKM dan peningkatan Eksport non Migas.

2) Persentase PDRB Sektor Industri

Untuk mendukung sasaran RPJMD tersebut ditetapkan tujuan Renstra yaitu "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui percepatan sektor industri dan perdagangan" dengan indikator: Persentase PDRB Sektor Perindustrian, atas capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2021, maka target kinerja Persentase Kontribusi PDRB sektor Perindustrian sebesar 51,73% telah tercapai dengan angka capaian sebesar 53,97%.
- b. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 51,17%, maka capaian kinerja tahun 2021 sebesar 53,97% mengalami peningkatan sebesar 2,80%
- c. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Nasional sektor Industri sebesar 53,97%, maka capaian tahun 2021 sebesar 51,97% cukup mampu mendukung tingkat pertumbuhan Industri baik di tingkat Provinsi maupun Nasional.
- d. Apabila dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD yaitu tahun 2026 sebesar 54.21%, maka capain kinerja tahun 2021 sebesar 53,97%, dengan perbedaan secara persentase yang



relative kecil, sehingga diyakini akan mampu tercapai pada masa akhir RPJMD.

3) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas

Sektor Pertanian/Peternakan, Perkebunan dan sektor Perikanan perlu dipertahankan, bahkan untuk sektor Perikanan masih mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui pengembangan budidaya ikan air tawar maupun budidaya tambak (air payau), atas capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Apabila dibandingkan dengan target tujuan tahun 2021, maka target kinerja tujuan Persentase Kontribusi PDRB sektor Pertanian dalam arti luas (Perternaian, Kehutanan dan Perikanan) dengan target 2,55 % dengan realisasi -0,08, diartikan belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
- b. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 2,75%, maka capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,86%, sehingga perlu optimisasi capaian kinerja pada tahun berikutnya.
- c. Apabila dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD yaitu tahun 2026 sebesar 3,25, capain kinerja tahun 2021 sebesar -0,08, maka dengan perbedaan gap yang cukup besar pada sektor tersebut, sehingga perlu kerja keras dari Dinas Pangan dan Pertanian serta Dinas Perikanan untuk meningkatkan produksi dan produktivitan pertanian dan perikanan.

4) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Pertumbuhan Investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas Industri dan Perdagangan dan sektor Tenaga Kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, atas capaian kinerja Pertumbuhan nilai Investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- d. Apabila dibandingkan dengan target tujuan tahun 2021, maka target kinerja Meningkatnya Nilai Investasi sebesar 0,85% telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
- e. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 0,81%, maka capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,04%
- f. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Nasional
- g. Apabila dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD yaitu tahun 2026 sebesar 1,52%, maka capain kinerja tahun 2021 sebesar 0,85%, terjadi perbedaan persentase yang relative kecil diharapkan mampu tercapai pada masa akhir RPJMD.

Sasaran 2 atas Tujuan 1 yaitu: Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa

Tabel III.45 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
				-	-
Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,87	1,87	100%
	2	Persentase Koperasi Berkualitas	21,84	21,84	100%
	3	Persentase Desa Mandiri	10,25	10,25	100%

Sumber data :Bappeda

**Tabel III.46
Tren Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 - 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja (%) Tahun:			
		2021	2018	2019	2020	2021
				-	-	
Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,87	-	-	1,83	1,87
	Persentase Koperasi Berkualitas	21,84	-	20,31	20,70	21,84

	Persentase Desa Mandiri	10,25	0	0,62 (2 desa)	0,62 (2 desa)	10,25
--	-------------------------------	-------	---	------------------	------------------	-------

Tabel III.47 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	2021		Keterangan
			Realisasi RPJMD	Realisasi Nasional	
Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,87	N/A	Secara Nasional tidak diperoleh data/angka
	2	Persentase Koperasi Berkualitas	21,84	N/A	Secara Nasional tidak diperoleh data/angka
	3	Persentase Desa Mandiri	10,25	4	Angka BPS

Tabel III.48 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Keterangan (% Capaian)
			2021-2026 (AKHIR 2026)	Tahun 2021	
Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1	Persentase Usaha Mikro Mandiri	2,15	1,87	86,97
	2	Persentase Koperasi Berkualitas	30,34	21,84	71,98
	3	Persentase Desa Mandiri	18,63	10,25	55,01

1) Persentase Usaha Mikro mandiri

- Tahun 2021 dari target 1,87% telah tercapai 100% atau sebesar 1,87%
- Dibandingkan tahun 2020 dengan capain 1,83% berarti terjadi kenaikan sebesar 0,04%, kenaikan relative kecil sehingga Perangkat Daerah Pengampu wajib mengoptimalkan kinerjanya, sehingga capaian pada angka yang lebih tinggi
- Capaian Kinerja Usaha Mikro Mandiri tahun 2021 sebesar

1,87% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 2,15%, pada dasarnya relative perbedaan tidak besar, sehingga seharusnya mampu dicapai akhir tahun 2026 sesuai target RPJMD bahkan diharapkan dengan angka yang lebih tinggi,

2) Persentase Koperasi Berkualitas

- a. tahun 2021 dari target 21,84% telah tercapai 100% atau sebesar 21,84%
- b. Dibandingkan tahun 2020 dengan capaian 20,70% berarti terjadi kenaikan sebesar 1,14%, kenaikan relative kecil sehingga Perangkat Daerah Pengampu wajib mengoptimalkan kinerjanya, sehingga capaian pada angka yang lebih tinggi
- c. Capaian Kinerja Koperasi Berkualitas tahun 2021 sebesar 21,84% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 30,34%, masih terjadi perbedaan angka yang cukup besar, sehingga Perangkat Daerah Pengampu wajib wajib memprioritaskan Koperasi berkualitas dalam waktu 4 tahun kedepan, sehingga target masa akhir RPJMD (tahun 2026) dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3) Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya terdapat pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik



Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Indek Komposit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan peningkatan Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

- a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
- b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa,

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :

- a. komponen Indeks Desa Membangun;
- b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
- c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Capain Kinerja:

- a. Capain Kinerja Persentase Desa Mandiri tahun 2021 sebesar 10,25% dari target yang sama yaitu 10,25% atau tercapai 100%, jumlah tersebut sama dengan 33 desa dari jumlah seluruh desa sebanyak 322 desa. Sedangkan untuk desa Maju tahun 2021 sudah sebanyak 157 desa atau 48,76% dari seluruh jumlah desa.
- b. Capain Kinerja Desa mandiri tahun 2021 menunjukkan kinerja yang baik, karena desa mandiri pada tahun 2020 dan tahun 2019 masih berjumlah 2 desa (0,62%) bahkan tahun 2018 desa mandiri masih nihil.
- c. Desa Mandiri di Kabupaten Sidoarjo sebesar 10,25% atau 33 desa dari jumlah desa sebanyak 322 desa, sedangkan untuk tingkat Nasional masih pada angka 4% yaitu sebanyak 3.269 desa dari seluruh jumlah desa secara nasional sebanyak 74.961 desa.
- d. Target masa akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 18,63% atau sebanyak 60 desa dari jumlah seluruh desa sebanyak 322 desa, sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus bekerja keras



dalam rangka meningkatkan status ke desa mandiri.

Program yang mendukung pelaksanaan Desa Maju di Kabupaten Sidoarjo yaitu :

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa.
- 2) Kecamatan
 - Program Pembinaan dan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Desa mandiri dan Desa Maju Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2021

**Tabel III.49
Status Desa**

No	Tahun	Status Desa					Total
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	2018	0	41	278	1	2	322
		0%	12,73%	86,34%	0,31%	0,62%	100%
2	2019	2	106	211	2	1	322
		0,62%	32,92%	65,53%	0,62%	0,31%	100%
3	2020	2	137	180	2	1	322
		0,62%	42,55%	55,90%	0,62%	0,31%	100%
4	2021	33	157	130	1	1	322
		10,25	48,76	40,37	0,31%	0,31%	100%

Sasaran 1 atas Tujuan 2: Terserapnya tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran

Terserapnya tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 diuraikan seperti pada tabel berikut:

Tabel III.50 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
				-	-
Terserapnya tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran	1	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di 9 (sembilan) Sektor	89,17	89,13	99,96

Sumber data :Bappeda dan Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo

Tabel III.51
Tren Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 - 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2021	2018	2019	2020	2021
				-	-	
Terserapnya tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di 9 (sembilan) Sektor	89,17	-	95,28	89,03	89,13

Sumber data :Bappeda dan Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo

Tabel III.52
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	2021		Keterangan
			Realisasi RPJMD	Realisasi Nasional	
Terserapnya tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran	1	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di 9 (sembilan) Sektor	89,13	N/A	Angka Nasional Tidak didapatkan

Sumber data :Bappeda dan Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo

Tabel III.53
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Keterangan (% Capaian)
			2021-2026 (AKHIR 2026)	Tahun 2021	
Terserapnya tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran	1	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di 9 (sembilan) Sektor	90,86	89,13	98,10

Sumber data :Bappeda dan Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo

Capain Kinerja:

Dari data tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Capain Kinerja Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di 9 (sembilan) Sektor) tahun 2021 sebesar 89,13% dari target yaitu

90,86% atau tercapai 98,10%, diartikan upaya yang cukup optimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam masa Pandemi Covid 19, target yang belum sepenuhnya dapat tercapai karena tingkat lulusa SLTA utamanya dari SMK banyak yang tidak langsung bisa bekerja, walaupun upaya yang cukup optimal telah dilakukan melalui Pelatihan/pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum/tidak bekerja terus dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja Kab Sidoarjo.

- b. Capaian Kinerja Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di 9 (sembilan) Sektor tahun 2021 sebesar 89,13% sedikit meningkat (0,10%) dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 89,03%, namun demikian jauh menurun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 95,28%.
- c. Target masa akhir RPJMD tahun 2026 terhadap Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di 9 (sembilan) Sektor sebesar 90,86%, apabila dibandingkan dengan capaian akhir tahun 2021 yaitu sebesar 89,13% atau sama dengan 98,10% dari target RPJMD 2026, selisih sebesar 1, 73% yang masih harus dipai selama 4 tahun kedepan bukan berarti akan mudah dapat tercapai, karena setiap upaya pemberdayaan/pelatihan/pendampingan kepada pencari kerja selalu akan dibarengi tingkat kelulusan SLTA utamanya SMK sebagai pencari kerja baru, sehingga Pemerintah Kab Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja tetap harus berupaya keras mencari peluang bekerja bagi masyarakat pencari kerja, dan diharapkan capaian meningkat diatas target RPJMD akhir tahun 2026.



Sasaran 2 atas Tujuan 2: Menurunnya Penduduk Miskin

Tabel III.54 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
				-	-
Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	93,78	94,07	100,31

Sumber data :Bappeda dan BPS

**Tabel III.55
Tren Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 - 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	CAPAIAN KINERJA (%)				Ket
		2021	2018	2019	2020	2021	
				-	-		
Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	93,78	94, 31	94,68	94,41	94,07	Tahun 2020 dan 2021 per Bulan Maret

Sumber data :Bappeda dan BPS

Tabel III.56 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	2021		Keterangan
			Realisasi RPJMD	Realisasi Nasional	
Menurunnya Penduduk Miskin	1	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	94,07	90,29	Nasional per Sept 2021

Sumber data :Bappeda dan BPS

Tabel III.57 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2021					
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi	Keterangan (% Capaian)
			2021-2026 (AKHIR 2026)	Tahun 2021	
Menurunnya Penduduk Miskin	1	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	95	94,07	99,02

Sumber data :Bappeda dan BPS

Capain Kinerja:

Dari data tabel tersebut diatas dapat dijeleaskan sebagai berikut:

- d. Capain Kinerja Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK) tahun 2021 sebesar 94,07% dari target yaitu 93,78% atau tercapai 100,31%, diartikan upaya yang cukup optimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang didukung sepenuhnya oleh Pememrintah Pusat dalam masa Pandemi Covid 19 untuk mengelola kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan berbagai bantuan baik sifatnya tunai melalui Bantuan Langsung Tunai, maupun melalui bantuan Sembako.
- e. Capain Kinerja Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK) tahun 2021 sebesar 94,07% sedikit menurun atau penduduk miskin sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020 dimana penduduk diatas garis kemiskinan tahun 2020 sebesar 94,41% (penduduk miskin meningkat sebesar 0,34%).
- f. Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebesar 94,07%, dibandingkan dengan tingkat nasional 90,29 (penduduk miskin 9,71%), artinya jumlah penduduk miskin di Sidoarjo secara rata rata jauh dibawah tingkat nasional.
- g. Target masa akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 95%, apabila dibandingkan dengan capain akhir tahun 2021 yaitu sebesar 94,07% atau sama dengan 99,02% atas target RPJMD 2026, sehingga capain tersebut diharapkan tercapai lebih cepat atau bahkan akhir tahun 2026, bahkan diharapkan capain meningkat diatas target RPJMD akhir tahun 2026.



MISI 3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan

Misi 3 dari RPJMD Tahun 2021 – 2026 ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Capaian kinerjanya diukur berdasarkan capaian 2 indikator tujuan dan didukung 2 sasaran dengan 5 indikator sasaran.

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel III.58
Tingkat Keberhasilan Misi 5

No	Tujuan - Sasaran - Indikator	Tingkat keberhasilan
Tujuan : Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan		
1.	Indeks Infrastruktur	TERCAPAI
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	TERCAPAI
Sasaran 1 : Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata		
1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	TERCAPAI
2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	TERCAPAI
3	Indeks Infrastruktur Kesehatan	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana		
1.	Indeks Kualitas Air	SANGAT TERCAPAI
2.	Indeks Kualitas Udara	TERCAPAI
3.	Indeks Tutupan Lahan	SANGAT TERCAPAI
4.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Pandemi *Virus Corona Disease* (COVID-19) yang masih berlangsung sampai dengan akhir tahun 2021 memberikan dampak terhadap sektor infrastruktur, khususnya pada perbaikan jalan, dan saluran irigasi dan drainase, sarana dasar permukiman dan perhubungan, maupun fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Adapun capaian indikator Tujuan dan Sasaran dari Misi 3 RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut::

Tujuan : Meningkatkan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan

1. INDEKS INFRASTRUKTUR

Infrastruktur adalah fasilitas yang dibutuhkan khalayak umum guna mendukung kegiatan dan kehidupan kesehariannya. Infrastruktur juga dapat disimpulkan sebagai segala fasilitas, termasuk dalam bentuk fisik dan non-fisik yang dibangun pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam ruang lingkungannya yang meliputi sektor dan aspek sosial-ekonomi.

Indeks Infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, saluran irigasi dan drainase, prasarana dasar permukiman, fasilitas pendidikan, kesehatan, perhubungan dan lain sebagainya. Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Perhitungan Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan mengagregasi dari capaian setiap komposit yang mendukungnya sesuai dengan bobot, masing – masing, yang sekaligus juga merupakan indikator sasaran yaitu:

- 25 % dari persentase kondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang)
- 15 % dari rata-rata persentase saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik
- 15 % dari persentase prasarana dasar permukiman
- 5 % dari persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik
- 20 % dari persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik
- 20 % dari persentase fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik

Adapun realisasi capaian Indeks Infrastruktur Sidoarjo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III.59
Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	0,755	0,763	101,06%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati 2021 (Perubahan) - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel di atas nampak bahwa meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 yang diukur berdasarkan capaian Indeks Infrastruktur terealisasi sebesar 0,763 atau 101,06% dari target yang diharapkan sebesar 0,755. Rincian capaian indeks Infrastruktur tersebut sebagaimana data dalam tabel berikut :

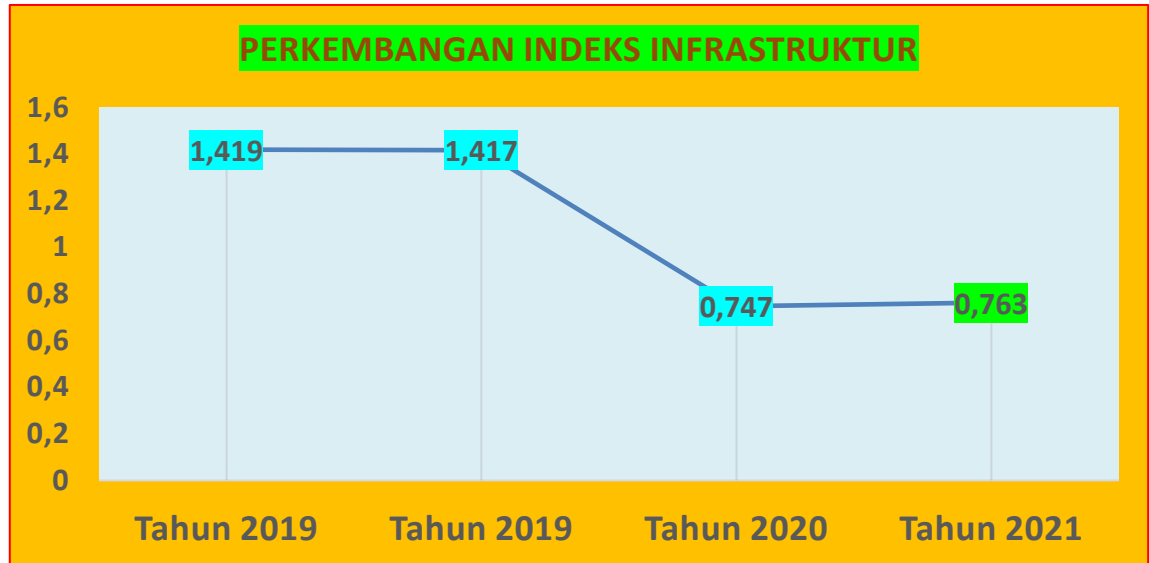
Tabel III.60
Rincian Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

No	Komposit	Bobot	Target		Capaian		%
			Persentase	Indeks	Persentase	Indeks	
1	Persentase jalan mantap	0,25	90	22,5	91,93	23,0	102,03
2	Persentase saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik	0,15	57	8,6	56,5	8,5	99,12
3	Persentase sarana dasar permukiman	0,15	71	10,7	72,64	10,9	102,31
4	Persentase sarpras perhubungan dalam kondisi baik	0,05	60,5	3,0	60,39	3,0	99,82
5	Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	0,20	82,53	16,5	92,80	18,6	112,64
6	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	0,20	71,13	14,2	61,97	12,4	87,12
	Jumlah			75,5		76,3	
	Indeks Infrastruktur	1,00		0,755		0,763	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati 2021 (Perubahan) - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Adapun perkembangan capaian Indeks Infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir nampak dalam grafik sebagai berikut :

Grafik III.6
Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari grafik tersebut terlihat bahwa capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dimana capaian untuk tahun 2021 sebesar 0,763 naik naik 0,016 poin atau 2,14 % dari realisasi tahun 2020 sebesar 0.747. Capaian tahun 2020 nampak menurun dari tahun - tahun sebelumnya karena terjadi perubahan perhitungan dimana perhitungan capaian Indeks Infrastruktur tahun 2018 dan 2019 hanya mencakup perhitungan infrastruktur jalan, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 perhitungan Indeks Infrastruktur sudah meliputi infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur perhubungan, infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Tabel III.61
Perbandingan Capaian Indeks Infrastruktur Tahun 2021 Dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021 (%)		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur	0,763	*)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dikarenakan data Indeks Infrastruktur Nasional belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Indeks Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Capaian tahun 2021 dibandingkan dengan target capaian indikator yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut :

Tabel III.62
Perbandingan Realisasi Indeks Infrastruktur Tahun 2021 Dengan Target Tahun 2026

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2026	Keterangan
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur	0,763	0,796	95,85 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Infrastruktur pada tahun 2021 masih dibawah target tahun 2026 yaitu baru mencapai 95,85%. Upaya untuk mencapai kondisi Indeks Infrastruktur yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026), akan dilakukan secara bertahap pada tahun – tahun berikutnya melalui penyelenggaraan program – program pembangunan infrastruktur.

2. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra

yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, dan kesehatan lingkungan. Dalam hal ini Pemerintah dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi atau prioritas akan terjadi. Kedudukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan sangat penting karena mempunyai potensi besar sebagai dasar kuat dalam rangka implementasi Instrumen Analisis Risiko Lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup.

Realisasi capaian IKLH Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.62
Capaian IKLH Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	%
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,79	59,81	100,03%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah atau area dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dikategorikan sebagai berikut :

- Indeks 90 – 100 = Sangat Baik
- Indeks 70 – 89,9 = Baik
- Indeks 50 – 69,9 = Sedang
- Indeks 25 – 49,9 = Buruk
- Indeks 0 – 24,9 = Sangat Buruk

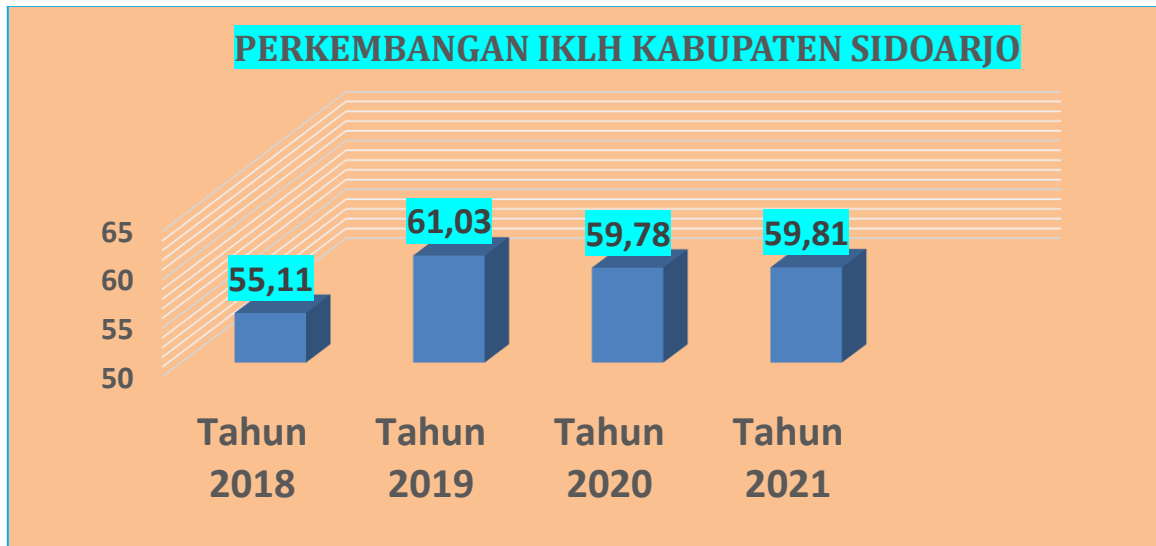
Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mencapai 59,81 termasuk kategori “Sedang” (indeks antara 50 s.d 69,9). Capaian tersebut juga telah melampaui 0,03% dari target IKLH yang ditetapkan dalam tahun 2021 sebesar 55,79.

Adapun perkembangan capaian Indeks Infrastruktur pada beberapa tahun

terakhir nampak dalam grafik sebagai berikut :

Grafik III.7

IKLH Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2021



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari data dalam grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa walaupun pada tahun 2020 sempat menurun dari tahun 2019, namun capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021 sebesar 59,81 meningkat sebesar 0.03 poin atau 100,05 % dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 yang mencapai sebesar 59,78.

Tabel III.63

Perbandingan Realisasi IKLH Tahun 2021 dengan Realisasi Nasional

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Ket.
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,81	*)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dikarenakan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional belum *release*

maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Kualitas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Capaian IKLH tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan (target capaian IKLH) pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut :

Tabel III.64
Perbandingan Realisasi Infrastruktur Tahun 2021 Dengan Target Tahun 2026

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2026	Keterangan
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,81	59,84	99,95%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai IKLH tahun 2021 sebesar 59,81 sudah mendekati target tahun 2026, yaitu mencapai 99,95 %. Agar kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) maka program pembangunan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun tahun mendatang.

SASARAN 1: Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata

Tingkat ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata diukur melalui capaian indikator berupa Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Indeks Infrastruktur Pendidikan, dan Indeks Infrastruktur Kesehatan.

1. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Indeks Infrastruktur merupakan agregasi dari kondisi jalan mantap, saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik, tersedianya sarana dasar permukiman, serta sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik. Capaian masing masing komposit tersebut dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan bagi masyarakat. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan Jalan Kabupaten serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle-neck* di Kabupaten Sidoarjo yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional. Salah satu upaya Pemerintah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal atas pembangunan fisik penunjang perekonomian adalah melakukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi jalan dalam kondisi mantap.

Adapun Jalan Mantap itu sendiri adalah jalan dengan kondisi konstruksi yang mana untuk penanganannya hanya membutuhkan kegiatan pemeliharaan. Jalan mantap konstruksi ditetapkan menurut Standar Pelayanan Minimal adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, dengan besar IRI < 6 m/km (*Parameter kerataan jalan atau International Roughness Index*). Sedangkan Jalan Tak Mantap Konstruksi adalah jalan dengan kondisi di luar koridor mantap yang mana untuk penanganan minimumnya adalah pemeliharaan berkala dan maksimum peningkatan jalan dengan tujuan untuk menambah nilai struktur konstruksi.

Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.65

Persentase Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Presentase Jalan Kondisi Mantap	90%	91,93%	102,14%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel tersebut nampak bahwa meningkatnya Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 terealisasi sebesar 91,93% atau 102,14% dari target yang diharapkan yaitu 90%.

Sampai dengan tahun 2021, panjang ruas jalan Kabupaten Sidoarjo adalah 1.016,620 km dengan kondisi jalan sebagai berikut :

Tabel III.66

Kondisi Jalan Kabupaten Sidoarjo Pada Akhir Tahun 2021

No	Kondisi	Panjang Jalan	%
1	Jalan Kondisi Mantap :		
	- Kondisi Baik	819,46 km	80,61
	- Kondisi Sedang	115,12 km	11,32
	Sub jumlah	934,58 km	91,93
2	Jalan Kondisi Tidak Mantap :		
	- Kondisi Rusak	63,45 km	6,24
	- Kondisi Rusak Berat	18,59 km	1,83
	Sub jumlah	82,04 km	8,07
	Total Panjang Jalan	1.016,52 km	100

Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi jalan mantap tersebut, pada tahun 2021 selain dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi, juga dilakukan peningkatan jalan dengan konstruksi beton pada 26 ruas jalan sepanjang

16.132,20 meter.

Disamping itu juga dilakukan kelanjutan pembangunan jalan dan jembatan *frontage road* ruas Waru – Buduran guna mendukung program prioritas Bupati dalam penataan kota dan transportasi untuk mengurangi kemacetan. Perkembangan pembangunan *frontage road* ruas Waru – Buduran sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

➤ **Pembebasan lahan**

Sampai dengan tahun 2021 telah dibebaskan lahan untuk pembangunan *frontage road* seluas 44.443 meter persegi atau sekitar 60,11% dari jumlah kebutuhan lahan seluas 73.930 meter persegi. Sisa lahan yang masih harus dilakukan pembebasan sebanyak 11 bidang, yang terdiri dari 9 bidang lahan milik warga Desa Gedangan dan 2 bidang yang merupakan lahan musholla akan diupayakan maksimal terselesaikan di tahun 2022, sehingga pembangunan *frontage road* dapat dilanjutkan. Kendala dalam pembangunan *frontage road* ruas Waru – Buduran, antara lain ;

- a) Warga merasa harga nilai appraisal belum sesuai harapan
- b) Karena adanya permasalahan waris
- c) Adanya lahan musholla yang harus dicarikan lahan pengganti terlebih dahulu.

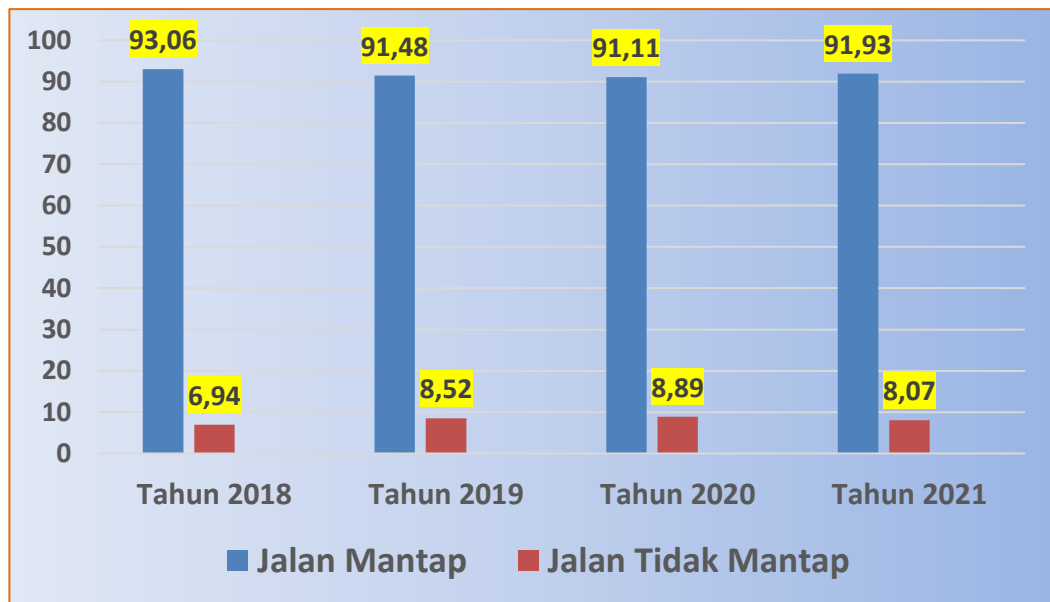
➤ **Pembangunan fisik jalan dan jembatan *frontage road*.**

Pada tahun 2021 telah selesai dilaksanakan pembangunan fisik jalan dan jembatan *frontage road* untuk Segmen-1 dengan realisasi pembangunan sepanjang 1.290 meter, sehingga total sampai dengan tahun 2021 telah terbangun 3.977 meter dari total yang harus dibangun sepanjang 9.450 meter atau 42,08%. sedangkan untuk Segmen-2 dan Segmen-3 akan dilanjutkan pengerjaannya pada tahun 2022.

Perkembangan persentase kondisi jalan kabupaten Sidoarjo pada beberapa tahun terakhir nampak dalam grafik sebagai berikut :

Grafik III. 8

Perkembangan Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Sidoarjo



Dari grafik tersebut di atas nampak bahwa perkembangan persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap di wilayah Sidoarjo sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun yaitu 93,06% (2018), 91,48% (2019), dan 91,11% (2020), namun untuk tahun 2021 capaian kondisi jalan mantap tersebut meningkat 0,82% dari capaian tahun 2020 menjadi 91,93%.

Tabel III.67

**Perbandingan Realisasi Persentase Jalan Kondisi Mantap Tahun 2021
Dengan Realisasi Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Presentase Jalan Kondisi Mantap	91,93%	*)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dikarenakan data Presentase Jalan Kondisi Mantap Nasional belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Jalan Kondisi Mantap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Capaian persentase kondisi jalan mantap tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut

Tabel III.68

Perbandingan Realisasi Jalan Kondisi Mantap Tahun 2021 Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi 2021 (%)	Ket.
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Presentase Jalan Kondisi Mantap	90,60%	91,93%	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Walaupun capaian persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2021 telah melampaui kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026), namun harus tetap dilakukan kegiatan – kegiatan untuk pemeliharaan, rehabilitasi, maupun peningkatan, termasuk pembangunan jalan baru melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan agar perkembangan capaian kondisi jalan mantap dapat semakin meningkat.

2) Saluran Irigasi dan Drainase Dalam Kondisi Baik

Capaian Persentase Saluran Irigasi dan Drainase Dalam Kondisi Baik pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.69

Persentase Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Presentase saluran irigasi dalam kondisi baik	87%	87%	100%
	Presentase drainase dalam kondisi baik	26%	26%	100%

<u>Rata - rata</u>		56,5%	56,5%	100%
--------------------	--	--------------	--------------	-------------

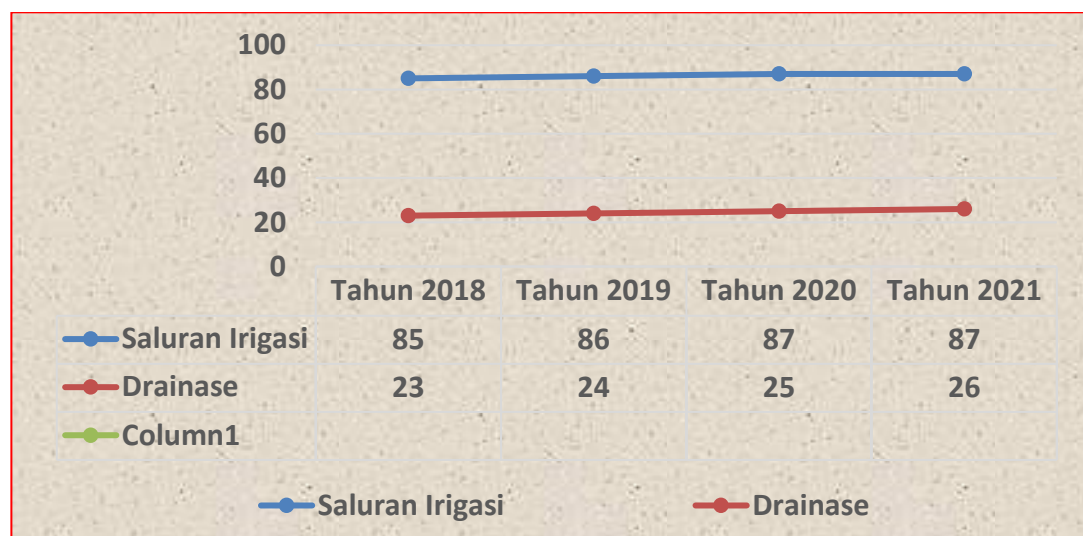
Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel tersebut nampak bahwa target persentase yang ditetapkan dalam tahun 2021 baik untuk Saluran Irigasi maupun Drainase dalam kondisi baik, telah tercapai 100 %. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Adapun perkembangan persentase saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Sidoarjo pada beberapa tahun terakhir nampak dalam grafik sebagai berikut :

Grafik III. 9

Perkembangan Persentase Saluran Irigasi Dan Drainase Dalam Kondisi Baik Kabupaten Sidoarjo



Dari grafik tersebut nampak bahwa capaian persentase saluran irigasi maupun saluran drainase dalam kondisi baik sejak tahun 2018 selalu meningkat, pada setiap tahunnya. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 25%, persentase saluran drainase dalam tahun 2021 meningkat menjadi 26%, sedangkan untuk saluran irigasi dalam kondisi baik capaiannya masih sama dengan capaian tahun 2020 yaitu 87%

Tabel III.70
Perbandingan Realisasi Jalan Kondisi Mantap Tahun 2021 dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Presentase saluran irigasi dalam kondisi baik	87%	*)	
	Presentase drainase dalam kondisi baik	26%	*)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dikarenakan data Presentase Saluran Irigasi dan Drainase Dalam Kondisi Baik secara nasional belum *release*, maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasinya dengan Realisasi Nasional.

Capaian persentase Saluan Irigasi dan Drainase Dalam Kondisi Baik tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut

Tabel III.71
Perbandingan Realisasi Persentase Saluran Irigasi Dan Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2021 Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi 2021 (%)	Ket.
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Presentase saluran irigasi dalam kondisi baik	92%	87%	
	Presentase drainase dalam kondisi baik	31%	26%	
Rata -rata		61,5%	56,5%	91,87%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi Rata – rata Persentase Saluran

Irigasi dan Drainase Dalam Kondisi Baik tahun 2021 masih di bawah kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (target tahun 2026) atau masih tercapai 91,87%. Upaya untuk mencapai target yang diharapkan pada akhir periode RPJMD tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam tahun 2022,2023,2024,2025, dan 2026 melalui pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS), Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, serta kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten.

3) Sarana Dasar Permukiman

Capaian Persentase Sarana Dasar Permukiman pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.72

Persentase Sarana Dasar Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Persentase Sarana Dasar Permukiman	71%	72,64%	102,31%

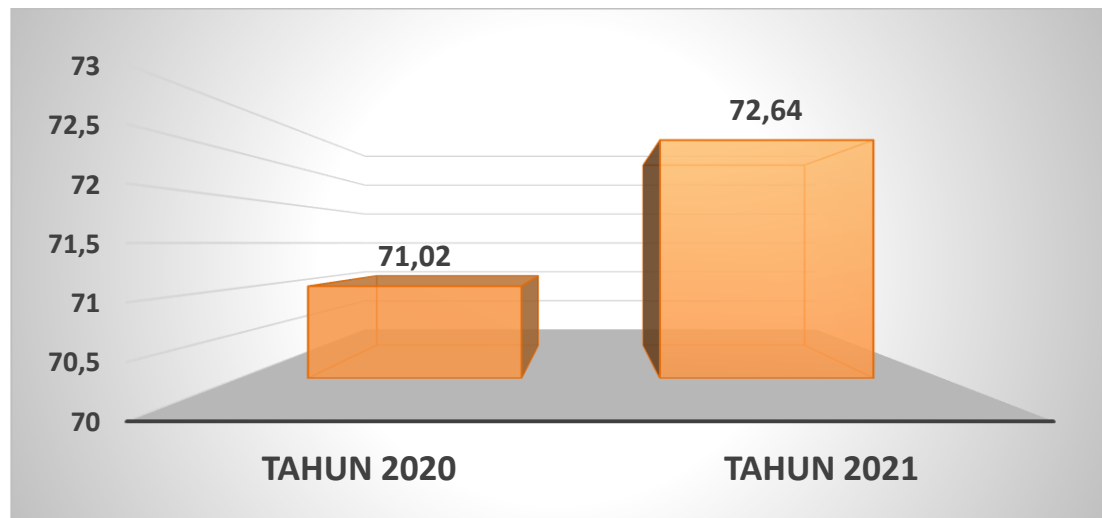
Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel tersebut nampak bahwa realisasi indikator Persentase Sarana Dasar Permukiman dalam tahun 2021 tercapai sebesar 72,64% atau 102,31% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan utamanya dari Program Pengembangan Permukiman dan Program Kawasan Permukiman

Capaian indikator Persentase Sarana Dasar Permukiman dalam tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo tersebut bila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sebagaimana nampak dalam grafik berikut ::

Grafik III.10

Perkembangan Persentase Sarana Dasar Permukiman Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari grafik tersebut nampak bahwa nilai Persentase Sarana Dasar Permukiman di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 72,64 atau mengalami kenaikan 2,28% dari Persentase Sarana Dasar Permukiman tahun 2020 yang tercapai sebesar 71,02.

Tabel III.73

Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Dasar Permukiman Tahun 2021 dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Presentase Sarana Dasar Permukiman	72,64%	*)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dikarenakan data Presentase Sarana Dasar Permukiman secara Nasional belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Capaian Persentase Sarana Dasar Permukiman tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut

Tabel III.74
Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Dasar Permukiman Tahun 2021 Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi 2021 (%)	Ket.
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Presentase Sarana Dasar Permukiman	75,16%	72,64%	96,65%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi Persentase Sarana Dasar Permukiman tahun 2021 masih di bawah kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (target tahun 2026) atau masih tercapai 96,65%. Upaya untuk mencapai target yang diharapkan pada akhir periode RPJMD tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam tahun - tahun berikutnya melalui pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten maupun kegiatan pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten

4) Sarana Prasarana Perhubungan

Capaian Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.75
Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Presentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	60,50%	60,39%	99,82%

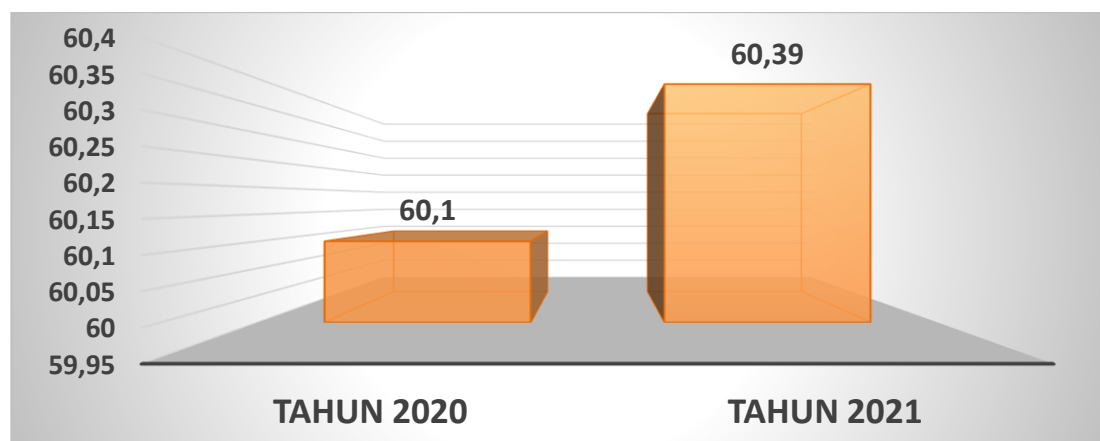
Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel tersebut nampak bahwa realisasi indikator Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik dalam tahun 2021 tercapai 99,82% dari target yang ditetapkan untuk tahun tersebut. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten maupun kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian indikator Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik dalam tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo tersebut bila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sebagaimana nampak dalam grafik berikut ::

Grafik III.11

Perkembangan Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari grafik tersebut nampak bahwa nilai Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 60,39, mengalami kenaikan 2,28% dari capaian tahun 2020 sebesar 71,02.

Tabel III.76
Perbandingan Realisasi Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik Tahun 2021 dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	72,64%	*)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dikarenakan data Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan realisasi untuk Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Capaian Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut :

Tabel III.77
Perbandingan Realisasi Persentase sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik Tahun 2021 Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi 2021 (%)	Ket.
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	75,16%	72,64%	96,65%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik tahun 2021 masih di bawah kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (target tahun 2026) atau masih tercapai 96,65%. Upaya untuk mencapai target yang diharapkan pada akhir periode RPJMD tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam tahun - tahun berikutnya melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten dan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan melalui penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

2. Indeks Infrastruktur Pendidikan

Indeks Infrastruktur Pendidikan diukur berdasarkan persentase fasilitas pendidikan berupa ruang kelas belajar yang dalam kondisi baik dan rusak ringan terhadap seluruh ruang kelas belajar yang ada. Capaian Persentase Indeks Infrastruktur Pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.78

Capaian Indeks Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Indeks Infrastruktur Pendidikan	82,53%	92,80%	112,44%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel tersebut nampak bahwa realisasi Indeks Infrastruktur Pendidikan dalam tahun 2021 tercapai 102,31% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan melalui kegiatan melalui pembangunan unit sekolah baru (USB), penambahan ruang kelas baru (RKB), serta rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah/ruang kelas.

Adapun perkembangan Indeks Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo

pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya nampak dalam grafik sebagai berikut:

Grafik III.12

Perkembangan Indeks Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari grafik tersebut nampak bahwa Indeks Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dalam tahun 2021 meningkat menjadi 92,80 dari realisasi tahun 2020 sebesar 80,49 atau mengalami peningkatan sebesar 15,29%.

Tabel III.79

Perbandingan Realisasi Indeks Infrastruktur Pendidikan Tahun 2021 dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Indeks Infrastruktur Pendidikan	92,80%	*)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dikarenakan data Indeks Infrastruktur Pendidikan Nasional belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan capaian Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Capaian Indeks Infrastruktur Pendidikan tahun 2021 dibandingkan dengan

kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut :

Tabel III.80

Presentase Sarana Dasar Permukiman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Indeks Infrastruktur Kesehatan	71,13%	61,97%	87,12%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel tersebut nampak bahwa capaian Indeks Infrastruktur Kesehatan dalam tahun 2021 hanya sebesar 87,12% dari target yang ditetapkan. Rincian capaian Indeks Infrastruktur Kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.81

Rincian Capaian Indeks Infrastruktur Kesehatan Tahun 2021

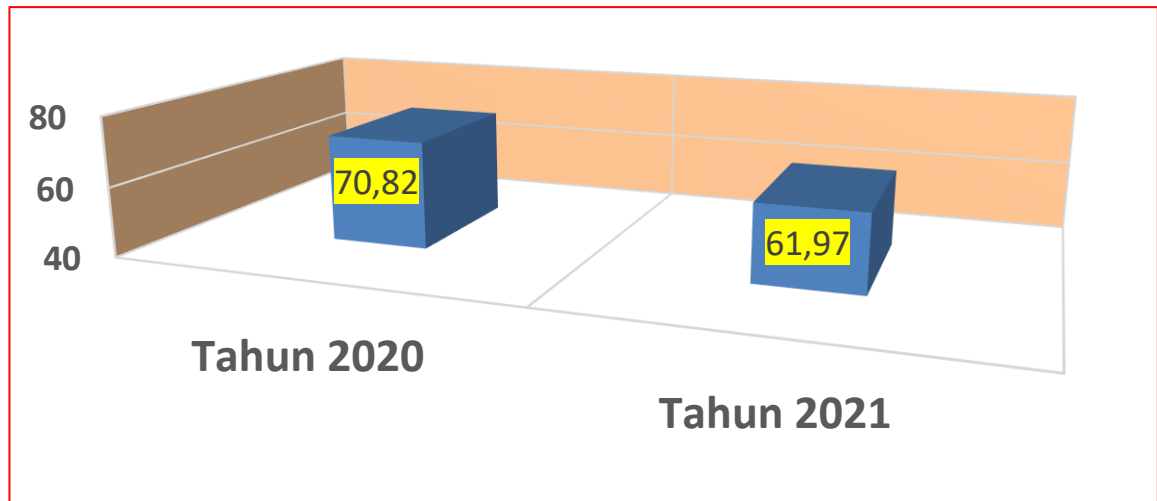
No	Jenis Faskes	Jumlah Bangunan	Bangunan Kondisi Baik	% Capaian	Bobot	Indeks
1	RSUD	1	1	100	0,35	35
2	Puskesmas	27	20	74,07	0,25	18,52
3	Pustu	35	31	56,36	0,15	8,45
	Jumlah	83	52			61,97

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Adapun perkembangan Indeks Infrastruktur Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya nampak dalam grafik sebagai berikut

Grafik III.13

Perkembangan Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari grafik tersebut nampak bahwa Indeks Infrastruktur Kesehatan Kabupaten Sidoarjo hanya mencapai 61,97 dan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 70,82 maka pada terjadi penurunan sebesar 12,5 %

Tabel III.82

Perbandingan Realisasi Indeks Infrastruktur Kesehatan Tahun 2021 Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Indeks Infrastruktur Kesehatan	61,97%	*)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dikarenakan data Indeks Infrastruktur Kesehatan belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan capaian Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional.

Capaian Indeks Infrastruktur Kesehatan tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut :

Tabel III.83

Perbandingan Realisasi Indeks Infrastruktur Kesehatan Tahun 2021 Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026 (%)	Realisasi 2021 (%)	Ket.
<u>Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata</u>	Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,59%	61,97%	85,37%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel di atas nampak bahwa realisasi Indeks Infrastruktur Kesehatan pada tahun 2021 hanya mencapai 85,37% dari target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026). Upaya untuk mencapai target yang diharapkan pada akhir periode RPJMD tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam tahun - tahun berikutnya melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan melalui penyelenggaraan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana

Kinerja peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana diukur melalui capaian indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks tutupan lahan, dan indeks risiko bencana.

1. Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Indeks Kualitas Air adalah ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.

Parameter yang dinilai dalam pengukuran Indeks Kualitas Air adalah derajat keasaman (pH), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand

(COD); Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Nitrat (No₃-N). Fosfat, Fecal Coli. Parameter ini sedikit berbeda dengan parameter pada tahun sebelumnya yakni TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Total Coliform dan E.Coli/Fecal Coli.

Realisasi capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III.84

Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Kualitas Air	51,52	54,05	104,91%

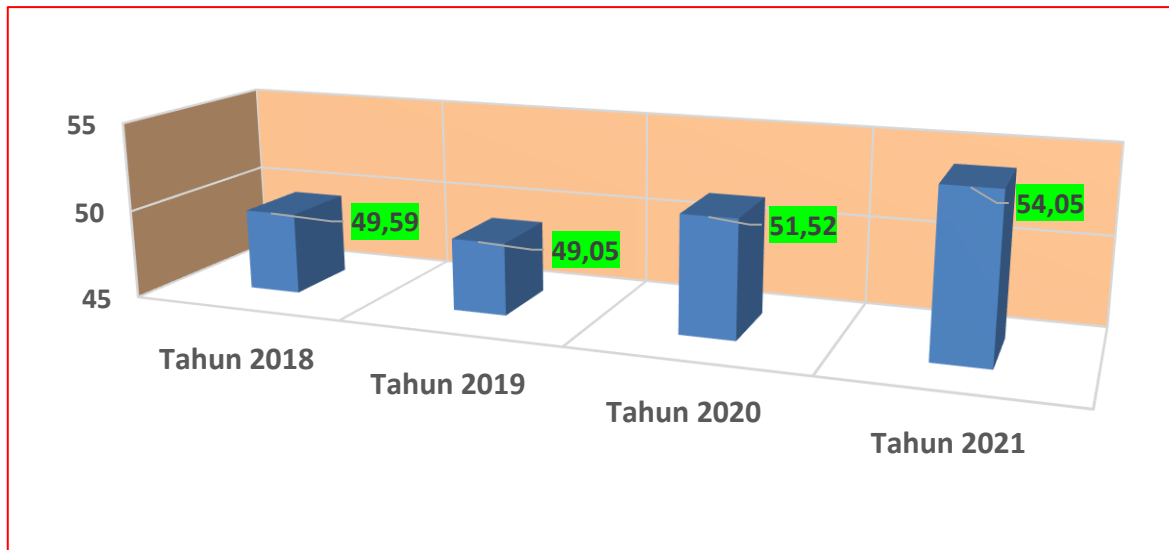
Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 104,91% Keberhasilan tersebut dicapai melalui pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten dari Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Nilai IKA tidak dapat diprediksi terkait peningkatan maupun penurunan nilainya.. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan adanya aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai, terutama pencemar tinggi dari sumber tidak tentu yakni aktivitas domestik masyarakat, sehingga kualitas air pada badan air tidak dapat diprediksi dan tiap tahunnya menunjukkan nilai Indeks Kualitas Air yang fluktuatif. Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Air dari Tahun 2018-2021 yaitu:

Grafik III.14

Perkembangan Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari grafik tersebut nampak bahwa apabila dibandingkan dengan nilai IKA tahun 2020 sebesar 51,52, capaian Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 54,05 atau meningkat sebesar 4,91%.

Tabel III.85

Realisasi Indeks Kualitas Air Tahun 2021 Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Kualitas Air	54.05	*)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dikarenakan data Realisasi Indeks Kualitas Air Nasional belum *re/lease* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Indeks Kualitas Air Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional

Capaian Indeks Kualitas Air tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan atau target pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai

berikut :

Tabel III.86

Perbandingan Realisasi IKA Tahun 2021 Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2021	Ket.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Kualitas Air	51,57	54,05	104,81%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian atau nilai Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 telah melampaui target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Namun demikian mengingat peningkatan maupun penurunan nilai IKA yang tidak dapat diprediksi terkait posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan adanya aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai, maka upaya untuk meningkatkan kualitas air akan tetap dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Sistem Informasi “Geo Lingkungan” yang menggambarkan berbagai sumber pencemar air sungai di kabupaten sidoarjo
- Memasang alat pemantauan kualitas air secara online (Onlimo) dengan hasil berupa status mutu air
- Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium pemantauan kualitas air
- Sosialisasi bagi masyarakat di sepanjang sungai maupun bagi pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah
- Pembuatan taman di sempadan sungai
- Pengawasan terhadap kegiatan industri dan kegiatan/usaha
- Patroli Air

2. Indeks Kualitas Udara

Parameter yang digunakan dalam pengukuran indeks Kualitas Udara (IKU) adalah SO₂ (µg/Nm³) dan NO₂ (µg/Nm³). Pengambilan sampel untuk uji kualitas udara ini dilakukan pada lokasi yang mewakili zona/kawasan yang telah ditentukan

yakni kawasan transportasi, industri/agro industri, permukiman, perkantoran dan kawasan komersial.

Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III.87

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

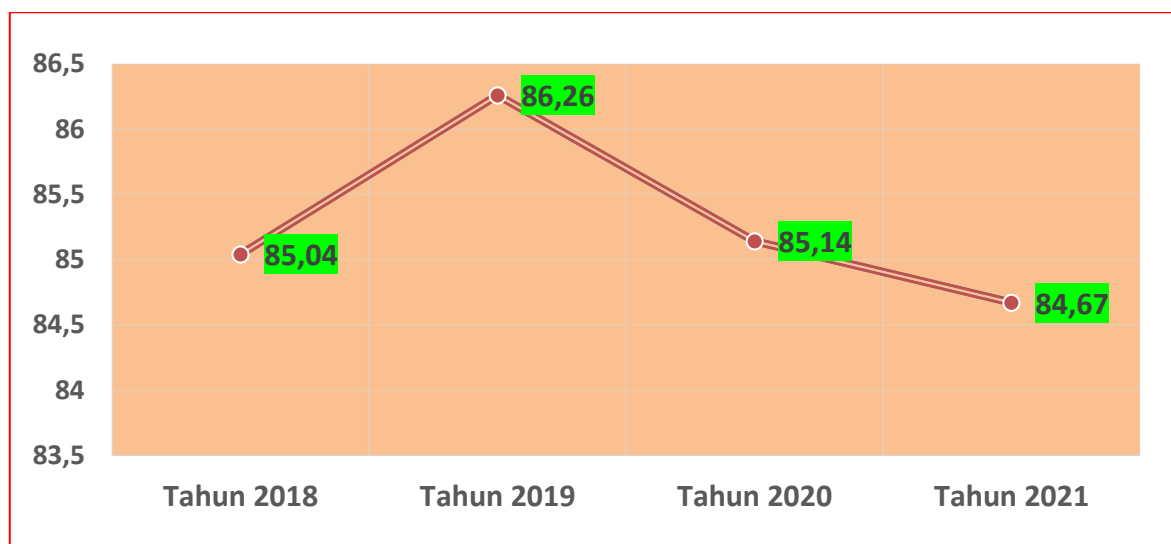
Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Kualitas Udara	85,14	84,67	99,44%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Realisasi nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 sebesar 84,67 , kurang dari 0,56% dari target 2021 sebesar 85,14. Dengan demikian capaian Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo hanya sebesar 99,44%

Kualitas udara ambien tidak dapat diprediksi dan tiap tahunnya menunjukkan nilai yang fluktuatif yang nampak dari grafik sebagai berikut :

Grafik III. 15
Perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari grafik tersebut nampak bahwa walaupun terjadi kenaikan pada tahun 2019, namun pada tahun berikutnya nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Sidoarjo cenderung menurun. Apabila dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2020 sebesar 85,14, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 84,67 atau turun 0,55%.

Hal tersebut disebabkan kemungkinan adanya peningkatan aktivitas pembakaran sampah akibat peningkatan jumlah timbulan sampah akibat Covid-19 dan terjadi peningkatan aktivitas kendaraan bermotor kembali setelah pandemi Covid-19; maupun adanya peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang kurang memperhatikan pengelolaan terhadap pemenuhan baku mutu udara emisi dan udara ambien sesuai standar teknis pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Selain itu juga karena kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Udara, pengelolaan sampah dan penghijauan, serta lemahnya penegakan hukum dalam pengawasan terhadap emisi kendaraan bermotor

Tabel III.88

Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2021 Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Kualitas Udara	84.67	*)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dikarenakan data Realisasi Indeks Kualitas Udara Nasional belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Indeks Kualitas Udara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional

Capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan atau target pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut

Tabel III.89
Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2021
Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2021	Ket.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Kualitas Udara	85,19	84,67	99,39%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian atau nilai Indeks Kualitas Udara pada tahun 2021 masih 99,39% dari target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Upaya peningkatan kualitas udara untuk mencapai kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD akan terus dilakukan, diantaranya dengan cara:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dilarang melakukan pembakaran sampah dan pengelolaan sampah yang tepat dan lebih bernilai guna;
- Melakukan kegiatan pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat secara berkala yang melibatkan stakeholder terkait dan monitoring kualitas udara ambien secara berkala;
- Melakukan kegiatan pengawasan dan memperketat pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengendalian pencemaran udara serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau sesuai ketentuan dan dituangkan dalam Dokumen Lingkungan

3. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Sidoarjo didapat berdasarkan data sekunder dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Jenis tutupan lahan yang diinventarisasi di Kabupaten Sidoarjo antara lain hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, jalur hijau, alun-alun, hutan kota, kebun/perkebunan, ladang, lapangan, makam, pekarangan, taman, sawah dan tegalan.

Luas hutan Kabupaten Sidoarjo seluas 2.817,37 Ha terdiri atas hutan

mangrove primer seluas 110,69 Ha dan hutan mangrove sekunder seluas 2.706,68 Ha, sedangkan lahan vegetasi lainnya selain hutan seluas 33.938,21 Ha.

Capaian Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III.90

Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Tujuan strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Kualitas Lahan	27,1	23,72	87,53%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Realisasi kinerja Indeks Tutupan Lahan tidak mencapai target tahun 2021 yaitu hanya mencapai 87,53% dan mengalami penurunan secara signifikan dibanding tahun 2020 dikarenakan metode inventarisasi tutupan lahan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah menggunakan **analisis citra satelit** tutupan lahan secara menyeluruh di Kabupaten Sidoarjo. Namun, di tahun 2021 terdapat perubahan kebijakan dan regulasi yang mana perhitungan dilakukan secara otomatis melalui website <https://ppkl.menlhk.go.id/> dan melalui proses verifikasi oleh DLH Provinsi Jawa Timur dilanjutkan oleh KLHK dengan rincian nilai Indeks Tutupan Lahan diperoleh dari luas tutupan hutan inputan dari KLHK dan luas tutupan non hutan (dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau dengan tanaman yang bertajuk) inputan dari masing-masing daerah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan tabel data RTH dan peta deliniasi RTH.

Perubahan kebijakan tersebut menyebabkan berkurangnya nilai tutupan lahan yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo karena keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung dalam melakukan deliniasi RTH tersebut serta rendahnya tanaman bertajuk di Kabupaten Sidoarjo.

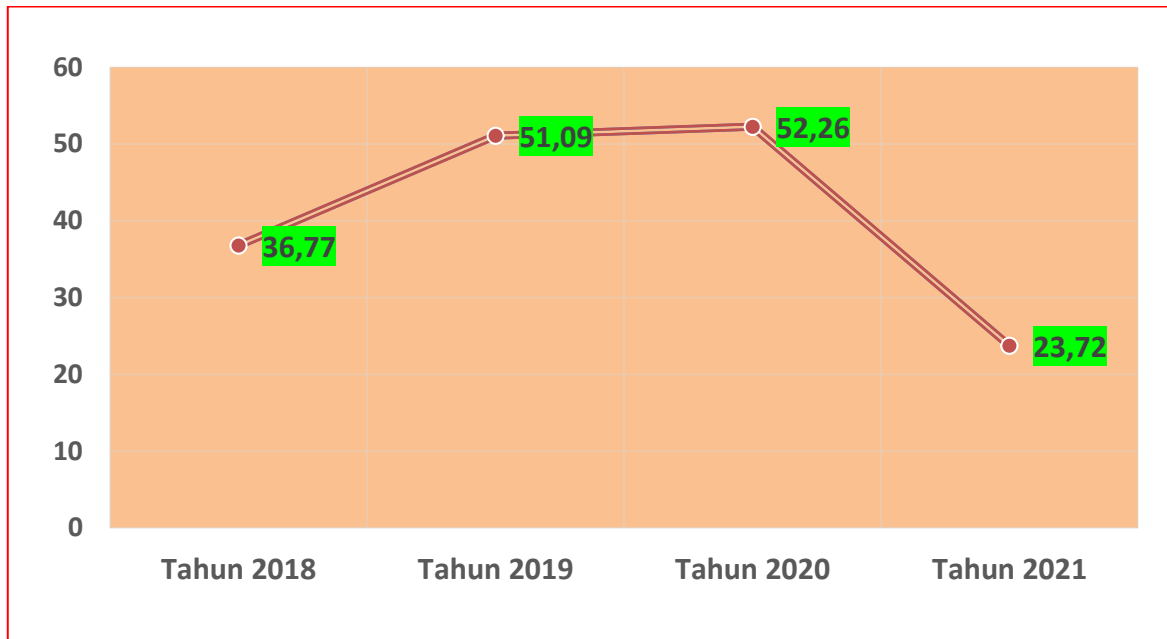
Selain itu, nilai Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2020 masih memasukkan luas tutupan lahan dari pekarangan, pertanian, perkebunan, dan makam yang secara regulasi tidak masuk dalam kategori tutupan lahan yang diperhitungkan

dalam Indeks Tutupan Lahan.

Berikut capaian kinerja Indeks Tutupan Lahan dari Tahun 2019-2021 yaitu

Grafik III.16

Perkembangan Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Tabel III.91

Realisasi Indeks Tutupan Lahan Tahun 2021 Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Tutupan Lahan	23,72	*)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dikarenakan data Realisasi Indeks Tutupan Lahan Nasional belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Indeks Tutupan Lahan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional

Capaian Indeks Tutupan Lahan tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi yang

diharapkan atau target pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut:

Tabel III.92
Perbandingan Realisasi Indeks Tutupan Lahan Tahun 2021
Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2021	Ket.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Tutupan Lahan	23,72	27,15	87,37%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian atau nilai Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2021 masih belum mencapai target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Upaya peningkatan kualitas udara untuk mencapai kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD akan terus dilakukan, diantaranya dengan

- Mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota/taman lingkungan, ikut aktif menjaga keindahan, keserasian, serta kebersihan taman kota/taman lingkungan;
- Menertibkan permukiman atau komersial jasa yang berada di bantaran sungai dan memanfaatkan area bantaran atau sempadan sungai sebagai Ruang Terbuka Hijau secara optimal sehingga dapat berfungsi sebagai penahan erosi dan resapan air;
- Mempertahankan area hijau (*green belt*) yang sudah ada, termasuk keberadaan hutan mangrove di daerah pesisir, meningkatkan kawasan penyangga (*buffer zone*) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman dan mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk turut serta menyediakan RTH di lokasi kegiatan, terutama tanaman pelindung yang bertajuk.

4. Indeks Risiko Bencana

Dalam Arahana dan Strategi Penanggulangan Bencana RPJMN Nasional 2020

–2024 kabupaten Sidoarjo termasuk dalam 136 Kabupaten/Kota di Indonesia dalam kategori daerah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau aglomerasi yang rawan bencana yang menjadi prioritas nasional dan atau termasuk dalam 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain itu, Sidoarjo juga dikenal luas di seluruh pelosok negeri bahkan dunia dengan peristiwa atau kejadian bencana yang populer dengan sebutan ‘Lapindo atau Lumpur Sidoarjo (Lusi)’ yang menunjukkan bahwa ancaman bencana di Sidoarjo tidak dapat dipandang dengan sebelah mata dan penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif, antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel III.93

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

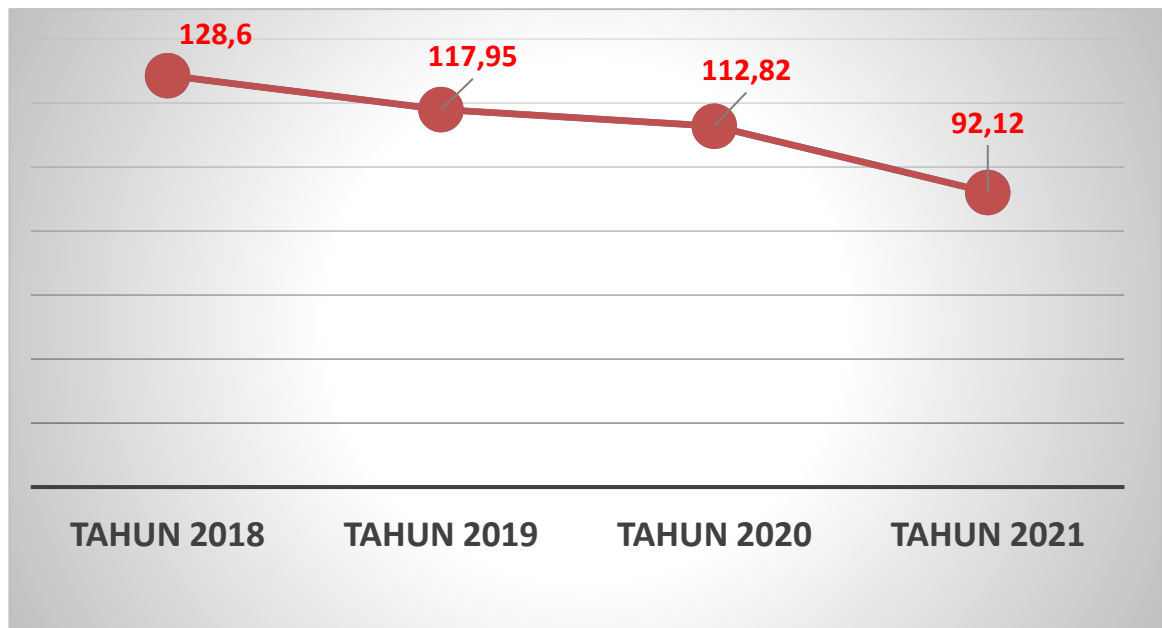
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	99,12	99,12	100%

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Realisasi kinerja Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2021 mencapai 92,12 atau 100% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian IRB tahun 2020 sebesar 112,82 maka kondisi tahun 2021 menurun menjadi 99,12 atau 12,14%. Hal tersebut nampak dari grafik perkembangan Indeks Risiko Bencana sebagai berikut :

Grafik III.17

Perkembangan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Pada hakikatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat dan daerah, jika berpedoman pada dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2019 adalah menurunkan indeks risiko bencana. Penurunan indeks risiko tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunannya yaitu Bahaya (H), Kerentanan (V), dan Kapasitas (C). Risiko Bencana dapat ditimbulkan karena tingginya tingkat bahaya dan kerentanan, serta oleh rendahnya tingkat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Semakin tinggi tingkat kerentanan daerah dan semakin rendahnya kapasitas membuat semakin tingginya risiko terhadap bencana.

Tabel III.94

Realisasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2021 Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021		Keterangan
		Kab. Sidoarjo	Nasional	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	99,12	*)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2020 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2020

Dikarenakan data Realisasi Indeks Risiko Bencana Nasional belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Indeks Risiko Bencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Realisasi Nasional

Capaian Indeks Risiko Bencana tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan atau target pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut

Tabel III.95

Perbandingan Realisasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2021 Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2021	Ket.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	76,86	99,12	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian atau nilai Indeks Risiko Bencana pada tahun 2021 masih belum mencapai target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD, dalam arti bahwa masih harus diupayakan untuk menurunkan risiko bencana tersebut pada tahun – tahun mendatang.

Upaya upaya untuk mengurangi indeks risiko bencana akan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- perkuatan kebijakan dan kelembagaan

- pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
- pengembangan diklat dan logistik
- penanganan tematik kawasan rawan bencana
- peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
- perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
- pengembangan sistem pemulihan bencana.

MISI 4. Membangun SDM Unggul Dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya;

Untuk mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan dengan 1 indikator capaian, dan didukung 3 sasaran dan 4 indikator sasaran.

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Tujuan - Sasaran - Indikator	Tingkat Keberhasilan
Tujuan : Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	SANGAT BERHASIL
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	SANGAT BERHASIL
2.	Rata – Rata Lama Sekolah (RTLs)	BERHASIL
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	SANGAT BERHASIL
Sasaran 3 : Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam Masyarakat		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	

Sumber data : Perjanjian Kerja Bupati PAK 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak pada segala sektor kehidupan, salah satunya berpengaruh pula terhadap peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Pembangunan sektor-sektor yang terkait dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu satu dasa warsa ini, telah tertata dengan baik. Pembangunan di bidang

kesehatan dan pendidikan telah mendukung laju perkembangan IPM Kabupaten Sidoarjo pada beberapa tahun terakhir. Berikut uraian hasil dan analisa pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran pada misi 4 :

TUJUAN : Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya

Tujuan ini berfokus pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, utamanya dalam aspek Pendidikan dan Kesehatan, mengingat dua hal tersebut merupakan modal dasar bagi terwujudnya kesejahteraan secara spiritual maupun material.

Capaian indikator tujuan tersebut dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat / penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-rata lama sekolah adalah rata - rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan melalui standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Berikut merupakan capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 :

Tabel III.97
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	80,41	80,65	100,30%

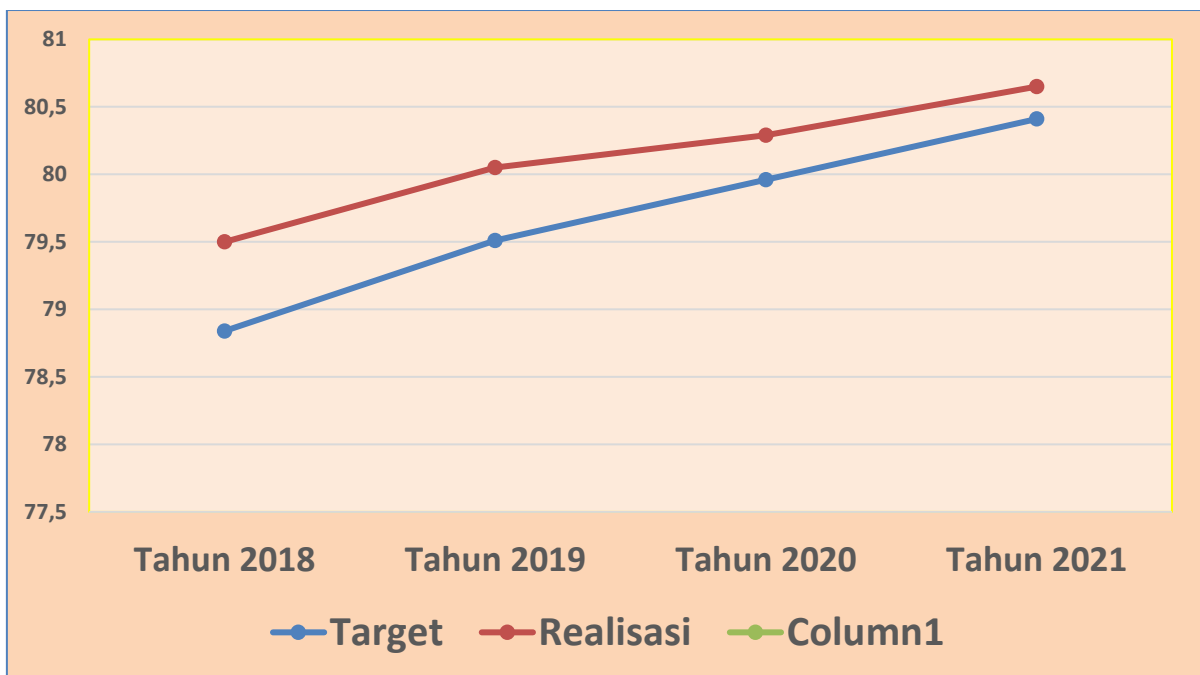
Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mencapai 80,65 atau tercapai 100,30 % dari target yang ditetapkan.

Sebagai alat ukur tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok untuk

mengukur kualitas hidup dan kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu satu dasa warsa ini, telah tertata dengan baik. Misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Hasilnya telah menunjukkan IPM Kab Sidoarjo mulai tahun 2018 hingga 2021, terus melaju naik. Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik 18
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

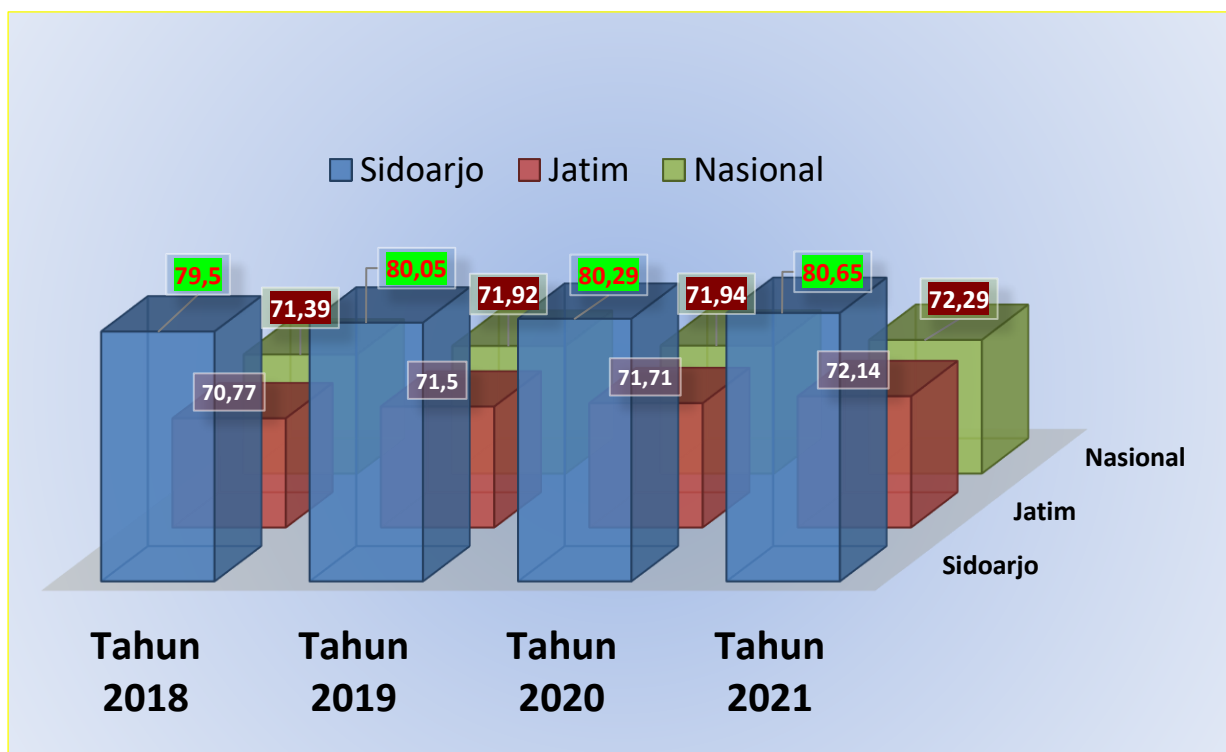
Dari grafik di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, realisasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo, selain selalu mencapai target yang ditetapkan pada masing – masing tahun, juga perkembangannya selalu meningkat dari tahun ke tahun, Angka IPM di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018 sebesar 79,50 berturut – turut meningkat menjadi 80,05 pada tahun 2019, 80,29 pada tahun 2020, dan 80,65 pada tahun 2021.

Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya, yang dalam hal ini capaian setiap komponen tersebut tercermin

dari capaian setiap indikator sasaran. Dengan melihat capaian masing - masing komponen, diharapkan Pemerintah Daerah mendapatkan input untuk meningkatkan pembangunan manusia wilayahnya masing-masing. Meningkatnya pembangunan manusia di Jawa Timur setiap tahunnya dikarenakan adanya kenaikan masing-masing komponen pembentuknya angka harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Capaian IPM Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 bila dibandingkan dengan capaian IPM Nasional nampak dalam grafik sebagai berikut :

Grafik III.19
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo
dengan Provinsi Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2018 disamping selalu meningkat, capaian setiap tahunnya juga melebihi capaian IPM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, Capaian skor IPM tersebut juga menempatkan Kabupaten

Sidoarjo menjadi ranking 4 diantara kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Perbandingan realisasi IPM tahun 2021 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut :

Tabel IV.98
Perbandingan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021
Dengan Target Tahun 2026

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Kab. Sidoarjo		Ket
		Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2026	
Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	80,65	81,62	1,20%

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dengan target nilai Indeks Pembangunan Manusia pada masa akhir RPJM sebesar 81,62 maka nilai IPM harus meningkat sebesar 1,20% dari realisasi tahun 2021. Peningkatan nilai IPM akan didukung oleh pelaksanaan program - program yang terkait dengan upaya peningkatan usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah.

SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berikut merupakan capaian angka Harapan Lama Sekolah (IPM) pada Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 :

Tabel IV.99
Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

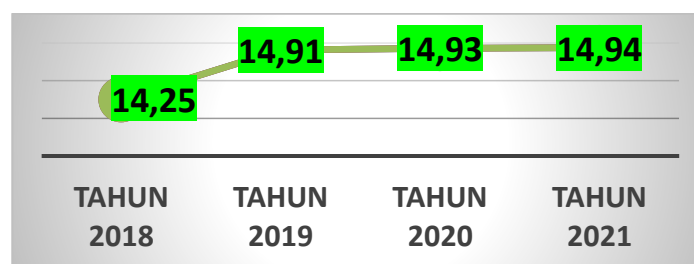
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,01	14,94	99,53%

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik dalam “Sidoarjo Dalam Angka”, menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 tercapai 14,94 tahun sehingga target 15,01. belum sepenuhnya tercapai yaitu hanya tercapai 99,53%. Dengan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah 14,94 tahun dapat diartikan bahwa peserta didik lulusan SD dan SMP sekarang di Kabupaten Sidoarjo punya potensi untuk bisa melanjutkan pada tingkat pendidikan SMA maupun Diploma I (DI).

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah semakin meningkat, sebagaimana nampak pada grafik berikut:

Grafik IV.20
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada Kabupaten Sidoarjo angka harapan lama sekolah selalu mengalami peningkatan

dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu terdapat peningkatan 4,63% dari tahun 2018. Sedangkan Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 adalah 14,94 tahun relative sama dengan tahun 2020 yaitu 14,93 tahun.

Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2021 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut :

. Tabel IV.100
Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kab. Sidoarjo		Ket
		Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2026	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,94	16,44	10,04%

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 target untuk angka harapan lama sekolah sampai dengan di tahun 2026 adalah sebesar 16,44 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar 14,94 tahun sehingga masih terdapat kekurangan 1,5 tahun atau 10,04%. Adapun upaya - upaya yang akan dilakukan agar Angka Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu:

- Tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah, madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.
- Tetap memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.

- Dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SD dan SMP.

2. Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS)

Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenis pendidikan yang pernah dijalani. Sedangkan definisi Lama Sekolah adalah banyaknya tahun seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang ditamatkan. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Capaian angka Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.101
Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) Tahun 2011

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata rata Lama Sekolah (RLS)	10,33	10,72	103,78%

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

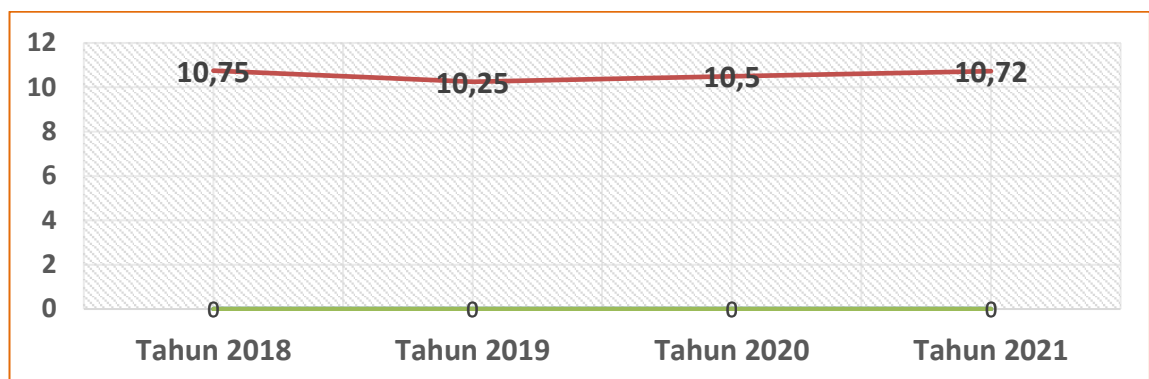
Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2021 di kabupaten Sidoarjo tercapai 10,72 tahun atau 103,78% dari target 10,80 tahun. Dengan realisasi Rata – Rata Lama Sekolah 10,72 tahun, menunjukkan bahwa

masyarakat di Kabupaten Sidoarjo rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Selain itu secara angka perhitungan ketercapaian rata-rata lama sekolah tersebut sudah mendekati Wajar Pendidikan Menengah 12 Tahun.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu 10,50 tahun maka pada tahun 2021 terdapat peningkatan 0,22 tahun atau sekitar 2,10% menjadi 10,72 tahun. Adapun tren capaian Rata – Rata Lama Sekolah dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

Grafik III.21

Perkembangan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Semenjak Tahun 2018 walaupun sempat menurun pada tahun 2019, namun rata – rata lama sekolah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 dan 2021 terus mengalami kenaikan. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan

Perbandingan Capaian Rata rata Lama Sekolah tahun 2021 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut :

Tabel III.102
Perbandingan Capaian Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 2021
Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kab. Sidoarjo		Ket
		Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2026	
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata rata Lama Sekolah (tahun)	10,72	13,11	22,29%

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 target rata-rata lama sekolah pada akhir periode (tahun 2026) adalah sebesar 13,11 tahun, sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 10,72 tahun sehingga masih diperlukan upaya peningkatan minimal 22,29% agar kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD tersebut dapat tercapai. Adapun upaya yang akan dilakukan agar Rata – Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu selain intervensi melalui program bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. juga dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SD dan SMP.

SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup waktu lahir (*expectation of life at birth*) yang biasanya dilambangkan dengan simbol *eo* dan sering disingkat dengan UHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Usia Harapan Hidup (UHH) dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Capaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.103
Realisasi Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2011

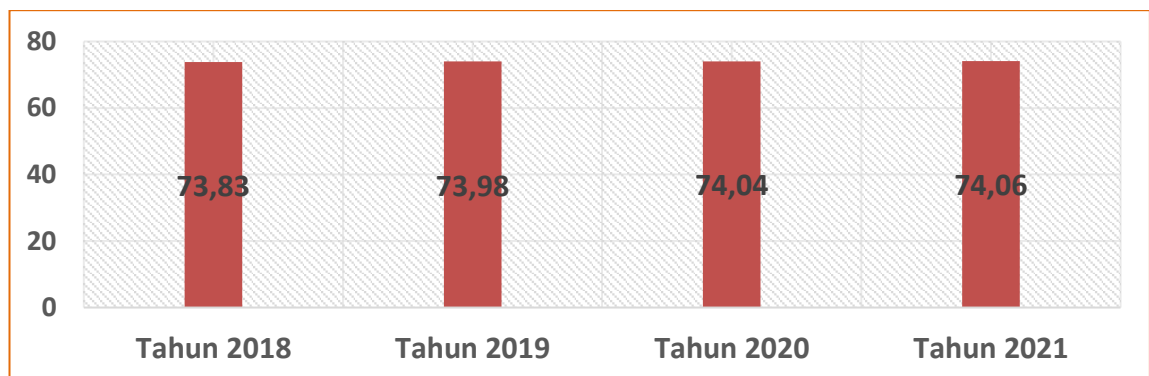
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,69	74,06	100,50%

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Pada tabel diatas menunjukkan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,50% dari target yang ditetapkan.

Perkembangan capaian UHH Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik III.22
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo

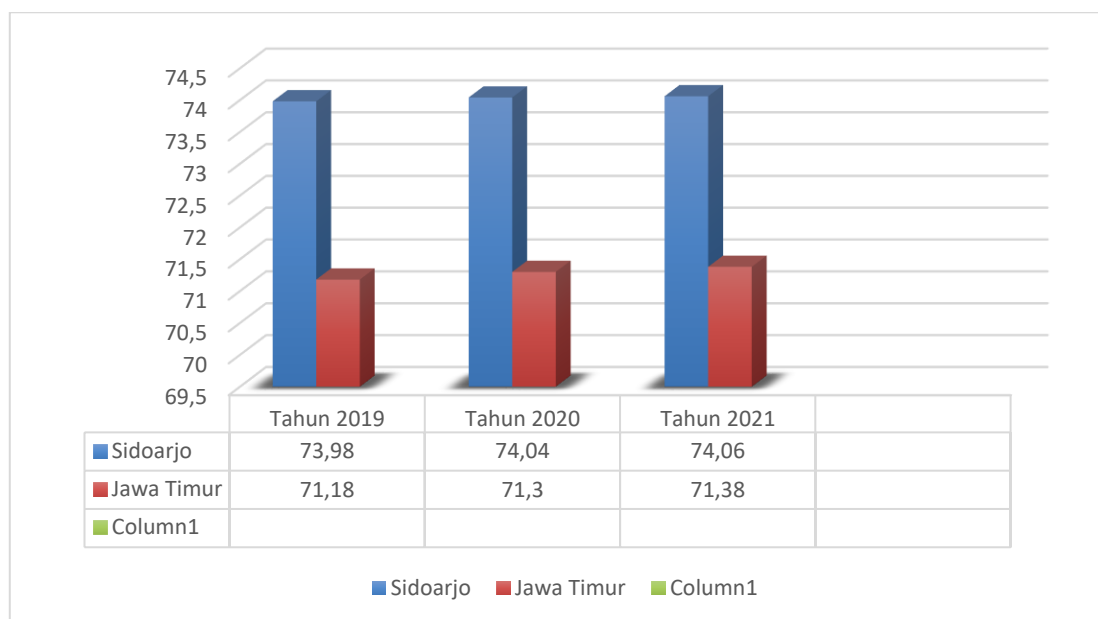


Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021, Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cukup berhasil, perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo ke arah yang lebih baik. Tingginya Usia Harapan Hidup (UHH) mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang baik.

Keberhasilan capaian UHH tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Jawa Timur nampak sebagaimana dalam grafik berikut :

Grafik IV-3.8
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo Dan
Provinsi Jawa Timur



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Pada grafik diatas digambarkan bahwa dibanding dengan angka Provinsi Jawa Timur, Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Sidoarjo lebih baik. Hal ini seiring dengan semakin baiknya kecukupan gizi dan budaya ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakatnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan dari sisi sistem dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan.

Capaian Usia Harapan Hidup tahun 2021 bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel III.104
Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup Tahun 2021
Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kab. Sidoarjo		Ket
		Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2026	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,06	76,81	3,71%

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Usia Harapan Hidup tahun 2021 masih di bawah target tahun 2026 (masa akhir RPJMD), sehingga masih perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan program program Kesehatan.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Masyarakat

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender Development Indeks (GDI) atau Indeks Pembangunan Jender (IPG) digunakan untuk mengetahui adanya ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan disparitas jender. Komponen pendukung IPG sama dengan komponen pendukung IPM yaitu meliputi dimensi Kesehatan yang digambarkan dari Angka Harapan Hidup, Pengetahuan yang digambarkan dari Harapan Lama Sekolah dan Rata – rata lama Sekolah serta Ekonomi yang digambarkan dengan Pengeluaran Perkapita. Perbedaannya adalah bahwa dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) komponen pendukungnya disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dengan nilai minimum dan maksimum.

Capaian Usia Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

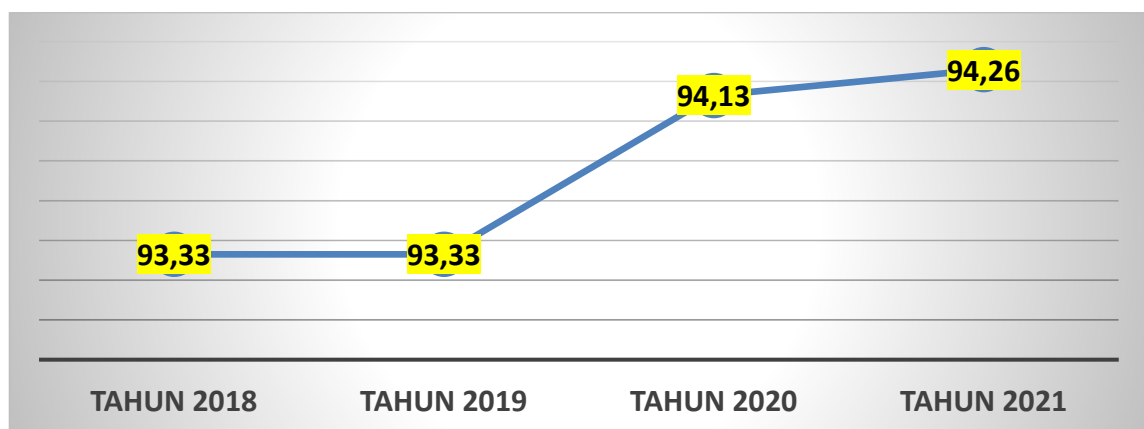
Tabel III.105
Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,32	94,26	99,94%

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari hasil penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat dilihat bahwa pencapaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 sebesar 94,26% atau tercapai 99,94% dari target IPG tahun 2021 sebesar 94,32%. Adapun perkembangan IPG dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Grafik III.24
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo



Capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel III.106
Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup Tahun 2021
Dengan Target Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kab. Sidoarjo		Ket
		Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2026	
Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,26	96,25	2,12%

Sumber data : BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IPG tahun 2021 masih di bawah target tahun 2026 (masa akhir RPJMD), sehingga masih perlu ditingkatkan agar target tahun 2026 tersebut dapat tercapai.

MISI 5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Untuk mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan. 1 indikator tujuan. 2 sasaran dan 3 indikator sasaran.

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel III.107

Tingkat Keberhasilan Misi 5

Sumber data : Ekspose Monev Kinerja Perangkat daerah 2021 - BAPPEDA Kab, Sidoarjo 2022

No	Tujuan - Sasaran - Indikator	Tingkat keberhasilan
	Tujuan : Menguatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat.	
1.	Indeks Kesalehan Sosial	n/a
	Sasaran : Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	
1.	Indeks Toleransi	TERCAPI
2.	Indeks Pelestarian Budaya	BELUM RILIS
	Sasaran : Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	
1.	Indeks Rasa Aman	TERCAPI

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021 ini Kabupaten Sidoarjo lebih sigap dalam penanganan pandemi melalui nilai-nilai kerukunan, keagamaan dan kebudayaan. Kepekaan akan kondisi sosial dan kondisi alam menjadi prioritas utama dalam usaha menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat. Tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

TUJUAN : Memperkuatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat

3. INDEKS KESALEHAN SOSIAL

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan. Indeks Kesalehan Sosial merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo.

SASARAN 1 : BERKEMBANGNYA NILAI-NILAI BUDAYA DAN AGAMA SERTA TOLERANSI DALAM MASYARAKAT

Pada sasaran 1 ini terbagi menjadi 2 (dua) indikator sasaran yakni indeks toleransi dan indeks pelestarian budaya. Berikut merupakan capaian kedua indikator sasaran 1 pada misi 5 :

Indeks Toleransi merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kohesi sosial, yaitu toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal, dengan tujuan :

- Mendeskripsikan tingkat toleransi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
- Mendeskripsikan pengalaman masyarakat terkait toleransi di Kabupaten Sidoarjo

Adapun pembentuk indeks toleransi yakni sebagai berikut :

Variabel	Capaian
Persepsi terhadap toleransi	84,51
Sikap Terhadap Toleransi	80,01
Kerjasama Antar Suku dan Umat Beragama	75,81
Sikap Pemerintah Terhadap Toleransi	78,79
Harapan Terhadap Pemerintah	81,78

Variabel di atas merupakan pembentuk indeks toleransi pada Kabupaten Sidoarjo tahun 2021, dengan target dan capaian pada tahun 2021 sebagai berikut :

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Status
Indeks Toleransi	Indeks	77,64	80,18	Tercapai

SASARAN 2 : TERCIPTANYA KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, NYAMAN DAN TENTRAM

Pada sasaran 2 ini terdiri dari 1 indikator, yakni indeks rasa aman dimana pada tahun 2021 ini telah tercapai 76,60 (Kategori Tinggi) dari target 76,48 dengan pencapaian sebesar 108%. Berikut merupakan capaian dan target pada masing-masing dimensi :

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TAHUN 2021		
		THN 2020	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Rasa Aman	76,03	76,48	76,60	108 %
2	Rasio Jumlah anggota linmas	1 : 1,1	1 : 1,1	1 : 1,1	100 %

	terhadap RT				
3	Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	100%	100 %	100 %	100 %
4	Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani	100%	100 %	100 %	100 %

Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT (Permendagri Nomor 26 Tahun 2020) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, satu RT sekurang kurangnya 1 Satlinmas, Tahun 2021 terdapat Pengukuhan sebanyak 8.512 personil.

Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2021 tercapai 100 %, jumlah kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 1687 sudah tertangani melalui yustisi.

Pelanggaran peraturan daerah yang ditangani, tahun 2021 tercapai 100% Kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 11.090 seluruhnya tertangani.

Dimensi	Capaian
Keamanan dari Bencana	-
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	83,13
Perlindungan dan Pemanfaatan Kebhinekaan	86,59
Keamanan dan Kekerasan	57,61
Indeks Rasa Aman	76,60

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang dipertanggungjawabkan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 6..... yang sudah terbagi dalam 48 Perangkat Daerah (PD) yang sudah terjabarkan dalam program dan kegiatan sebagaimana dalam DPA Perubahan tahun 2021, dengan realisasi pada tabel berikut :

Tabel III.108

Perencanaan dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.415.268.382.510,00	1.329.848.899.630,07	93,96
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	743.665.094.099,00	686.346.399.174,00	
	Program Pengelolaan Pendidikan	670.891.220.106,00	642.935.565.046,07	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	43.158.302,00	36.033.734,00	
	Program Pengembangan Kebudayaan	216.124.608,00	190.429.176,00	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	452.785.395,00	340.472.500,00	
2	DINAS KESEHATAN	625.616.194.227,00	562.025.576.034,02	89,84
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	252.567.181.156,00	240.695.897.203,12	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	358.661.598.960,00	307.995.630.019,90	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.695.950.113,00	11.308.113.401,00	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	416.877.879,00	275.443.073,00	

	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.274.586.119,00	1.750.492.337,00	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	366.776.971.983,00	300.621.519.091,00	81,96
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.956.962.437,00	22.108.849.672,00	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	62.519.908.058,00	55.218.501.025,00	
	Program Penyelenggaraan Jalan	279.300.101.488,00	223.294.168.394,00	
4	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	229.492.832.351,00	215.785.952.525,00	94,03
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.162.105.782,00	7.378.821.448,00	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	22.513.720.528,00	17.992.343.804,00	
	Program Pengembangan Permukiman	23.104.811.473,00	18.198.309.568,00	
	Program Penataan Bangunan Gedung	153.799.989.029,00	152.760.475.328,00	
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.184.193.888,00	2.117.242.201,00	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	561.020.062,00	502.235.040,00	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	404.253.260,00	391.703.500,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.776.140.998,00	11.983.415.202,00	

	Program Pengembangan Perumahan	4.351.709.231,00	3.954.722.178,00	
	Program Kawasan Permukiman	468.000.000,00	377.780.000,00	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	62.512.500,00	49.556.000,00	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	104.375.600,00	79.348.256,00	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	35.594.305.002,00	34.856.272.406,00	97,93
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.155.825.179,00	20.565.665.979,00	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	14.438.479.823,00	14.290.606.427,00	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30.656.135.742,00	28.948.244.683,00	94,43
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.951.055.247,00	12.524.903.445,00	
	Program Penanggulangan Bencana	2.372.985.271,00	2.168.705.447,00	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	15.332.095.224,00	14.254.635.791,00	
7	DINAS SOSIAL	34.547.900.993,00	33.803.921.167,00	97,85
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.904.037.926,00	7.611.667.635,00	
	Program Pemberdayaan Sosial	2.541.137.685,00	2.480.092.850,00	
	Program Rehabilitasi Sosial	9.684.952.671,00	9.639.793.635,00	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	13.983.692.800,00	13.655.565.997,00	

	Program Penanganan Bencana	329.082.678,00	318.678.000,00	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	104.997.233,00	98.123.050,00	
8	DINAS TENAGA KERJA	14.953.296.314,00	14.421.642.792,00	96,44
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.492.301.974,00	8.092.983.892,00	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.056.348.178,00	4.943.216.000,00	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	305.521.529,00	304.204.200,00	
	Program Hubungan Industrial	1.098.282.633,00	1.080.438.700,00	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	842.000,00	800.000,00	
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	25.627.042.593,00	23.123.054.837,00	90,23
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.600.477.296,00	7.162.367.118,00	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	303.017.950,00	282.000.980,00	
	Program Perlindungan Perempuan	1.144.549.970,00	835.312.499,00	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	296.810.458,00	270.047.169,00	
	Program Perlindungan Khusus Anak	282.666.325,00	101.459.055,00	
	Program Pengendalian Penduduk	1.145.870.193,00	1.091.168.528,00	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	14.374.300.401,00	12.932.298.988,00	

	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	479.350.000,00	448.400.500,00	
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	37.742.219.984,00	34.728.658.619,00	92,02
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.650.754.534,00	26.606.722.908,00	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	501.439.120,00	480.686.282,00	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	162.700.000,00	160.927.500,00	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.229.154.466,00	1.691.303.837,00	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.051.959.308,00	3.802.837.893,00	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.122.573.016,00	1.112.749.589,00	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	79.852.625,00	78.606.556,00	
	Program Penyuluhan Pertanian	943.786.915,00	794.824.054,00	
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	185.869.522.237,00	172.652.653.588,00	92,89
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.784.334.553,00	32.963.771.828,00	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	265.985.728,00	214.771.700,00	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.339.086.993,00	2.012.783.955,00	

	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	12.775.005.824,00	11.150.500.046,00	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1.806.906.400,00	751.652.651,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	166.345.127,00	150.666.432,00	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	377.290.640,00	357.239.524,00	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0	0	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	152.704.773,00	136.778.067,00	
	Program Pengelolaan Persampahan	32.170.062.892,00	27.249.510.332,00	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	102.031.799.307,00	97.664.979.053,00	
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	15.513.215.573,00	14.263.922.826,00	91,95
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.054.847.316,00	11.956.731.411,00	
	Program Pendaftaran Penduduk	283.518.354,00	235.167.294,00	
	Program Pencatatan Sipil	396.186.400,00	340.957.124,00	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.778.663.503,00	1.731.066.997,00	

13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	16.240.641.178,00	15.702.483.332,00	95,82
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.676.522.513,00	7.386.130.455,00	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.788.100.583,00	6.645.495.221,00	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.776.018.082,00	1.670.857.656,00	
14	DINAS PERHUBUNGAN	52.036.618.704,00	46.679.069.291,00	89,70
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.582.056.007,00	16.828.278.608,00	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	30.838.112.712,00	26.405.604.699,00	
	Program Pengelolaan Pelayaran	22.689.263,00	22.450.000,00	
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.593.760.722,00	3.422.735.984,00	
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32.671.721.085,00	30.056.895.530,00	92,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.819.532.879,00	12.815.179.077,00	
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6.380.855.950,00	5.140.676.107,00	
	Program Aplikasi Informatika	11.669.109.902,00	11.341.073.252,00	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	542.222.354,00	513.571.670,00	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	260.000.000,00	246.395.424,00	

16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	10.019.322.249,00	9.714.403.850,00	96,96
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.071.879.456,00	6.935.945.400,00	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	186.752.395,00	184.329.900,00	
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	138.825.146,00	138.624.400,00	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	904.153.394,00	865.948.400,00	
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	63.272.205,00	59.657.900,00	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.011.035.171,00	897.897.350,00	
	Program Pengembangan UMKM	643.404.482,00	632.000.500,00	
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.303.767.949,00	15.526.232.270,00	95,23
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.580.601.949,00	13.841.811.570,00	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.559.199.808,00	1.520.790.800,00	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	163.966.192,00	163.629.900,00	
18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	36.774.467.018,00	34.780.951.442,00	94,58
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.211.844.036,00	10.712.373.872,00	

	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.832.258.494,00	2.616.337.455,00	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	20.568.321.504,00	19.383.514.639,00	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	699.733.444,00	687.569.777,00	
	Program Pemasaran Pariwisata	693.114.975,00	645.077.300,00	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	769.194.565,00	736.078.399,00	
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.863.910.376,00	9.334.600.388,00	94,63
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.901.280.476,00	7.426.778.807,00	
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.570.967.875,00	1.518.533.887,00	
	Program Pengelolaan Arsip	391.662.025,00	389.287.694,00	
20	DINAS PERIKANAN	39.219.447.559,00	38.355.956.154,00	97,80
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.251.639.461,00	8.539.525.624,00	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	567.632.547,00	555.889.200,00	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	28.390.541.995,00	28.279.552.728,00	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	78.299.870,00	72.337.726,00	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	931.333.686,00	908.650.876,00	
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	52.402.430.484,00	49.420.602.594,00	94,31

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.713.461.018,00	25.060.479.143,00	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	18.519.608.931,00	17.249.558.037,00	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	443.746.500,00	434.359.000,00	
	Program Pengembangan Ekspor	879.001.088,00	873.998.356,00	
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	132.537.280,00	125.683.420,00	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	6.414.075.667,00	5.381.577.568,00	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.575.000,00	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	250.000.000,00	247.372.070,00	
22	SEKRETARIAT DAERAH	83.606.646.059,00	75.778.652.666,00	90,64
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.905.621.353,00	52.805.635.532,00	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	13.139.118.065,00	11.701.524.394,00	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	12.561.906.641,00	11.271.492.740,00	
23	SEKRETARIAT DPRD	100.747.033.571,00	80.215.063.377,00	79,62
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61.778.865.689,00	51.758.990.797,00	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	38.968.167.882,00	28.456.072.580,00	

24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.962.890.824,00	18.030.504.914,00	95,08
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.043.521.526,00	11.349.593.407,00	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.070.914.008,00	2.013.917.875,00	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.985.313.644,00	3.880.040.632,00	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	863.141.646,00	786.953.000,00	
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	767.002.966.848,00	743.619.232.335,07	96,95
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.515.163.214,00	13.087.201.919,00	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	750.421.604.438,00	728.181.098.983,07	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.066.199.196,00	2.350.931.433,00	
26	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	37.442.045.164,00	36.226.761.533,00	96,75
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.921.599.053,00	30.079.818.473,00	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.520.446.111,00	6.146.943.060,00	
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	17.660.124.624,00	15.984.241.932,00	90,51
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.241.600.624,00	10.956.080.387,00	

	Program Kepegawaian Daerah	3.137.208.732,00	2.000.471.895,00	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.281.315.268,00	3.027.689.650,00	
28	INSPEKTORAT	15.894.038.390,00	15.312.891.575,00	96,34
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.172.416.465,00	14.653.638.275,00	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	302.182.425,00	267.633.800,00	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	419.439.500,00	391.619.500,00	
29	KECAMATAN SIDOARJO	37.343.201.364,00	34.768.996.563,00	93,11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.913.594.812,00	25.751.305.671,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.553.891.572,00	1.781.597.311,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.614.529.459,00	7.041.345.081,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	118.678.095,00	116.806.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	52.742.426,00	20.480.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89.765.000,00	57.462.500,00	
30	KECAMATAN CANDI	6.924.878.514,00	6.441.672.729,00	93,02
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.522.918.238,00	5.248.762.976,00	
	Program Penyelenggaraan	770.753.967,00	716.780.253,00	

	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	395.396.059,00	302.258.500,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.419.250,00	3.350.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	232.391.000,00	170.521.000,00	
31	KECAMATAN BUDURAN	5.673.774.748,00	5.254.489.939,00	92,61
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.767.041.422,00	4.431.874.108,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	656.540.916,00	623.365.931,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	174.026.044,00	155.800.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.761.207,00	9.734.900,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.405.159,00	33.715.000,00	
32	KECAMATAN WONOAYU	6.670.639.506,00	6.429.983.837,00	96,39
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.838.748.752,00	4.634.424.159,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.475.214.754,00	1.458.953.278,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	253.687.500,00	233.693.900,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102.988.500,00	102.912.500,00	
33	KECAMATAN KRIAN	11.650.388.442,00	11.282.459.301,00	96,84
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.196.664.958,00	8.964.392.163,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	793.122.319,00	733.859.138,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.374.555.000,00	1.347.959.500,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	188.181.329,00	163.373.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	97.864.836,00	72.875.500,00	
34	KECAMATAN PORONG	13.856.695.816,00	13.114.414.282,00	94,64
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.146.590.242,00	8.623.369.497,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.318.629.806,00	2.182.958.285,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.123.769.141,00	2.083.282.700,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	233.280.980,00	192.750.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.949.300,00	5.349.300,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.476.347,00	26.704.500,00	
35	KECAMATAN KREMBUNG	6.725.622.780,00	6.387.354.527,00	94,97

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.869.858.046,00	4.579.109.590,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.633.884.762,00	1.600.431.637,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	202.527.972,00	189.188.300,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.977.000,00	10.300.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.375.000,00	8.325.000,00	
36	KECAMATAN JABON	6.785.197.567,00	6.095.492.527,00	89,84
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.934.391.764,00	4.567.305.877,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.604.566.722,00	1.390.502.150,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	222.838.452,00	127.707.500,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.769.465,00	5.550.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.631.164,00	4.427.000,00	
37	KECAMATAN BALONGBENDO	6.269.916.060,00	6.006.583.522,00	95,80
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.166.021.591,00	5.017.780.946,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	898.572.508,00	790.244.726,00	

	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	157.039.461,00	150.308.650,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.282.500,00	48.249.200,00	
38	KECAMATAN TARIK	5.744.607.686,00	5.411.244.396,00	94,20
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.817.755.441,00	4.627.154.951,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	627.867.245,00	575.444.445,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	211.760.000,00	136.045.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.350.000,00	2.520.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79.875.000,00	70.080.000,00	
39	KECAMATAN TAMAN	24.173.521.918,00	22.444.335.667,00	92,85
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.866.851.048,00	15.344.787.312,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.439.589.001,00	2.346.432.700,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.615.005.475,00	4.547.937.155,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	219.658.447,00	177.083.500,00	
	Program Penyelenggaraan	16.947.947,00	13.250.000,00	

	Urusan Pemerintahan Umum			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.470.000,00	14.845.000,00	
40	KECAMATAN WARU	8.783.519.779,00	8.071.414.501,00	91,89
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.767.718.586,00	5.579.174.481,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.393.978.585,00	1.915.886.196,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	571.431.150,00	532.609.869,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.988.967,00	6.688.964,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.402.491,00	37.054.991,00	
41	KECAMATAN GEDANGAN	7.208.028.070,00	6.886.325.660,60	95,54
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.064.640.823,00	4.776.461.385,60	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.659.027.734,00	1.635.988.150,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	421.382.300,00	412.343.625,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.191.613,00	2.030.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.785.600,00	59.502.500,00	
42	KECAMATAN SEDATI	8.108.476.584,00	7.499.806.471,00	92,49
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.713.232.363,00	5.372.737.299,00	

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.244.796.721,00	2.039.479.172,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	136.772.500,00	75.957.500,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.700.000,00	3.400.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.975.000,00	8.232.500,00	
43	KECAMATAN TANGGULANGIN	7.598.519.618,00	6.751.955.874,00	88,86
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.646.736.759,00	5.194.699.763,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.701.460.431,00	1.417.231.111,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	242.897.428,00	140.025.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.425.000,00	0	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	
44	KECAMATAN TULANGAN	6.839.481.735,00	6.602.126.682,00	96,53
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.458.366.735,00	5.245.521.742,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	996.037.500,00	974.003.440,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	125.380.000,00	122.904.000,00	
	Program Penyelenggaraan	0	0	

	Urusan Pemerintahan Umum			
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	259.697.500,00	259.697.500,00	
45	KECAMATAN PRAMBON	7.674.913.152,00	7.180.562.457,00	93,56
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.433.719.777,00	5.113.412.422,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.770.828.233,00	1.672.186.135,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	441.792.500,00	373.733.100,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.160.142,00	679.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.412.500,00	20.551.800,00	
46	KECAMATAN SUKODONO	8.771.736.634,00	8.248.665.189,00	94,04
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.517.724.983,00	6.069.314.989,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.997.206.111,00	1.962.342.200,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	224.447.537,00	186.848.500,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.358.003,00	30.159.500,00	
47	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20.695.538.496,00	19.833.659.309,00	95,84

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.175.108.034,00	6.658.834.043,00	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.960.615.703,00	1.731.819.326,00	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.183.509.061,00	5.169.397.220,00	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.333.486.272,00	4.261.063.220,00	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	130.596.201,00	123.295.000,00	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.912.223.225,00	1.889.250.500,00	
	TOTAL ANGGARAN	5.382.940.378.184,00	4.939.883.659.714,76	91,89

Realisasi anggaran per Program dan Kegiatan per Perangkat Daerah yang cukup optimal yaitu diatas 90% dari anggarannya diharapkan mampu memberikan dukungan dalam mencapai kinerja Program/Kegiatan.

C.1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (*unaudited*) adalah sebagai berikut:

Tabel III.109 Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
4	PENDAPATAN DAERAH	4.270.781.226.451,00	4.673.427.797.833,41	-402.646.571.382,41	109,43
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.714.484.423.345,00	1.928.091.787.367,69	-213.607.364.022,69	112,46
4101	Pajak Daerah	962.962.000.000,00	1.027.822.704.720,00	-64.860.704.720,00	106,74
4102	Retribusi Daerah	71.797.328.070,00	65.341.926.569,00	6.455.401.501,00	91,01
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.057.199.907,00	31.133.395.762,50	-76.195.855,50	100,25
4104	Lain-lain PAD yang Sah	648.667.895.368,00	803.793.760.316,19	-155.125.864.948,19	123,91
42	PENDAPATAN TRANSFER	2.368.637.104.817,00	2.559.455.899.370,00	-190.818.794.553,00	108,06
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.991.799.589.317,00	2.031.974.025.981,00	-40.174.436.664,00	102,02
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	376.837.515.500,00	527.481.873.389,00	-150.644.357.889,00	139,98
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	187.659.698.289,00	185.880.111.095,72	1.779.587.193,28	99,05
4301	Pendapatan Hibah	2.700.000.000,00	1.866.000.000,00	834.000.000,00	69,11
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	184.959.698.289,00	184.014.111.095,72	945.587.193,28	99,49

5	BELANJA DAERAH	5.376.163.555.617,00	4.939.891.984.714,76	436.271.570.902,24	91,89
51	BELANJA OPERASI	3.560.645.958.978,00	3.299.447.641.964,69	261.198.317.013,31	92,66
5101	Belanja Pegawai	1.690.813.768.611,00	1.620.047.237.731,00	70.766.530.880,00	95,81
5102	Belanja Barang dan Jasa	1.594.323.663.013,00	1.417.219.546.432,79	177.104.116.580,21	88,89
5104	Belanja Subsidi	5.880.000.000,00	4.563.492.001,00	1.316.507.999,00	77,61
5105	Belanja Hibah	155.090.239.117,00	147.342.921.799,90	7.747.317.317,10	95,00
5106	Belanja Bantuan Sosial	114.538.288.237,00	110.274.444.000,00	4.263.844.237,00	96,28
52	BELANJA MODAL	1.073.360.369.732,00	919.012.883.755,00	154.347.485.977,00	85,62
5201	Belanja Modal Tanah	81.175.000.000,00	34.014.902.017,00	47.160.097.983,00	41,90
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	351.231.977.235,00	308.234.423.280,00	42.997.553.955,00	87,76
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	327.607.870.610,00	301.625.990.175,00	25.981.880.435,00	92,07
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	310.399.131.887,00	272.453.365.570,00	37.945.766.317,00	87,78
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.885.890.000,00	2.684.202.713,00	201.687.287,00	93,01
5206	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	60.500.000,00	0,00	60.500.000,00	0,00
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	75.110.000.000,00	56.549.487.585,07	18.560.512.414,93	75,29
5301	Belanja Tidak Terduga	75.110.000.000,00	56.549.487.585,07	18.560.512.414,93	75,29
54	BELANJA TRANSFER	667.047.226.907,00	664.881.971.410,00	2.165.255.497,00	99,68
5401	Belanja Bagi Hasil	103.475.932.807,00	103.200.571.603,00	275.361.204,00	99,73
5402	Belanja Bantuan Keuangan	563.571.294.100,00	561.681.399.807,00	1.889.894.293,00	99,66
	Jumlah	5.376.163.555.617,00	4.939.891.984.714,76	436.271.570.902,24	91,89
	Surplus/Defisit	(1.105.382.329.166,00)	(266.464.186.881,35)	(838.918.142.284,65)	99,65
6	PEMBIAYAAN DAERAH	1.105.382.329.166,00	1.107.460.717.093,10	(2.078.387.927,10)	100,04
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.108.082.329.166,00	1.109.326.717.093,10	-1.244.387.927,10	100,11

6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.106.084.911.309,00	1.106.084.911.309,32	-0,32	100,00
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.997.417.857,00	3.241.805.783,78	-1.244.387.926,78	162,30
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.700.000.000,00	1.866.000.000,00	834.000.000,00	69,11
6202	Penyertaan Modal Daerah	2.700.000.000,00	1.866.000.000,00	834.000.000,00	69,11
Jumlah		1.105.382.329.166,00	1.107.460.717.093,10	(2.078.387.927,10)	100,04
Pembiayaan		1.105.382.329.166,00	1.107.460.717.093,10	(2.078.387.927,10)	100,04
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		0,00	840.996.530.211,75	(840.996.530.211,75)	99,69

Tabel III.110 Pencapaian Kinerja dan Anggaran per-Misi

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KINERJA			ANGGARAN		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
	MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha								
	TUJUAN 1	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha							
1	Terselenggaraanya	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A	N/A		Rp	Rp	96,04
		2.	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	100,00	935.798.387.830	898.782.418.952	%

	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,73	-			
		4.	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	N/A			
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,25	2,37	72,92		
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Inovatif	90,00		
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100,00		
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	A-Sangat Baik	A-Sangat Baik	100,00	Rp 342.714.433.724	Rp 308.018.647.605 89,88 %
	MISI 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan							
	TUJUAN 2	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan						

3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,09	16,83	104,60	Rp 182.442.332.994	Rp 172.812.401.079	94,72 %
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	51,73	51,97	100,46			
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	2,55	-0,08	-3,14			
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0,85	0,85	100,00			
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	1,87	1,87	100,00	Rp 26.259.963.427	Rp 25.416.887.182	96,79 %
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	%	21,84	21,84	100,00			
		3.	Persentase Desa Mandiri	%	10,25	10,25	100,00			
	TUJUAN 3	:	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan							
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	89,17	89,13	99,96	Rp 14.953.296.314	Rp 14.421.642.792	96,44 %

6.	Menurunnya a Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	93,78	94,07	100,31	Rp 34.547.900.993	Rp 33.803.921.167	97,85 %
	MISI 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan								
	TUJUAN 4	:	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan							
7.	Tersedianya a Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,755	0,759	100,53	Rp 2.522.018.047.661	Rp 2.259.379.315.873	89,59 %
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	82,53	92,8	112,44			
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	71,13	67,91	95,47			
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,52	54,05	104,91	Rp 216.525.657.979	Rp 201.600.898.271	93,11 %
		2.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,14	84,67	99,45			
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,1	23,72	87,53			
		4.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	99,12	99,12	100,00			
	MISI 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya								
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya							

9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,01	14,94	99,53	Rp 743.708.252.401	Rp 686.310.365.440	92,28 %
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,33	10,72	103,78			
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,69	74,06	100,50	Rp 266.954.595.267	Rp 254.029.946.014	95,16 %
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,32	94,26	99,94	Rp 25.627.042.593	Rp 23.123.054.837	90,23 %
	MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.								
	TUJUAN 6	:	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat							
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi	1.	Indeks Toleransi	Indeks	77,64	80,18	103,27	Rp 21.364.448.499	Rp 20.364.560.985	95,32 %
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	60,32		0,00			

	dalam Masyarakat									
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,48	76,6	100,16	Rp 43.240.820.935	Rp 41.747.532.050	96,55 %

Meninjau dari tabel di atas yakni capaian kinerja anggaran yang kemudian di breakdown setiap Misi dan Indikator Tujuan dengan rata-rata pencapaian persentase di atas 90% lebih. Hal tersebut merupakan indikator keberhasilan Kabupaten Sidoarjo dalam mengemban misi pembangunan daerah dalam rangka perbaikan yang sustainable dari berbagai sektor.

Tabel III.111

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
	MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha				
	TUJUAN 1	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha			
1	Terselenggaraanya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	0		
		2.	Opini Atas Laporan BPK	100		
		3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	0		
		4.	Status Kinerja LPPD	0		
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	72,92		
		6.	Indeks Inovasi Daerah	90		
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 1		96,04	96,04	-5,31
2	Terselenggaraanya	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	100		

	Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Tingkat Pencapaian Sasaran 2		100	89,88	10,12
	MISI 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan				
	TUJUAN 2	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan			
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	105		
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	100		
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	95,00		
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 3		100,02	94,72	5,30
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	100		
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	100		
		3.	Persentase Desa Mandiri	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 4		100	96,79	3,21

	Kemandirian Desa					
	TUJUAN 3	:	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan			
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 5		100	96,44	3,52
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 6		100	97,85	2,46
	MISI 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan				
	TUJUAN 4	:	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	101		
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	112		
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	95		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 7		103	89,59	13,23
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	1.	Indeks Kualitas Air	105		
		2.	Indeks Kualitas Udara	99		
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	88		

	Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	4.	Indeks Resiko Bencana	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 8		98	93,11	4,86
	MISI 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya				
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya			
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	100		
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	104		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 9		102	92,28	9,37
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	101		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 10		101	95,16	5,34
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 11		100	90,23	9,77
	MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.				
	TUJUAN 6	:	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat			
12.		1.	Indeks Toleransi	103		

	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	2.	Indeks Pelestarian Budaya	0		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 12		0	0,00	0,00
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 13		100	90,49	9,66

Dari tabel di atas ditarik kesimpulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021, tingkat efisiensi dari segi anggaran dengan tingkat pencapaian indikator kinerja berkisar antara 0 s.d 15% dengan total rata-rata persentase 5,96%, dimana penggunaan anggaran sudah sesuai dengan tingkat kinerja dari masing-masing indikator, dimana capaian kinerja tiap indikator rata-rata di atas 90%.



BAB IV



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Sidoarjo
Pesona Delta

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil terlihat dari 9 (sembilan) indikator tujuan ada 7 (tujuh) indikator telah tercapai dengan katagori Sangat Berhasil dengan nilai capaian lebih dari 100%, sedangkan 2 (dua) indikator tujuan lainnya belum dapat diukur karena belum ada rilis dari kementerian lembaga terkait. Adapun dari 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, ada 10 (sepuluh) indikator Sangat Berhasil, 12 (dua belas) Berhasil, 3 (tiga) Cukup, 1 (satu) Kurang dan 5 (lima) indikator belum dirilis. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN %	TINGKAT KEBERHASILAN	KETERANGAN
	MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha					
	TUJUAN 1	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha				
	Indikator Tujuan		Indeks Reformasi Birokrasi	B	N/A		Belum Rilis
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	A	N/A		Belum Rilis
		2.	Opini Atas Laporan BPK	WTP	WTP	100	Berhasil
		3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,73	N/A		Belum Rilis
		4.	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	N/A		Belum Rilis
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,25	2,37	72,92	Cukup
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Inovatif	81	Cukup
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100,00	Berhasil
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A – (4,27) Sangat Baik	A – (4,3) Sangat Baik	100,7	Sangat Berhasil
	MISI 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan					
	TUJUAN 2	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan				
	Indikator Tujuan :	1.	Pertumbuhan Ekonomi	1	4,21	421,00	Sangat Berhasil
		2.	Indeks Gini	0,365	0,347	95,07	Berhasil
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,09	16,83	104,60	Sangat Berhasil
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	51,73	51,97	100,46	Sangat Berhasil
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,55	-0,08	3,14	Terjadi penurunan laju pertumbuhan karena lahan banyak beralih fungsi



		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,85	0,85	100,00	Berhasil	
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,87	1,87	100,00	Berhasil	
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	21,84	21,84	100,00	Berhasil	
		3.	Persentase Desa Mandiri	10,25	10,25	100,00	Berhasil	
	TUJUAN 3	:	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan					
	Indikator Tujuan	1.	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	10,54	10,87	103,13	Sangat Berhasil	
		2.	Persentase Penduduk Miskin	5,71	5,93	103,85	Sangat Berhasil	
5.	Terseapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terseap di sembilan sektor	89,17	89,13	99,96	Berhasil	
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	93,78	94,07	99,69	Berhasil	
	MISI 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan						
	TUJUAN 4	:	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan					
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Infrastruktur	0,755	0,763	101,06	Sangat Berhasil	
		2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,79	59,81	100,03	Sangat Berhasil	
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,755	0,759	100,53	Sangat Berhasil	
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	82,53	92,8	112,44	Sangat Berhasil	
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	71,13	67,91	95,47	Berhasil	
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	51,52	54,05	104,91	Sangat Berhasil	
		2.	Indeks Kualitas Udara	85,14	84,67	99,45	Berhasil	
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,1	23,72	87,53	Cukup	
		4.	Indeks Resiko Bencana	99,12	99,12	100,00	Berhasil	

	MISI 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya						
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya					
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,41	80,65	100,3	Sangat Berhasil	
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,01	14,94	100	Berhasil	
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,33	10,72	104	Sangat Berhasil	
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,69	74,06	101	Sangat Berhasil	
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,32	94,26	100	Berhasil	
	MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.						
	TUJUAN 6	:	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat					
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Kesalehan Sosial	82,01		0		
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	77,64	80,18	103	Sangat Berhasil	
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	60,32		0		
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	76,48	76,6	100,2	Sangat Berhasil	

Keberhasilan yang sudah dicapai Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mendapatkan predikat WBK 1 Perangkat Daerah yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 2 Perangkat Daerah mendapatkan predikat WBBM yakni Kecamatan Sukodono dan RSUD Sidoarjo, sehingga total 3 Perangkat Daerah mendapat predikat WBK dan 2 Perangkat Daerah mendapat predikat WBBM. Pada indeks pelayanan publik adanya peningkatan kategori Prima pada 2 Perangkat Daerah yaitu RSUD Sidoarjo dan DPMPTSP dan 1 Perangkat Daerah sangat Baik yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. SARAN

Adapun dari indikator sasaran yang sudah tercapai dengan kategori Sangat Berhasil dan Berhasil akan di pertahankan dan ditingkatkan kedepannya, sedangkan pada pencapaian target kinerja dengan kategori cukup dan kurang akan dilakukan perbaikan dan evaluasi untuk peningkatan di tahun akan datang.

Satu, berkenaan dengan capaian kinerja yang masih dalam katagori Kurang, yang terdapat pada indikator Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dalam arti luas dengan persentase capaian minus 0,08% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 0,12%. Hal tersebut disebabkan menurunnya luas lahan di sektor pertanian serta menurunnya investasi dibidang pertanian karena masyarakat kurang tertarik bekerja di sektor pertanian. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya mempertahankan luas lahan pertanian produktif yang masih ada, serta melalui dinas terkait terus memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat agar tetap besemangat mengelola lahan pertaniannya sehingga lahannya tidak dijual dan beralih fungsi.

Dua, pada indeks SPBE capaian kinerja pada tahun 2021 tergolong dalam kategori cukup dengan pencapaian 2,37 dengan target 3,25, yang disebabkan adanya perubahan kebijakan dan regulasi perhitungan nilai indeks SPBE dimana sebelumnya terdapat 3 domain menjadi 4 domain dan penambahan jumlah indikator dari 35 menjadi 47 indikator. Pada tahun berikutnya dilakukan upaya penyesuaian pola perhitungan yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan Perangkat Daerah (PD) yang menunjang pencapaian indeks SPBE tahun 2022.

Tiga, pada indeks Inovasi Daerah capaian kinerja pada tahun 2021 termasuk pada kategori Inovatif dengan target Sangat Inovatif, yang disebabkan karena belum optimalnya partisipasi pelaporan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) pada tahun 2021. Pada tahun selanjutnya akan dilaksanakan pendampingan inovas daerah oleh BAPEDA dan

Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) melalui forum komunikasi inovasi daerah serta pendampingan usulan inovasi pada jenjang Provinsi maupun Nasional.





BAB V



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



Sidoarjo
Pesona Delta

BAB V

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

1. 09 Maret 2021 : Penghargaan Pelayanan Publik dengan Predikat Pelayanan Prima (A) diraih DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Sidoarjo, di Jakarta dan diberikan langsung oleh Menteri PANRB.
2. 07 April 2021 : Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Gubernur Jawa Timur, di Gedung Grahadi, Surabaya.
3. 18 Mei 2021 : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Tahun Anggaran (TA) 2020 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di kantor perwakilan BPK Jawa Timur.
4. 01 April 2021 : Penghargaan Pencapaian Terbaik Pertama Kategori III Penilaian Kompetensi Diajang BKN Award 2020 dari Kepala BKN RI kepada Pemkab Sidoarjo melalui Bupati Sidoarjo diberikan di Ruang Sekdaprov Jatim.
5. 13 April 2021 : Penghargaan atas Kontribusinya Ikut Serta Membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS Terkait Permenpan RB Nomor 8/2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS di K/L/P diberikan kepada Pemkab Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo diberikan oleh Menpan RB RI di Kantor Kemenpan RB RI di Jakarta.
6. 19 November 2021 : Penghargaan Top 30 Kovablik (Ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) melalui Aplikasi SiPraja yang diselenggarakan oleh Pemprov Jatim diterima oleh Bupati Sidoarjo dari Menpan RB diberikan di Grand City, Surabaya.
7. 26 November 2021 : Penghargaan dari BKN melalui ajang BKN Award 2021 “Penilaian Instansi Pengelola Kepegawaian Terbaik” peringkat II yang diberikan oleh Kepala BKN kepada Bupati Sidoarjo di Gedung Negara



- Grahadi, Surabaya.
8. 30 November 2021 : Penghargaan Investment Award 2021 kategori Juara Pertama Klaster 1 PDRB Lebih dari 100 Triliun rupiah, di Hall JW Marriot, Surabaya.
 9. 30 November 2021 : Penghargaan dan Sertifikat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Eksistensi Budaya Tradisional yang diberikan oleh Kemenparekraf RI, di Provinsi Sumatera Selatan.
 10. 10 Desember 2021 : Penghargaan “PR INDONESIA Most Popular Leader In Social Media 2021” dari PR Indonesia ft. Kazee Digital Indonesia di Bali.
 11. 14 Desember 2021 : Penghargaan “Implementasi Program Smart City” kategori Smart Governance Gerakan Menuju Smart City dari Kementerian Kominfo RI diterima oleh Dinas Kominfo Sidoarjo, di Jakarta.
 12. 20 Desember 2021 : Penghargaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) : Dispendukcapil Kab. Sidoarjo dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani): RSUD dan Kecamatan Sukodono dari Kementerian Pan-RB dan KPK di Jakarta.
 13. 20 Desember 2021 : Penghargaan dari Kemenpan-RB dengan kategori “Pemimpin Perubahan” diberikan kepada Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, di Jakarta.
 14. 26 Desember 2021 : Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai “Daerah Responsif Terhadap Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”, di Paseban Sena Hotel, Probolinggo.
 15. 29 Desember 2021 : Penghargaan Pertama dari Menteri Desa dan PDTT RI atas “Komitmen dan Kerja Keras dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa” sehingga seluruh Desa di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai Status Berkembang, Maju, dan Mandiri, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.



FOTO PRESTASI DAN PENGHARGAAN



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat menerima penghargaan dari Pemprov Jatim



Foto: Istimewa (Dok Pemkab Sidoarjo)

Gus Muhdlor Dianugerahi Pemimpin Perubahan dari Kementerian PAN-RB



SIPPADU 2.0 Milik Pemkab Sidoarjo Raih Anugerah Inotek Award Tahun 2021



Lampiran 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. AHMAD MUHDLOR, S.IP.**
Jabatan : **BUPATI SIDOARJO**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sidoarjo, 9 November 2021

BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

AHMAD MUHDLOR, S.IP.

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP.



Lampiran 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha		
	Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	B
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	Nilai SAKIP Kabupaten	A
		Opini Atas Laporan BPK	WTP
		Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,73
		Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,25
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A- Sangat Baik
	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan		

	Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	1,00
		Indeks Gini	0,365
3	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,09
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	51,73
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,55
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,85
4	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,87
		Persentase Koperasi Berkualitas	21,84
		Persentase Desa Mandiri	10,25
	Tujuan 3 : Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	10,54
		Persentase Penduduk Miskin	5,71
5	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	89,17
6	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	93,78
	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan		
	Tujuan 4: Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	0,755
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,79
7	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,748

		Indeks Infrastruktur Pendidikan	82,53
		Indeks Infrastruktur Kesehatan	71,13
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Air	51,52
		Indeks Kualitas Udara	85,14
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,10
		Indeks Resiko Bencana	99,12
	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya		
	Tujuan 5 : Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,41
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,01
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,33
10	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,69
11	Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,32
	Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.		
	Tujuan 6 : Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	82,01
12		Indeks Toleransi	77,64

	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Pelestarian Budaya	60,32
13	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Rasa Aman	76,48

Lampiran 3
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.415.268.382.510,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	743.665.094.099,00	APBD
	Program Pengelolaan Pendidikan	670.891.220.106,00	APBD
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	43.158.302,00	APBD
	Program Pengembangan Kebudayaan	216.124.608,00	APBD
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	452.785.395,00	APBD
2	DINAS KESEHATAN	625.616.194.227,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	252.567.181.156,00	APBD
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	358.661.598.960,00	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.695.950.113,00	APBD
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	416.877.879,00	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.274.586.119,00	APBD
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	844.158.805.557,00	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	844.158.805.557,00	APBD
4	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	366.776.971.983,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.956.962.437,00	APBD
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	62.519.908.058,00	
	Program Penyelenggaraan Jalan	279.300.101.488,00	APBD

5	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA UANG	229.492.832.351,00	APBD
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.162.105.782,00	APBD
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	22.513.720.528,00	APBD
	Program Pengembangan Permukiman	23.104.811.473,00	APBD
	Program Penataan Bangunan Gedung	153.799.989.029,00	APBD
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.184.193.888,00	APBD
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	561.020.062,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	404.253.260,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.776.140.998,00	APBD
	Program Pengembangan Perumahan	4.351.709.231,00	APBD
	Program Kawasan Permukiman	468.000.000,00	APBD
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	62.512.500,00	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	104.375.600,00	APBD
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	35.594.305.002,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.155.825.179,00	APBD
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	14.438.479.823,00	APBD
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30.656.135.742,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.951.055.247,00	APBD
	Program Penanggulangan Bencana	2.372.985.271,00	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	15.332.095.224,00	APBD
8	DINAS SOSIAL	34.547.900.993,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.904.037.926,00	APBD

	Program Pemberdayaan Sosial	2.541.137.685,00	APBD
	Program Rehabilitasi Sosial	9.684.952.671,00	APBD
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	13.983.692.800,00	APBD
	Program Penanganan Bencana	329.082.678,00	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	104.997.233,00	APBD
9	DINAS TENAGA KERJA	14.953.296.314,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.492.301.974,00	APBD
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.056.348.178,00	APBD
	Program Penempatan Tenaga Kerja	305.521.529,00	APBD
	Program Hubungan Industrial	1.098.282.633,00	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	842.000,00	APBD
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	25.627.042.593,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.600.477.296,00	APBD
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	303.017.950,00	APBD
	Program Perlindungan Perempuan	1.144.549.970,00	APBD
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	296.810.458,00	APBD
	Program Perlindungan Khusus Anak	282.666.325,00	APBD
	Program Pengendalian Penduduk	1.145.870.193,00	APBD
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	14.374.300.401,00	
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	479.350.000,00	APBD
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	37.742.219.984,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.650.754.534,00	APBD
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	501.439.120,00	APBD
	Program Pengawasan Keamanan	162.700.000,00	APBD

	Pangan		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.229.154.466,00	APBD
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.051.959.308,00	APBD
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.122.573.016,00	APBD
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	79.852.625,00	
	Program Penyuluhan Pertanian	943.786.915,00	APBD
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	185.869.522.237,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.784.334.553,00	APBD
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	265.985.728,00	APBD
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.339.086.993,00	APBD
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	12.775.005.824,00	APBD
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1.806.906.400,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	166.345.127,00	APBD
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	377.290.640,00	APBD
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0,00	APBD
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	152.704.773,00	APBD
	Program Pengelolaan Persampahan	32.170.062.892,00	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	102.031.799.307,00	APBD

13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.513.215.573,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.054.847.316,00	APBD
	Program Pendaftaran Penduduk	283.518.354,00	APBD
	Program Pencatatan Sipil	396.186.400,00	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.778.663.503,00	APBD
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	16.240.641.178,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.676.522.513,00	APBD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.788.100.583,00	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.776.018.082,00	APBD
15	DINAS PERHUBUNGAN	52.036.618.704,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.582.056.007,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	30.838.112.712,00	APBD
	Program Pengelolaan Pelayaran	22.689.263,00	
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.593.760.722,00	APBD
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32.671.721.085,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.819.532.879,00	APBD
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6.380.855.950,00	APBD
	Program Aplikasi Informatika	11.669.109.902,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	542.222.354,00	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	260.000.000,00	APBD
17	DINAS KOPRASI DAN USAHA MIKRO	10.019.322.249,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.071.879.456,00	APBD
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan	186.752.395,00	APBD

	Koperasi		
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	138.825.146,00	APBD
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	904.153.394,00	APBD
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	63.272.205,00	APBD
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	1.011.035.171,00	
	Program Pengembangan Umkm	643.404.482,00	APBD
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.303.767.949,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.580.601.949,00	APBD
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.559.199.808,00	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	163.966.192,00	APBD
19	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	36.774.467.018,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.211.844.036,00	APBD
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.832.258.494,00	APBD
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	20.568.321.504,00	APBD
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	699.733.444,00	APBD
	Program Pemasaran Pariwisata	693.114.975,00	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	769.194.565,00	APBD
20	DINAS PEPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.863.910.376,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.901.280.476,00	APBD
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.570.967.875,00	
	Program Pengelolaan Arsip	391.662.025,00	APBD
21	DINAS PERIKANAN	39.219.447.559,00	APBD

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.251.639.461,00	APBD
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	567.632.547,00	APBD
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	28.390.541.995,00	APBD
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	78.299.870,00	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	931.333.686,00	APBD
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN	52.402.430.484,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.713.461.018,00	APBD
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	18.519.608.931,00	APBD
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	443.746.500,00	APBD
	Program Pengembangan Ekspor	879.001.088,00	APBD
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	132.537.280,00	APBD
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	6.414.075.667,00	APBD
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	250.000.000,00	APBD
23	SEKRETARIAT DAERAH	83.606.646.059,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.905.621.353,00	APBD
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	13.139.118.065,00	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	12.561.906.641,00	APBD
24	SEKRETARIAT DPRD	100.747.033.571,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61.778.865.689,00	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	38.968.167.882,00	APBD

25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.962.890.824,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.043.521.526,00	APBD
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.070.914.008,00	APBD
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.985.313.644,00	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	863.141.646,00	APBD
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	767.002.966.848,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.515.163.214,00	APBD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	750.421.604.438,00	APBD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.066.199.196,00	
27	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	37.442.045.164,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.921.599.053,00	APBD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.520.446.111,00	APBD
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	17.660.124.624,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.241.600.624,00	APBD
	Program Kepegawaian Daerah	3.137.208.732,00	APBD
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.281.315.268,00	APBD
29	INSPEKTORAT	15.894.038.390,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.172.416.465,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	302.182.425,00	APBD
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	419.439.500,00	APBD
30	KECAMATAN SIDOARJO	37.343.201.364,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.913.594.812,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.553.891.572,00	APBD



	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.614.529.459,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	118.678.095,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	52.742.426,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89.765.000,00	APBD
31	KECAMATAN CANDI	6.924.878.514,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.522.918.238,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	770.753.967,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	395.396.059,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.419.250,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	232.391.000,00	APBD
32	KECAMATAN BUDURAN	5.673.774.748,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.767.041.422,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	656.540.916,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	174.026.044,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.761.207,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.405.159,00	APBD
33	KECAMATAN WONOAYU	6.670.639.506,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.838.748.752,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.475.214.754,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	253.687.500,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	APBD

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102.988.500,00	APBD
34	KECAMATAN KRIAN	11.650.388.442,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.196.664.958,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	793.122.319,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.374.555.000,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	188.181.329,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	97.864.836,00	APBD
35	KECAMATAN PORONG	13.856.695.816,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.146.590.242,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.318.629.806,00	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.123.769.141,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	233.280.980,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.949.300,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.476.347,00	APBD
36	KECAMATAN KREMBUNG	6.717.247.780,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.869.858.046,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.633.884.762,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	202.527.972,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.977.000,00	APBD
37	KECAMATAN JABON	6.785.197.567,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.934.391.764,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.604.566.722,00	APBD

	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	222.838.452,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.769.465,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.631.164,00	APBD
38	KECAMATAN BALONGBENDO	6.269.916.060,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.166.021.591,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	898.572.508,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	157.039.461,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.282.500,00	APBD
39	KECAMATAN TARIK	5.744.607.686,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.817.755.441,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	627.867.245,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	211.760.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.350.000,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79.875.000,00	APBD
40	KECAMATAN TAMAN	24.173.521.918,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.866.851.048,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.439.589.001,00	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.615.005.475,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	219.658.447,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16.947.947,00	APBD

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.470.000,00	APBD
41	KECAMATAN WARU	8.783.519.779,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.767.718.586,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.393.978.585,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	571.431.150,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.988.967,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.402.491,00	APBD
42	KECAMATAN GEDANGAN	7.208.028.070,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.064.640.823,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.659.027.734,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	421.382.300,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.191.613,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.785.600,00	APBD
43	KECAMATAN SEDATI	8.108.476.584,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.713.232.363,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.244.796.721,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	136.772.500,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.700.000,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.975.000,00	APBD
44	KECAMATAN TANGGULANGIN	7.598.519.618,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.646.736.759,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.701.460.431,00	APBD

	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	242.897.428,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.425.000,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00	APBD
45	KECAMATAN TULANGAN	6.839.481.735,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.458.366.735,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	996.037.500,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	125.380.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	259.697.500,00	APBD
46	KECAMATAN PRAMBON	7.674.913.152,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.433.719.777,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.770.828.233,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	441.792.500,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.160.142,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.412.500,00	APBD
47	KECAMATAN SUKODONO	8.771.736.634,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.517.724.983,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.997.206.111,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	224.447.537,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.358.003,00	APBD

48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20.695.538.496,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.175.108.034,00	APBD
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.960.615.703,00	APBD
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.183.509.061,00	APBD
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.333.486.272,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	130.596.201,00	APBD
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.912.223.225,00	APBD
		5.376.155.180.617,00	

Lampiran 4
PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN %	TINGKAT KEBERHASILAN	KETERANGAN
	MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha					
	TUJUAN 1	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha				
	Indikator Tujuan		Indeks Reformasi Birokrasi	B	N/A		Belum Rilis
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	A	N/A		Belum Rilis
		2.	Opini Atas Laporan BPK	WTP	WTP	100	Berhasil
		3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,73	N/A		Belum Rilis
		4.	Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	N/A		Belum Rilis
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,25	2,37	72,92	Cukup
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Inovatif	90	Berhasil
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100,00	Berhasil
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A – (4,27) Sangat Baik	A – (4,3) Sangat Baik	100,7	Sangat Berhasil
	MISI 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan					
	TUJUAN 2	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan				
	Indikator Tujuan :	1.	Pertumbuhan Ekonomi	1	4,21	421,00	Sangat Berhasil
		2.	Indeks Gini	0,365	0,347	95,07	Berhasil



3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,09	16,83	104,60	Sangat Berhasil	
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	51,73	51,97	100,46	Sangat Berhasil	
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,55	-0,08	3,14	Kurang	Terjadi penurunan laju pertumbuhan karena lahan banyak beralih fungsi
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,85	0,85	100,00	Berhasil	
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,87	1,87	100,00	Berhasil	
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	21,84	21,84	100,00	Berhasil	
		3.	Persentase Desa Mandiri	10,25	10,25	100,00	Berhasil	
	TUJUAN 3	: Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan						
	Indikator Tujuan	1.	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	10,54	10,87	103,13	Sangat Berhasil	
		2.	Persentase Penduduk Miskin	5,71	5,93	103,85	Sangat Berhasil	
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	89,17	89,13	99,96	Berhasil	
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	93,78	94,07	99,69	Berhasil	
	MISI 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan						
	TUJUAN 4	: Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan						
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Infrastruktur	0,755	0,763	101,06	Sangat Berhasil	
		2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,79	59,81	100,03	Sangat Berhasil	
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,755	0,759	100,53	Sangat Berhasil	

		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	82,53	92,8	112,44	Sangat Berhasil	
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	71,13	67,91	95,47	Berhasil	
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	51,52	54,05	104,91	Sangat Berhasil	
		2.	Indeks Kualitas Udara	85,14	84,67	99,45	Berhasil	
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,1	23,72	87,53	Cukup	
		4.	Indeks Resiko Bencana	99,12	99,12	100,00	Berhasil	
	MISI 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya						
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya					
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,41	80,65	100,3	Sangat Berhasil	
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,01	14,94	100	Berhasil	
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,33	10,72	104	Sangat Berhasil	
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	73,69	74,06	101	Sangat Berhasil	
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,32	94,26	100	Berhasil	
	MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.						
	TUJUAN 6	:	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat					
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Kesalehan Sosial	82,01		0		
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	77,64	80,18	103	Sangat Berhasil	
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	60,32		0		
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	76,48	76,6	100,2	Sangat Berhasil	

Lampiran 5
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	
			ALOKASI (Rp)	%
	MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha		
	TUJUAN 1	: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha		
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1. Nilai SAKIP Kabupaten 2. Opini Atas Laporan BPK 3. Survey Eksternal Persepsi Korupsi 4. Status Kinerja LPPD 5. Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 6. Indeks Inovasi Daerah 7. Tingkat Maturitas SPIP	Rp 935.798.387.830	17,41%
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Rp 342.714.433.724	6,37%
	MISI 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan		
	TUJUAN 2	: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan		

3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Rp 182.442.332.994	3,39%
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri		
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.		
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi		
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	Rp 26.259.963.427	0,49%
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas		
		3.	Persentase Desa Mandiri		
	TUJUAN 3	:	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan		
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	Rp 14.953.296.314	0,28%
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	Rp 34.547.900.993	0,64%
	MISI 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan			
	TUJUAN 4	:	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan		
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp 2.522.018.047.661	46,91%
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan		
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan		
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	Rp 216.525.657.979	4,03%
		2.	Indeks Kualitas Udara		
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
		4.	Indeks Resiko Bencana		
	MISI 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya			
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya		
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rp 743.708.252.401	13,83%
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		

10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Rp 266.954.595.267	4,97%
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Rp 25.627.042.593	0,48%
	MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.			
	TUJUAN 6	:	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat		
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	Rp 21.364.448.499	0,40%
		2.	Indeks Pelestarian Budaya		
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	Rp 43.240.820.935	0,80%

Lampiran 6
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %	
	MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha								
	TUJUAN 1	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha							
1	Terselenggaranya a Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A	N/A		Rp 935.798.387.830	Rp 898.782.418.952	96,04%
		2.	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	100,00			
		3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,73	-				
		4.	Status Kinerja LPPD	Katagori	Sangat Tinggi	N/A				
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,25	2,37	72,92			
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Katagori	Sangat Inovatif	Inovatif	90,00			
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Katagori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100,00			
2	Terselenggaranya a Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Katagori	A- Sangat Baik	A- Sangat Baik	100,00	Rp 342.714.433.724	Rp 308.018.647.605	89,88%
	MISI 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan								
	TUJUAN 2	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan							
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,09	16,83	104,60	Rp 182.442.332.994	Rp 172.812.401.079	94,72%
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	51,73	51,97	100,46			
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	2,55	-0,08	-3,14			



		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0,85	0,85	100,00			
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	1,87	1,87	100,00	Rp 26.259.963.427	Rp 25.416.887.182	96,79%
2.		Persentase Koperasi Berkualitas	%	21,84	21,84	100,00				
3.		Persentase Desa Mandiri	%	10,25	10,25	100,00				
	TUJUAN 3	:	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan							
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	89,17	89,13	99,96	Rp 14.953.296.314	Rp 14.421.642.792	96,44%
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	93,78	94,07	100,31	Rp 34.547.900.993	Rp 33.803.921.167	97,85%
	MISI 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan								
	TUJUAN 4	:	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan							
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,755	0,759	100,53	Rp 2.522.018.047.661	Rp 2.259.379.315.873	89,59%
2.		Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	82,53	92,8	112,44				
3.		Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	71,13	67,91	95,47				
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,52	54,05	104,91	Rp 216.525.657.979	Rp 201.600.898.271	93,11%
2.		Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,14	84,67	99,45				
3.		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,1	23,72	87,53				
4.		Indeks Resiko Bencana	Indeks	99,12	99,12	100,00				
	MISI 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya								
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya							
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,01	14,94	99,53	Rp 743.708.252.401	Rp 686.310.365.440	92,28%
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,33	10,72	103,78			
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,69	74,06	100,50	Rp 266.954.595.267	Rp 254.029.946.014	95,16%
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,32	94,26	99,94	Rp 25.627.042.593	Rp 23.123.054.837	90,23%
	MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.								
	TUJUAN 6	:	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat							
12.	Berkembangnya	1.	Indeks Toleransi	Indeks	77,64	80,18	103,27	Rp	Rp	95,32%

	nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	2.	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	60,32		0,00	21.364.448.499	20.364.560.985	
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	Indeks	76,48	76,6	100,16	Rp 43.240.820.935	Rp 41.747.532.050	96,55%

Lampiran 7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
	MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
	TUJUAN 1	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha		
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	0	
		2.	Opini Atas Laporan BPK	100	
		3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	0	
		4.	Status Kinerja LPPD	0	
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	72,92	
		6.	Indeks Inovasi Daerah	90	
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	100	
		Tingkat Pencapaian Sasaran 1		51,85	96,04
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	100	
		Tingkat Pencapaian Sasaran 2		100	89,88
	MISI 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan			

	TUJUAN 2	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan			
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	105		
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	100		
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	95,00		
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 3		100,02	94,72	5,30
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	100		
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	100		
		3.	Persentase Desa Mandiri	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 4		100	96,79	3,21
	TUJUAN 3	:	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan			
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 5		100	96,44	3,52
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 6		100	97,85	2,46
	MISI 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan				
	TUJUAN 4	:	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	101		
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	112		
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	95		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 7		103	89,59	13,23
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan	1.	Indeks Kualitas Air	105		
		2.	Indeks Kualitas Udara	99		

	Penanganan Terhadap Bencana	3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	88		
		4.	Indeks Resiko Bencana	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 8		98	93,11	4,86
	MISI 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya				
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya			
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	100		
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	104		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 9		102	92,28	9,37
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	101		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 10		101	95,16	5,34
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 11		100	90,23	9,77
	MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.				
	TUJUAN 6	:	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat			
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	103		
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	0		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 12		0	0,00	0,00
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	100		
		Tingkat Pencapaian Sasaran 13		100	90,49	9,66

Lampiran 8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM PER ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021

VISI : Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

NO	UNIT KERJA/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.415.268.382.510,00	1.329.848.899.630,07	93,96
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	743.665.094.099,00	686.346.399.174,00	
	Program Pengelolaan Pendidikan	670.891.220.106,00	642.935.565.046,07	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	43.158.302,00	36.033.734,00	
	Program Pengembangan Kebudayaan	216.124.608,00	190.429.176,00	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	452.785.395,00	340.472.500,00	
2	DINAS KESEHATAN	625.616.194.227,00	562.025.576.034,02	89,84
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	252.567.181.156,00	240.695.897.203,12	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	358.661.598.960,00	307.995.630.019,90	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.695.950.113,00	11.308.113.401,00	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	416.877.879,00	275.443.073,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.274.586.119,00	1.750.492.337,00	
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	844.158.805.557,00	745.361.579.900,00	88,30
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	844.158.805.557,00	745.361.579.900,00	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	366.776.971.983,00	300.621.519.091,00	81,96
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.956.962.437,00	22.108.849.672,00	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	62.519.908.058,00	55.218.501.025,00	
	Program Penyelenggaraan Jalan	279.300.101.488,00	223.294.168.394,00	
5	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA UANG	229.492.832.351,00	215.785.952.525,00	94,03



	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.162.105.782,00	7.378.821.448,00	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	22.513.720.528,00	17.992.343.804,00	
	Program Pengembangan Permukiman	23.104.811.473,00	18.198.309.568,00	
	Program Penataan Bangunan Gedung	153.799.989.029,00	152.760.475.328,00	
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.184.193.888,00	2.117.242.201,00	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	561.020.062,00	502.235.040,00	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	404.253.260,00	391.703.500,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.776.140.998,00	11.983.415.202,00	
	Program Pengembangan Perumahan	4.351.709.231,00	3.954.722.178,00	
	Program Kawasan Permukiman	468.000.000,00	377.780.000,00	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	62.512.500,00	49.556.000,00	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	104.375.600,00	79.348.256,00	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	35.594.305.002,00	34.856.272.406,00	97,93
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.155.825.179,00	20.565.665.979,00	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	14.438.479.823,00	14.290.606.427,00	
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30.656.135.742,00	28.948.244.683,00	94,43
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.951.055.247,00	12.524.903.445,00	
	Program Penanggulangan Bencana	2.372.985.271,00	2.168.705.447,00	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	15.332.095.224,00	14.254.635.791,00	
8	DINAS SOSIAL	34.547.900.993,00	33.803.921.167,00	97,85
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.904.037.926,00	7.611.667.635,00	
	Program Pemberdayaan Sosial	2.541.137.685,00	2.480.092.850,00	
	Program Rehabilitasi Sosial	9.684.952.671,00	9.639.793.635,00	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	13.983.692.800,00	13.655.565.997,00	
	Program Penanganan Bencana	329.082.678,00	318.678.000,00	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	104.997.233,00	98.123.050,00	
9	DINAS TENAGA KERJA	14.953.296.314,00	14.421.642.792,00	96,44



	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.492.301.974,00	8.092.983.892,00	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.056.348.178,00	4.943.216.000,00	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	305.521.529,00	304.204.200,00	
	Program Hubungan Industrial	1.098.282.633,00	1.080.438.700,00	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	842.000,00	800.000,00	
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	25.627.042.593,00	23.123.054.837,00	90,23
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.600.477.296,00	7.162.367.118,00	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	303.017.950,00	282.000.980,00	
	Program Perlindungan Perempuan	1.144.549.970,00	835.312.499,00	
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	296.810.458,00	270.047.169,00	
	Program Perlindungan Khusus Anak	282.666.325,00	101.459.055,00	
	Program Pengendalian Penduduk	1.145.870.193,00	1.091.168.528,00	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	14.374.300.401,00	12.932.298.988,00	
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	479.350.000,00	448.400.500,00	
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	37.742.219.984,00	34.728.658.619,00	92,02
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.650.754.534,00	26.606.722.908,00	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	501.439.120,00	480.686.282,00	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	162.700.000,00	160.927.500,00	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.229.154.466,00	1.691.303.837,00	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.051.959.308,00	3.802.837.893,00	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.122.573.016,00	1.112.749.589,00	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	79.852.625,00	78.606.556,00	
	Program Penyuluhan Pertanian	943.786.915,00	794.824.054,00	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	185.869.522.237,00	172.652.653.588,00	92,89
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.784.334.553,00	32.963.771.828,00	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	265.985.728,00	214.771.700,00	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.339.086.993,00	2.012.783.955,00	

	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	12.775.005.824,00	11.150.500.046,00	
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1.806.906.400,00	751.652.651,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	166.345.127,00	150.666.432,00	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	377.290.640,00	357.239.524,00	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0,00	0,00	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	152.704.773,00	136.778.067,00	
	Program Pengelolaan Persampahan	32.170.062.892,00	27.249.510.332,00	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	102.031.799.307,00	97.664.979.053,00	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.513.215.573,00	14.263.922.826,00	91,95
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.054.847.316,00	11.956.731.411,00	
	Program Pendaftaran Penduduk	283.518.354,00	235.167.294,00	
	Program Pencatatan Sipil	396.186.400,00	340.957.124,00	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.778.663.503,00	1.731.066.997,00	
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	16.240.641.178,00	15.702.483.332,00	96,69
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.676.522.513,00	7.386.130.455,00	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.788.100.583,00	6.645.495.221,00	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.776.018.082,00	1.670.857.656,00	
15	DINAS PERHUBUNGAN	52.036.618.704,00	46.679.069.291,00	89,70
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.582.056.007,00	16.828.278.608,00	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	30.838.112.712,00	26.405.604.699,00	
	Program Pengelolaan Pelayaran	22.689.263,00	22.450.000,00	
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.593.760.722,00	3.422.735.984,00	
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32.671.721.085,00	30.056.895.530,00	92,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.819.532.879,00	12.815.179.077,00	



	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	6.380.855.950,00	5.140.676.107,00	
	Program Aplikasi Informatika	11.669.109.902,00	11.341.073.252,00	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	542.222.354,00	513.571.670,00	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	260.000.000,00	246.395.424,00	
17	DINAS KOPRASI DAN USAHA MIKRO	10.019.322.249,00	9.714.403.850,00	96,96
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.071.879.456,00	6.935.945.400,00	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	186.752.395,00	184.329.900,00	
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	138.825.146,00	138.624.400,00	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	904.153.394,00	865.948.400,00	
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	63.272.205,00	59.657.900,00	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	1.011.035.171,00	897.897.350,00	
	Program Pengembangan Umkm	643.404.482,00	632.000.500,00	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.303.767.949,00	15.526.232.270,00	95,23
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.580.601.949,00	13.841.811.570,00	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.559.199.808,00	1.520.790.800,00	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	163.966.192,00	163.629.900,00	
19	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	36.774.467.018,00	34.780.951.442,00	94,58
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.211.844.036,00	10.712.373.872,00	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.832.258.494,00	2.616.337.455,00	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	20.568.321.504,00	19.383.514.639,00	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	699.733.444,00	687.569.777,00	
	Program Pemasaran Pariwisata	693.114.975,00	645.077.300,00	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	769.194.565,00	736.078.399,00	
20	DINAS PEPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.863.910.376,00	9.334.600.388,00	94,63
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.901.280.476,00	7.426.778.807,00	
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.570.967.875,00	1.518.533.887,00	
	Program Pengelolaan Arsip	391.662.025,00	389.287.694,00	



21	DINAS PERIKANAN	39.219.447.559,00	38.355.956.154,00	97,80
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.251.639.461,00	8.539.525.624,00	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	567.632.547,00	555.889.200,00	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	28.390.541.995,00	28.279.552.728,00	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	78.299.870,00	72.337.726,00	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	931.333.686,00	908.650.876,00	
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN	52.402.430.484,00	49.420.602.594,00	94,31
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.713.461.018,00	25.060.479.143,00	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	18.519.608.931,00	17.249.558.037,00	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	443.746.500,00	434.359.000,00	
	Program Pengembangan Ekspor	879.001.088,00	873.998.356,00	
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	132.537.280,00	125.683.420,00	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	6.414.075.667,00	5.381.577.568,00	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.575.000,00	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	250.000.000,00	247.372.070,00	
23	SEKRETARIAT DAERAH	83.606.646.059,00	75.778.652.666,00	90,64
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.905.621.353,00	52.805.635.532,00	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	13.139.118.065,00	11.701.524.394,00	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	12.561.906.641,00	11.271.492.740,00	
24	SEKRETARIAT DPRD	100.747.033.571,00	80.215.063.377,00	79,62
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61.778.865.689,00	51.758.990.797,00	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	38.968.167.882,00	28.456.072.580,00	
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.962.890.824,00	18.030.504.914,00	95,08
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.043.521.526,00	11.349.593.407,00	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.070.914.008,00	2.013.917.875,00	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.985.313.644,00	3.880.040.632,00	

	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	863.141.646,00	786.953.000,00	
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	767.002.966.848,00	743.619.232.335,07	96,95
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.515.163.214,00	13.087.201.919,00	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	750.421.604.438,00	728.181.098.983,07	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.066.199.196,00	2.350.931.433,00	
27	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	37.442.045.164,00	36.226.761.533,00	96,75
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.921.599.053,00	30.079.818.473,00	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.520.446.111,00	6.146.943.060,00	
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	17.660.124.624,00	15.984.241.932,00	90,51
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.241.600.624,00	10.956.080.387,00	
	Program Kepegawaian Daerah	3.137.208.732,00	2.000.471.895,00	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.281.315.268,00	3.027.689.650,00	
29	INSPEKTORAT	15.894.038.390,00	15.312.891.575,00	96,34
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.172.416.465,00	14.653.638.275,00	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	302.182.425,00	267.633.800,00	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	419.439.500,00	391.619.500,00	
30	KECAMATAN SIDOARJO	37.343.201.364,00	34.768.996.563,00	93,11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.913.594.812,00	25.751.305.671,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.553.891.572,00	1.781.597.311,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.614.529.459,00	7.041.345.081,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	118.678.095,00	116.806.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	52.742.426,00	20.480.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	89.765.000,00	57.462.500,00	
31	KECAMATAN CANDI	6.924.878.514,00	6.441.672.729,00	93,02
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.522.918.238,00	5.248.762.976,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	770.753.967,00	716.780.253,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	395.396.059,00	302.258.500,00	



	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.419.250,00	3.350.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	232.391.000,00	170.521.000,00	
32	KECAMATAN BUDURAN	5.673.774.748,00	5.254.489.939,00	92,61
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.767.041.422,00	4.431.874.108,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	656.540.916,00	623.365.931,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	174.026.044,00	155.800.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.761.207,00	9.734.900,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.405.159,00	33.715.000,00	
33	KECAMATAN WONOAYU	6.670.639.506,00	6.429.983.837,00	96,39
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.838.748.752,00	4.634.424.159,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.475.214.754,00	1.458.953.278,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	253.687.500,00	233.693.900,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102.988.500,00	102.912.500,00	
34	KECAMATAN KRIAN	11.650.388.442,00	11.282.459.301,00	96,84
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.196.664.958,00	8.964.392.163,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	793.122.319,00	733.859.138,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.374.555.000,00	1.347.959.500,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	188.181.329,00	163.373.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	97.864.836,00	72.875.500,00	
35	KECAMATAN PORONG	13.856.695.816,00	13.114.414.282,00	94,64
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.146.590.242,00	8.623.369.497,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.318.629.806,00	2.182.958.285,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.123.769.141,00	2.083.282.700,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	233.280.980,00	192.750.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.949.300,00	5.349.300,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.476.347,00	26.704.500,00	



36	KECAMATAN KREMBUNG	6.717.247.780,00	6.379.029.527,00	94,96
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.869.858.046,00	4.579.109.590,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.633.884.762,00	1.600.431.637,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	202.527.972,00	189.188.300,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.977.000,00	10.300.000,00	
37	KECAMATAN JABON	6.785.197.567,00	6.095.492.527,00	89,84
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.934.391.764,00	4.567.305.877,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.604.566.722,00	1.390.502.150,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	222.838.452,00	127.707.500,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.769.465,00	5.550.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.631.164,00	4.427.000,00	
38	KECAMATAN BALONGBENDO	6.269.916.060,00	6.006.583.522,00	95,80
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.166.021.591,00	5.017.780.946,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	898.572.508,00	790.244.726,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	157.039.461,00	150.308.650,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.282.500,00	48.249.200,00	
39	KECAMATAN TARIK	5.744.607.686,00	5.411.244.396,00	94,20
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.817.755.441,00	4.627.154.951,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	627.867.245,00	575.444.445,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	211.760.000,00	136.045.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.350.000,00	2.520.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79.875.000,00	70.080.000,00	
40	KECAMATAN TAMAN	24.173.521.918,00	22.444.335.667,00	92,85
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.866.851.048,00	15.344.787.312,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.439.589.001,00	2.346.432.700,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.615.005.475,00	4.547.937.155,00	



	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	219.658.447,00	177.083.500,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16.947.947,00	13.250.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.470.000,00	14.845.000,00	
41	KECAMATAN WARU	8.783.519.779,00	8.071.414.501,00	91,89
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.767.718.586,00	5.579.174.481,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.393.978.585,00	1.915.886.196,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	571.431.150,00	532.609.869,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.988.967,00	6.688.964,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.402.491,00	37.054.991,00	
42	KECAMATAN GEDANGAN	7.208.028.070,00	6.886.325.660,60	95,54
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.064.640.823,00	4.776.461.385,60	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.659.027.734,00	1.635.988.150,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	421.382.300,00	412.343.625,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.191.613,00	2.030.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.785.600,00	59.502.500,00	
43	KECAMATAN SEDATI	8.108.476.584,00	7.499.806.471,00	92,49
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.713.232.363,00	5.372.737.299,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.244.796.721,00	2.039.479.172,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	136.772.500,00	75.957.500,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.700.000,00	3.400.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.975.000,00	8.232.500,00	
44	KECAMATAN TANGGULANGIN	7.598.519.618,00	6.751.955.874,00	88,86
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.646.736.759,00	5.194.699.763,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.701.460.431,00	1.417.231.111,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	242.897.428,00	140.025.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.425.000,00	0,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	



45	KECAMATAN TULANGAN	6.839.481.735,00	6.602.126.682,00	96,53
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.458.366.735,00	5.245.521.742,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	996.037.500,00	974.003.440,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	125.380.000,00	122.904.000,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	259.697.500,00	259.697.500,00	
46	KECAMATAN PRAMBON	7.674.913.152,00	7.180.562.457,00	93,56
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.433.719.777,00	5.113.412.422,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.770.828.233,00	1.672.186.135,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	441.792.500,00	373.733.100,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.160.142,00	679.000,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.412.500,00	20.551.800,00	
47	KECAMATAN SUKODONO	8.771.736.634,00	8.248.665.189,00	94,04
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.517.724.983,00	6.069.314.989,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.997.206.111,00	1.962.342.200,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	224.447.537,00	186.848.500,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.358.003,00	30.159.500,00	
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20.695.538.496,00	19.833.659.309,00	95,84
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.175.108.034,00	6.658.834.043,00	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.960.615.703,00	1.731.819.326,00	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	5.183.509.061,00	5.169.397.220,00	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.333.486.272,00	4.261.063.220,00	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	130.596.201,00	123.295.000,00	



	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.912.223.225,00	1.889.250.500,00	
		5.376.155.180.617,00	4.939.883.659.714,76	91,89

Lampiran 9
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN REKENING	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	4,058,099,090,414.00	4,422,599,399,218.15	-364,500,308,804.15	108.98
41	Pendapatan Asli Daerah	1,531,360,832,030.00	1,809,832,433,911.15	-278,471,601,881.15	118.18
411	Hasil Pajak Daerah	849,455,000,000.00	929,261,529,986.45	-79,806,529,986.45	109.40
41101	Pajak Hotel	9,700,000,000.00	11,104,965,643.00	-1,404,965,643.00	114.48
41102	Pajak Restoran	62,000,000,000.00	64,616,576,015.00	-2,616,576,015.00	104.22
41103	Pajak Hiburan	2,730,000,000.00	2,814,119,899.00	-84,119,899.00	103.08
41104	Pajak Reklame	14,000,000,000.00	14,690,375,957.00	-690,375,957.00	104.93
41105	Pajak Penerangan Jalan	313,000,000,000.00	305,298,678,427.45	7,701,321,572.55	97.54
41107	Pajak Parkir	15,000,000,000.00	15,821,168,400.00	-821,168,400.00	105.47
41108	Pajak Air Tanah	2,025,000,000.00	2,575,219,356.00	-550,219,356.00	127.17
41112	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	211,000,000,000.00	229,810,879,995.00	-18,810,879,995.00	108.92
41113	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	220,000,000,000.00	282,529,546,294.00	-62,529,546,294.00	128.42
412	Hasil Retribusi Daerah	55,980,517,525.00	58,931,135,490.00	-2,950,617,965.00	105.27
41201	Retribusi Jasa Umum	26,389,800,000.00	28,668,170,054.00	-2,278,370,054.00	108.63
41202	Retribusi Jasa Usaha	7,784,538,250.00	3,975,864,077.00	3,808,674,173.00	51.07
41203	Retribusi Perizinan Tertentu	21,806,179,275.00	26,287,101,359.00	-4,480,922,084.00	120.55
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37,626,054,550.00	37,626,054,550.00	0.00	100.00
41301	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	37,626,054,550.00	37,626,054,550.00	0.00	100.00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	588,299,259,955.00	784,013,713,884.70	-195,714,453,929.70	133.27
41401	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atau Angsuran Cicilan	396,371,500.00	1,538,252,711.00	-1,141,881,211.00	388.08
41402	Penerimaan Jasa Giro	5,138,501,606.00	5,446,634,576.28	-308,132,970.28	106.00
41403	Pendapatan Bunga Deposito	52,065,944,716.00	49,998,533,959.19	2,067,410,756.81	96.03
41404	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	11,492,260.00	14,730,260.00	-3,238,000.00	128.18
41406	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	330,193,840.00	1,071,215,269.60	-741,021,429.60	324.42
41407	Pendapatan Denda Pajak	1,263,216,561.00	1,545,535,986.00	-282,319,425.00	122.35
41408	Pendapatan Denda Retribusi	185,344,502.00	325,741,443.00	-140,396,941.00	175.75
41410	Pendapatan Dari Pengembalian	4,219,647,068.00	8,516,791,911.87	-4,297,144,843.87	201.84
41414	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	188,000,000.00	151,447,243.00	36,552,757.00	80.56
41415	Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan)	3,898,130,000.00	6,542,073,743.00	-2,643,943,743.00	167.83
41416	Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama	608,848,832.00	758,797,604.00	-149,948,772.00	124.63
41417	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	519,993,569,070.00	707,529,334,050.32	-187,535,764,980.32	136.07
41423	Penerimaan Lain-lain	0.00	91,004,127.44	-91,004,127.44	#VALUE!



41431	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati	0.00	483,621,000.00	-483,621,000.00	#VALUE!
42	Dana Perimbangan	1,694,744,640,648.00	1,711,271,242,511.00	-16,526,601,863.00	100.98
421	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	143,199,349,000.00	173,396,948,566.00	-30,197,599,566.00	121.09
42101	Bagi Hasil Pajak	122,763,886,000.00	138,962,730,155.00	-16,198,844,155.00	113.20
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20,435,463,000.00	34,434,218,411.00	-13,998,755,411.00	168.50
422	Dana Alokasi Umum	1,157,958,587,000.00	1,149,801,473,000.00	8,157,114,000.00	99.30
42201	Dana Alokasi Umum	1,157,958,587,000.00	1,149,801,473,000.00	8,157,114,000.00	99.30
423	Dana Alokasi Khusus	393,586,704,648.00	388,072,820,945.00	5,513,883,703.00	98.60
42301	Dana Alokasi Khusus	59,298,215,000.00	42,884,335,429.00	16,413,879,571.00	72.32
42302	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	334,288,489,648.00	345,188,485,516.00	-10,899,995,868.00	103.26
43	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	831,993,617,736.00	901,495,722,796.00	-69,502,105,060.00	108.35
431	Pendapatan Hibah	166,463,900,000.00	162,996,436,500.00	3,467,463,500.00	97.92
43101	Pendapatan hibah dari Pemerintah	0.00	3,158,648,500.00	-3,158,648,500.00	#VALUE!
43102	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur	166,463,900,000.00	159,837,788,000.00	6,626,112,000.00	96.02
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	264,780,496,236.00	339,339,055,996.00	-74,558,559,760.00	128.16
43301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	264,780,496,236.00	339,339,055,996.00	-74,558,559,760.00	128.16
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	387,744,706,000.00	386,155,714,800.00	1,588,991,200.00	99.59
43401	Dana Penyesuaian	387,744,706,000.00	386,155,714,800.00	1,588,991,200.00	99.59
435	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13,004,515,500.00	13,004,515,500.00	0.00	100.00
43501	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Timur	13,004,515,500.00	13,004,515,500.00	0.00	100.00
436	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	#VALUE!
43602	Pendapatan Lainnya -LRA	0.00	0.00	0.00	#VALUE!
	Jumlah	4,058,099,090,414.00	4,422,599,399,218.15	-364,500,308,804.15	108.98
5	BELANJA	5,182,074,462,157.57	4,441,673,370,394.65	740,401,091,762.92	85.71
51	Belanja Tidak Langsung	2,619,724,799,549.81	2,349,232,579,995.94	270,492,219,553.87	89.67
511	Belanja Pegawai	1,403,510,590,886.30	1,286,795,633,705.61	116,714,957,180.69	91.68
51101	Gaji dan Tunjangan	1,048,219,600,987.00	973,637,509,919.00	74,582,091,068.00	92.88
51102	Tambahan Penghasilan PNS	316,306,893,000.00	281,539,884,695.61	34,767,008,304.39	89.01
51103	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	13,105,625,897.80	11,893,946,600.00	1,211,679,297.80	90.75
51105	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	23,062,200,000.00	17,673,143,226.00	5,389,056,774.00	76.63
51106	Insentif pemungutan Retribusi Daerah	2,816,271,001.50	2,051,149,265.00	765,121,736.50	72.83
513	Belanja Subsidi	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00
51301	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	0.00
514	Belanja Hibah	290,233,862,550.00	258,000,874,222.00	32,232,988,328.00	88.89
51401	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	102,352,572,550.00	102,352,568,850.00	3,700.00	100.00
51404	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	161,182,152,000.00	129,059,970,472.00	32,122,181,528.00	80.07
51405	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	25,189,550,000.00	25,078,746,900.00	110,803,100.00	99.56
51408	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1,509,588,000.00	1,509,588,000.00	0.00	100.00



515	Belanja Bantuan Sosial	92,385,453,000.00	86,331,775,000.00	6,053,678,000.00	93.45
51501	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat	12,298,113,000.00	11,972,695,000.00	325,418,000.00	97.35
51502	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	77,087,340,000.00	74,310,080,000.00	2,777,260,000.00	96.40
51503	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	3,000,000,000.00	49,000,000.00	2,951,000,000.00	1.63
516	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	92,771,858,152.00	92,531,238,338.00	240,619,814.00	99.74
51603	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	84,945,500,000.00	84,722,265,404.00	223,234,596.00	99.74
51604	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	#VALUE!
51605	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5,598,051,752.00	5,580,666,534.00	17,385,218.00	99.69
51606	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi	2,228,306,400.00	2,228,306,400.00	0.00	100.00
517	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	500,265,955,180.18	493,492,244,936.60	6,773,710,243.58	98.65
51703	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	500,265,955,180.18	493,492,244,936.60	6,773,710,243.58	98.65
518	Belanja Tidak Terduga	240,307,079,781.33	132,080,813,793.73	108,226,265,987.60	54.96
51801	Belanja Tidak Terduga	240,307,079,781.33	132,080,813,793.73	108,226,265,987.60	54.96
52	Belanja Langsung	2,562,349,662,607.76	2,092,440,790,398.71	469,908,872,209.05	81.66
521	Belanja Pegawai	293,025,497,180.60	274,672,203,103.64	18,353,294,076.96	93.74
52101	Honorarium PNS	47,065,395,029.00	38,043,814,424.00	9,021,580,605.00	80.83
52102	Honorarium Non PNS	151,156,926,700.00	146,387,199,566.00	4,769,727,134.00	96.84
52103	Uang Lembur	1,588,282,000.00	887,019,850.00	701,262,150.00	55.85
52105	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat (dialihkan ke blj. barang/jasa)	0.00	0.00	0.00	#VALUE!
52106	Belanja Pegawai Dana BOS Daerah	21,824,442,000.00	20,861,118,000.00	963,324,000.00	95.59
52107	Belanja Pegawai BLUD	63,498,406,451.60	61,668,874,263.64	1,829,532,187.96	97.12
52108	Belanja Pegawai Dana BOS Reguler	7,892,045,000.00	6,824,177,000.00	1,067,868,000.00	86.47
522	Belanja Barang dan Jasa	1,497,967,754,184.95	1,298,515,715,895.60	199,452,038,289.35	86.69
52201	Belanja Bahan Pakai Habis	89,305,336,699.00	73,915,658,684.00	15,389,678,015.00	82.77
52202	Belanja Bahan/Material	40,239,820,750.00	28,766,548,661.00	11,473,272,089.00	71.49
52203	Belanja Jasa Kantor	245,077,609,658.00	218,502,692,456.00	26,574,917,202.00	89.16
52204	Belanja Premi Asuransi	53,391,575,004.00	39,295,525,112.00	14,096,049,892.00	73.60
52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13,174,638,988.00	9,440,509,272.00	3,734,129,716.00	71.66
52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,749,591,904.00	12,316,640,081.00	2,432,951,823.00	83.50
52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,389,246,051.00	2,966,997,422.00	1,422,248,629.00	67.60
52208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	450,940,200.00	281,482,000.00	169,458,200.00	62.42
52209	Belanja Sewa Alat Berat	68,019,000.00	10,605,000.00	57,414,000.00	15.59
52210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,399,569,000.00	3,136,297,182.00	1,263,271,818.00	71.29
52211	Belanja Makanan Dan Minuman	47,182,367,572.00	33,995,519,289.00	13,186,848,283.00	72.05
52212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	749,177,500.00	643,665,250.00	105,512,250.00	85.92



52213	Belanja Pakaian Kerja/Perlengkapan Kerja Lapangan	2,750,297,410.00	2,144,900,980.00	605,396,430.00	77.99
52214	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	356,750,000.00	309,300,000.00	47,450,000.00	86.70
52215	Belanja Perjalanan Dinas	113,445,763,624.37	67,798,079,796.00	45,647,683,828.37	59.76
52216	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	250,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	60.00
52217	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	9,635,606,338.00	6,934,778,001.00	2,700,828,337.00	71.97
52220	Belanja Pemeliharaan	80,588,467,607.00	66,954,574,187.00	13,633,893,420.00	83.08
52221	Belanja Jasa Konsultansi	24,483,787,490.00	20,672,456,099.00	3,811,331,391.00	84.43
52222	Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Daerah	40,824,703,000.00	39,562,094,675.00	1,262,608,325.00	96.91
52223	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49,857,575,183.00	37,501,533,412.00	12,356,041,771.00	75.22
52224	Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat/Pihak Ketiga	373,500,000.00	370,865,000.00	2,635,000.00	99.29
52225	Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan	290,000,000.00	178,430,000.00	111,570,000.00	61.53
52226	Belanja Penyedia Jasa	30,237,319,750.00	27,310,187,240.00	2,927,132,510.00	90.32
52227	Belanja barang dan jasa BLUD	443,240,096,900.58	426,154,753,082.60	17,085,343,817.98	96.15
52228	Belanja Pelayanan kesehatan Masyarakat	17,315,311,160.00	16,086,401,310.00	1,228,909,850.00	92.90
52229	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16,376,459,552.00	11,384,175,624.00	4,992,283,928.00	69.52
52230	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4,102,225,000.00	3,867,300,000.00	234,925,000.00	94.27
52231	Belanja Khusus Pengawasan	132,421,300.00	70,000,000.00	62,421,300.00	52.86
52232	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Reguler	146,847,877,544.00	144,214,146,080.00	2,633,731,464.00	98.21
52233	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	2,442,200,000.00	2,351,600,000.00	90,600,000.00	96.29
52234	Belanja rumah tangga KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD	1,239,500,000.00	1,228,000,000.00	11,500,000.00	99.07
523	Belanja Modal	771,356,411,242.21	519,252,871,399.47	252,103,539,842.74	67.32
52301	Belanja Modal Pengadaan Tanah	86,154,623,308.00	21,840,061,455.00	64,314,561,853.00	25.35
52302	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	2,107,218,500.00	1,268,509,000.00	838,709,500.00	60.20
52303	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	26,304,516,500.00	22,892,503,000.00	3,412,013,500.00	87.03
52304	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1,264,100,400.00	269,300,300.00	994,800,100.00	21.30
52305	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	250,000,000.00	214,390,990.00	35,609,010.00	85.76
52308	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	191,284,775.00	163,586,150.00	27,698,625.00	85.52
52309	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	131,570,400.00	125,314,050.00	6,256,350.00	95.24
52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9,725,028,772.00	6,022,137,235.00	3,702,891,537.00	61.92
52311	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,889,496,790.00	4,124,298,926.00	765,197,864.00	84.35
52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18,289,957,925.00	16,255,042,163.00	2,034,915,762.00	88.87
52313	Belanja Modal Pengadaan Meubeuleur	10,027,038,138.00	9,394,754,600.00	632,283,538.00	93.69
52314	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	293,863,700.00	279,186,840.00	14,676,860.00	95.01
52315	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga/Gedung Kantor/Gudang	114,286,000.00	105,170,000.00	9,116,000.00	92.02
52316	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,578,874,815.00	5,138,386,998.00	2,440,487,817.00	67.80
52317	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	366,485,600.00	209,312,500.00	157,173,100.00	57.11



52318	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1,324,960,200.00	1,074,772,933.00	250,187,267.00	81.12
52319	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	16,199,512,604.00	11,456,399,230.00	4,743,113,374.00	70.72
52320	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	9,360,900,490.00	8,281,183,726.00	1,079,716,764.00	88.47
52321	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	125,832,047,453.00	69,059,605,437.00	56,772,442,016.00	54.88
52322	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	10,408,437,568.00	8,146,494,680.00	2,261,942,888.00	78.27
52323	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	41,529,270,760.00	33,984,272,989.00	7,544,997,771.00	81.83
52324	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	40,947,753,749.00	22,179,738,922.00	18,768,014,827.00	54.17
52325	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2,291,864,900.00	2,025,229,831.00	266,635,069.00	88.37
52326	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	162,448,068,965.00	105,322,853,162.00	57,125,215,803.00	64.83
52327	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	793,900,475.00	749,086,218.00	44,814,257.00	94.36
52329	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	468,800,000.00	0.00	468,800,000.00	0.00
52330	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1,216,000.00	1,200,000.00	16,000.00	98.68
52331	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1,736,815,242.00	1,618,626,322.00	118,188,920.00	93.20
52332	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perindustrian	46,200,000.00	45,100,000.00	1,100,000.00	97.62
52336	Belanja Modal BLUD	150,319,293,142.21	132,120,424,798.47	18,198,868,343.74	87.89
52337	Belanja Modal Dana Bos Daerah	18,845,599,000.00	18,087,166,250.00	758,432,750.00	95.98
52338	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembelajaran Sekolah	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	100.00
52339	Belanja Modal Pengadaan alat-alat Kesehatan	0.00	0.00	0.00	#VALUE!
52340	Belanja Modal BOSREG	21,039,425,071.00	16,725,522,694.00	4,313,902,377.00	79.50
52341	Belanja Modal Pengadaan alat-alat perikanan	65,000,000.00	64,240,000.00	760,000.00	98.83
	Jumlah	5,182,074,462,157.57	4,441,673,370,394.65	740,401,091,762.92	85.71
	Surplus/Defisit	(1,123,975,371,743.57)	(19,073,971,176.50)	(1,104,901,400,567.07)	95.93
6	PEMBIAYAAN DAERAH	1,123,975,371,743.57	1,125,220,244,892.32	(1,244,873,148.75)	99.03
61	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1,136,075,371,743.57	1,131,115,244,892.32	4,960,126,851.25	99.56
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1,128,475,371,743.57	1,128,475,371,743.57	0.00	100.00
61101	Pelampauan Penerimaan PAD	-18,525,878,046.11	-18,189,851,140.51	-336,026,905.60	98.19
61102	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-28,526,658,674.00	-28,526,658,674.00	0.00	100.00
61103	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	96,772,404,448.80	96,436,377,543.20	336,026,905.60	99.65
61104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	1,078,402,094,529.61	1,078,402,094,529.61	0.00	100.00
61107	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah	-6,471,590,514.73	-6,471,590,514.73	0.00	100.00
61108	Sisa Penghematan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,825,000,000.00	6,825,000,000.00	0.00	100.00
617	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	7,600,000,000.00	2,639,873,148.75	4,960,126,851.25	34.74
61701	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	7,600,000,000.00	2,639,873,148.75	4,960,126,851.25	34.74



62	Pengeluaran Pembiayaan daerah	12,100,000,000.00	5,895,000,000.00	6,205,000,000.00	48.72
622	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12,100,000,000.00	5,895,000,000.00	6,205,000,000.00	48.72
62202	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	0.00	100.00
62204	Dana Bergulir	7,600,000,000.00	1,395,000,000.00	6,205,000,000.00	18.36
	Jumlah	1,123,975,371,743.57	1,125,220,244,892.32	(1,244,873,148.75)	99.03
	Pembiayaan	1,123,975,371,743.57	1,125,220,244,892.32	(1,244,873,148.75)	99.03
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0.00	1,106,146,273,715.82	(1,106,146,273,715.82)	96.27

Lampiran 10
**PERNYATAAN REVIEW LKjIP
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 30 Maret 2022

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700926 199003 1 005

